

Berita Jumat, 16 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Jumat, 16 Oktober 2026, menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih memiliki peluang pertumbuhan, tetapi menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi, ketidakpastian pasar keuangan, konflik di Timur Tengah, dan perubahan teknologi. Salah satu perkembangan positif terlihat dari ekonomi Malaysia yang tumbuh sebesar 5,3% pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun melambat dari pertumbuhan 6% pada kuartal sebelumnya, pencapaian tersebut tetap melampaui perkiraan analis sebesar 5,1%. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, sektor jasa yang tumbuh 5,4%, serta sektor manufaktur yang meningkat 7,5%, terutama karena permintaan produk listrik, elektronik, dan semikonduktor yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa teknologi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi negara yang mampu memasok kebutuhan industri teknologi global. Namun, kontraksi sektor pertambangan dan penggalian serta ketidakpastian perdagangan internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap bergantung pada kemampuan setiap negara menghadapi perubahan kondisi global.

Di tengah peluang pertumbuhan tersebut, Amerika Serikat menghadapi persoalan kenaikan inflasi yang berpotensi memengaruhi kebijakan ekonomi dan aktivitas industrinya. Indeks Harga Produsen meningkat 1,3% secara bulanan pada September 2026, menjadi kenaikan terbesar sejak Maret 2022, sedangkan secara tahunan mencapai 6,3%. Kenaikan harga energi sebesar 10,8% dan biaya jasa transportasi serta pergudangan sebesar 3,4% memperlihatkan bahwa tekanan biaya produksi tidak hanya berasal dari bahan bakar, tetapi juga merambat ke distribusi barang dan jasa. Apabila kondisi ini berlanjut, perusahaan dapat menghadapi kenaikan biaya operasional yang kemudian diteruskan kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi. Sementara itu, produksi manufaktur Amerika Serikat memang meningkat 0,3% pada September, tetapi pertumbuhannya selama kuartal III hanya mencapai tingkat tahunan 0,7%, jauh lebih rendah daripada 5,6% pada kuartal II. Meskipun produksi semikonduktor dan komponen elektronik melonjak 28,4% karena kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan, kenaikan biaya energi, perang dagang, dan tingginya biaya pinjaman masih menjadi hambatan bagi industri. Dengan demikian, kondisi Amerika Serikat memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi dapat mendorong sebagian kegiatan produksi, tetapi belum tentu mampu mengatasi seluruh tekanan ekonomi yang berasal dari kenaikan biaya dan ketidakpastian global.

Tekanan inflasi Amerika Serikat tersebut turut memengaruhi perkiraan pasar terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral, sekaligus meningkatkan ketidakpastian di pasar mata uang dan investasi. Meskipun data inflasi konsumen dan produsen lebih tinggi daripada perkiraan, sejumlah pejabat Federal Reserve menilai belum terdapat kebutuhan mendesak untuk kembali memperketat kebijakan moneter. Pasar memperkirakan peluang sebesar 85% bahwa suku bunga acuan akan dipertahankan pada pertemuan akhir Oktober, sedangkan keputusan untuk Desember masih belum pasti. Situasi ini ikut mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat pada akhir pekan, ketika investor mulai mempertimbangkan bahwa suku bunga mungkin tidak meningkat dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, saham perusahaan kecerdasan buatan mengalami tekanan karena muncul kekhawatiran mengenai kemampuan pengelola pusat data menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar utang dan menutup investasi besar mereka. Perkembangan ini berkaitan dengan peringatan Dana Moneter Internasional bahwa manfaat kecerdasan buatan tidak selalu lebih besar daripada risikonya. Apabila teknologi tersebut mampu meningkatkan produktivitas, sebagian pekerjaan berpotensi tergantikan oleh otomatisasi, sedangkan jika peningkatan produktivitas tidak sesuai harapan, investasi besar pada pusat data dapat memicu kerugian dan tekanan keuangan. Oleh karena itu, perkembangan

ekonomi internasional menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan tenaga kerja, pengawasan teknologi, dan kestabilan sistem keuangan.

Berbagai tekanan ekonomi internasional tersebut menjadi latar penting bagi Indonesia yang pada saat bersamaan menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan. Pada perdagangan Jumat, rupiah sempat berada di sekitar Rp18.047 per dolar Amerika Serikat dan ditutup pada kisaran Rp18.011 hingga Rp18.027 per dolar Amerika Serikat berdasarkan laporan yang berbeda. Pelemahan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan investor menghindari risiko, penguatan dolar pada periode sebelumnya, serta kekhawatiran terhadap kondisi pasar modal Indonesia setelah Morgan Stanley Capital International mempertimbangkan kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi pasar mandiri. Sentimen tersebut mendorong tekanan jual pada saham dan surat berharga negara serta berpotensi memicu arus modal keluar. Namun, kondisi ini tidak berarti seluruh fondasi ekonomi Indonesia melemah. Cadangan devisa masih tercatat sebesar US\$146,3 miliar pada akhir September 2026, sementara neraca perdagangan pada Agustus masih mencatat surplus US\$3,55 miliar. Inflasi September sebesar 3,28% juga masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia sebagaimana diberitakan. Dengan demikian, persoalan utama yang perlu dihadapi Indonesia bukan hanya menjaga indikator ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor melalui transparansi, kepastian kebijakan, dan perbaikan tata kelola pasar keuangan agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi masalah ekonomi yang lebih luas.

Pelemahan rupiah tersebut juga menimbulkan risiko terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena nilai tukar, imbal hasil surat berharga negara, dan harga minyak dunia dapat memengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Dalam berita yang dihimpun, asumsi nilai tukar rupiah dalam anggaran 2026 berada pada Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai tukar pasar telah melewati Rp18.000. Menurut perhitungan ekonom yang dikutip dalam berita, selisih tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap defisit anggaran hingga sekitar Rp13,5 triliun apabila rupiah bertahan pada level tersebut. Tekanan fiskal juga meningkat karena imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun telah melampaui asumsi anggaran sekitar 6,9%, sementara harga minyak dunia berada di sekitar US\$100 per barel, lebih tinggi daripada asumsi sekitar US\$70 per barel. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pembayaran utang, subsidi, dan kompensasi energi. Oleh sebab itu, Dana Moneter Internasional mengingatkan Indonesia untuk mempertahankan defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk domestik bruto. Pemerintah perlu memperkuat efisiensi dan menentukan prioritas belanja, sedangkan subsidi harus diberikan secara tepat sasaran agar masyarakat tetap terlindungi tanpa mengurangi kemampuan negara menghadapi tekanan ekonomi berikutnya.

Selain menjaga stabilitas nilai tukar dan anggaran negara, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama keuangan internasional untuk mengurangi hambatan transaksi dan meningkatkan ketahanan sistem pembayaran. Dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Bangkok, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas bagi inovasi keuangan digital serta mendorong pembayaran lintas negara berbasis kode respons cepat dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembayaran, mempermudah perdagangan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Penggunaan mata uang lokal juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan transaksi pada dolar Amerika Serikat, meskipun manfaatnya bergantung pada kesiapan sistem pembayaran dan kesepakatan antarnegara. Di dalam negeri, Bank Indonesia menyatakan akan terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, transaksi berjangka, pembelian surat berharga negara di pasar sekunder, serta pengelolaan likuiditas. Langkah-langkah ini perlu berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola pasar modal dan kebijakan fiskal yang berhati-hati. Dengan demikian, stabilitas ekonomi Indonesia tidak cukup bergantung pada intervensi jangka pendek, tetapi juga membutuhkan sistem keuangan yang transparan, kerja sama internasional yang efektif, dan kebijakan yang mampu menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Tekanan ekonomi nasional juga terlihat pada meningkatnya harga kebutuhan pokok yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia pada 16 Oktober 2026, seluruh kelompok komoditas pangan yang dipantau mengalami kenaikan harga, dengan cabai merah keriting mencatat kenaikan paling besar hingga 73,13% menjadi Rp145.950 per kilogram. Harga cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, daging, telur, gula, dan minyak goreng juga meningkat. Kenaikan yang terjadi pada berbagai kelompok bahan pangan ini menjadi perhatian karena kebutuhan tersebut merupakan bagian penting dari pengeluaran rumah tangga. Apabila harga pangan terus meningkat ketika rupiah melemah dan biaya energi masih tinggi, masyarakat berpotensi mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain, sedangkan pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan operasional. Situasi tersebut dapat memengaruhi aktivitas perdagangan, produksi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kestabilan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga, terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan tajam. Upaya menjaga harga pangan menjadi semakin penting agar tekanan ekonomi tidak hanya tercermin pada indikator keuangan, tetapi juga tidak semakin membebani kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di samping tekanan harga dan pasar keuangan, Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dapat menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, saat ini penyerapan sekitar 300.000 orang saja sudah dinilai cukup baik. Perubahan tersebut berkaitan dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam proses produksi sehingga industri yang sebelumnya padat karya mulai mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia. Meskipun industri pengolahan telah menyerap lebih dari 20 juta pekerja, pertumbuhan industri tidak lagi selalu diikuti peningkatan kesempatan kerja sebesar periode sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Pemerintah berupaya memperluas kesempatan kerja melalui pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja terampil di luar negeri, termasuk ke Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Singapura. Kementerian Perindustrian menyiapkan kapasitas pelatihan vokasi hingga 11.000 peserta per tahun bagi calon pekerja migran, sementara pemerintah menargetkan pelatihan sebanyak 140.000 peserta secara nasional pada 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertemukan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan pasar internasional, sekaligus mengurangi kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak.

Tantangan ekonomi nasional tersebut juga berkaitan dengan kondisi perekonomian daerah, termasuk Jawa Tengah, yang masih membutuhkan penguatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Berdasarkan publikasi mengenai profil industri mikro dan kecil Jawa Tengah tahun 2025 yang dimuat dalam berita, sektor industri pengolahan menyumbang 33,39% terhadap perekonomian provinsi. Jumlah usaha mikro dan kecil tercatat mencapai 843.890 usaha, dengan sekitar 303.000 usaha termasuk kelompok industri mikro dan kecil yang dibahas dalam publikasi tersebut. Namun, sebanyak 55,89% usaha yang disurvei mengaku mengalami kesulitan menjalankan usaha, terutama karena keterbatasan modal yang dialami oleh 57,72% usaha. Selain persoalan modal, sebanyak 36,60% menghadapi kendala pemasaran atau penjualan, sedangkan 33,48% mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan usaha kecil yang besar jumlahnya belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan kegiatan produksi maupun peningkatan pendapatan pelaku usaha. Keterbatasan modal dapat menghambat pembelian bahan baku dan pengembangan kapasitas produksi, sementara kesulitan pemasaran membuat produk yang dihasilkan belum tentu memperoleh pasar yang stabil. Oleh karena itu, penguatan usaha mikro dan kecil di Jawa Tengah perlu didukung oleh akses pembiayaan yang lebih mudah, perluasan jaringan pemasaran, dan ketersediaan bahan baku agar usaha dapat berkembang serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan memperkuat perekonomian daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta perguruan tinggi memperkuat kolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Dalam berita tersebut, angka kemiskinan Jawa Tengah disebut menurun dari 9,58% menjadi 9,21%, tetapi penurunan ini tetap perlu diikuti program yang berkelanjutan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Pemerintah telah menetapkan 16.550 desa sebagai lokasi prioritas pengentasan kemiskinan pada 2026, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan sekitar 133 perguruan tinggi melalui penelitian, kuliah kerja nyata tematik, dan pendampingan masyarakat di desa. Kolaborasi ini diharapkan mampu memanfaatkan pengetahuan, hasil penelitian, dan inovasi kampus untuk membantu menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat secara langsung. Pendekatan pengentasan kemiskinan juga diarahkan agar tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan, tetapi mendorong pemberdayaan, pengembangan kemampuan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Jika dikaitkan dengan persoalan usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi keterbatasan modal, pemasaran, serta bahan baku, pendampingan perguruan tinggi dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha dan menentukan strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Secara keseluruhan, rangkaian berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kestabilan keuangan, pengendalian inflasi, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesempatan ekonomi. Tantangan global perlu diantisipasi melalui kebijakan nasional yang berhati-hati, sementara upaya di tingkat daerah perlu diarahkan pada penguatan usaha masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut meningkatkan daya beli, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ringkasan

- Perekonomian Malaysia tumbuh 5,3% pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, lebih tinggi dari perkiraan 5,1%, meskipun melambat dari pertumbuhan 6% pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung sektor jasa yang meningkat 5,4% dan manufaktur yang tumbuh 7,5%, terutama karena permintaan produk elektronik dan semikonduktor untuk teknologi kecerdasan buatan. Konsumsi rumah tangga yang kuat serta subsidi bahan bakar turut menjaga daya beli masyarakat, sementara pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,8%–5,3%.
- Indeks Harga Produsen Amerika Serikat naik 1,3% pada September 2026 dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 6,3% secara tahunan, menjadi kenaikan bulanan tertinggi sejak Maret 2022. Kenaikan terutama dipicu oleh harga energi yang melonjak 10,8%, disertai peningkatan biaya jasa transportasi dan pergudangan sebesar 3,4% serta harga makanan sebesar 1,2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahalnya energi dapat meningkatkan biaya pengangkutan bahan baku dan distribusi barang, sehingga berpotensi memperluas tekanan inflasi ke berbagai sektor usaha dan harga yang dibayar konsumen.
- Dolar Amerika Serikat melemah setelah sejumlah pejabat bank sentral memberikan sinyal bahwa belum ada kebutuhan mendesak untuk kembali menaikkan suku bunga, meskipun data inflasi menunjukkan tekanan harga yang masih tinggi. Pelaku pasar memperkirakan peluang sebesar 85% bahwa suku bunga akan dipertahankan pada pertemuan akhir Oktober 2026, sedangkan keputusan untuk Desember masih belum pasti. Pada saat yang sama, saham-saham perusahaan kecerdasan buatan mengalami tekanan karena investor mempertanyakan kemampuan perusahaan pengelola pusat data menghasilkan keuntungan untuk membayar utang dan menilai apakah investasi besar di bidang tersebut dapat memberikan hasil sesuai harapan.
- Produksi manufaktur Amerika Serikat meningkat 0,3% pada September 2026 setelah turun 0,2% pada Agustus, tetapi pertumbuhan tahunan pada kuartal III hanya mencapai 0,7%, jauh

lebih rendah dibandingkan 5,6% pada kuartal sebelumnya. Tekanan harga energi, kenaikan biaya pinjaman, dan ketegangan perdagangan menjadi sejumlah faktor yang dapat membebani kegiatan industri. Namun, produksi semikonduktor dan komponen elektronik terkait melonjak 28,4% selama kuartal III karena meningkatnya kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa permintaan teknologi masih mendukung sektor tertentu, meskipun kinerja manufaktur secara keseluruhan mulai kehilangan momentum.

- Dana Moneter Internasional memperingatkan risiko kecerdasan buatan terhadap ekonomi global. IMF menilai kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaat tersebut belum tentu tercapai apabila teknologi berkembang lebih cepat daripada kesiapan masyarakat dan kebijakan pengaman. Investasi AI yang sangat besar juga berpotensi memperlebar ketimpangan antarnegara karena tidak semua negara memiliki kemampuan modal, infrastruktur, dan teknologi yang sama. Karena itu, IMF mendorong keterlibatan pemerintah dan industri dalam membangun aturan serta landasan etika agar perkembangan AI tidak menimbulkan gangguan ekonomi dan keuangan yang lebih besar daripada manfaatnya.
- Indonesia mendorong penguatan transaksi mata uang lokal dan pembayaran digital dalam forum G20. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Bangkok, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya aturan yang jelas bagi inovasi keuangan digital serta penguatan pembayaran lintas negara berbasis kode QR dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Langkah ini diharapkan dapat membuat pembayaran lebih efisien, mendukung perdagangan antarnegara, dan memperluas akses layanan keuangan. Indonesia juga mengusulkan pemetaan awal mengenai perbedaan aturan dan kondisi pasar keuangan setiap negara agar kerja sama yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.
- Nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026, rupiah sempat berada di kisaran Rp18.047 per dolar Amerika Serikat dan ditutup pada kisaran Rp18.011–Rp18.027 berdasarkan laporan yang berbeda. Pelemahan dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran investor terhadap risiko global, arus modal keluar, serta perhatian pasar terhadap kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International. Meski demikian, Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa masih terjaga sebesar US\$146,3 miliar pada akhir September dan terus melakukan intervensi melalui pasar valuta asing serta pembelian surat berharga negara untuk menjaga stabilitas rupiah.
- Tekanan di pasar keuangan berpotensi meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil surat berharga negara, dan tingginya harga minyak dunia dapat membuat biaya anggaran meningkat karena asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 berbeda dari kondisi pasar. Jika rupiah bertahan di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, ekonom memperkirakan tekanan tambahan terhadap defisit anggaran dapat mencapai sekitar Rp13,5 triliun. Kenaikan imbal hasil obligasi dan harga minyak juga berpotensi menambah beban pembayaran bunga, subsidi, serta kompensasi energi, sehingga pemerintah perlu menata prioritas dan meningkatkan efisiensi belanja.
- Dana Moneter Internasional mengingatkan Indonesia untuk menjaga defisit anggaran maksimal 3% dari produk domestik bruto. IMF menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,1% pada 2026. Namun, tingginya biaya pembiayaan, kenaikan harga energi, dan terbatasnya ruang fiskal di kawasan Asia membuat pemerintah perlu menjaga disiplin anggaran. Dukungan berupa subsidi tetap dapat diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, tetapi harus tepat sasaran dan sesuai kemampuan anggaran agar tidak mengganggu keberlanjutan keuangan negara.

- Kenaikan harga pangan menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis pada 16 Oktober 2026 menunjukkan bahwa berbagai komoditas pangan yang dipantau mengalami kenaikan harga, mulai dari cabai, bawang, beras, daging, telur, gula, hingga minyak goreng. Cabai merah keriting mencatat kenaikan paling tinggi, yakni 73,13%, menjadi Rp145.950 per kilogram. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok tersebut berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan menambah biaya usaha yang menggunakan bahan pangan, sehingga perkembangan harga dan ketersediaan pasokan menjadi perhatian penting.
- Pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja sebanyak periode sebelumnya. Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 1% yang dahulu dapat menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, kini diperkirakan hanya menyerap sekitar 300.000 orang. Perubahan tersebut berkaitan dengan penggunaan teknologi yang membuat sejumlah industri mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia, meskipun industri pengolahan masih mempekerjakan lebih dari 20 juta orang. Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah mendorong pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran yang ingin bekerja di negara seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Singapura, dengan kapasitas pelatihan Kementerian Perindustrian hingga 11.000 peserta per tahun dan target pelatihan nasional sebanyak 140.000 peserta pada 2027.
- Industri mikro dan kecil masih menghadapi kendala modal, pemasaran, dan bahan baku. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 33,39% terhadap perekonomian Jawa Tengah pada 2025. Data yang dikutip dari survei industri mikro dan kecil mencatat sekitar 843.890 usaha mikro dan kecil di Jawa Tengah, dengan sekitar 303.000 di antaranya termasuk industri mikro dan kecil. Namun, sebanyak 55,89% usaha mengaku menghadapi kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kendala terbesar adalah permodalan sebesar 57,72%, disusul pemasaran atau penjualan sebesar 36,60% dan ketersediaan bahan baku sebesar 33,48%, sementara persoalan tenaga kerja dan energi juga masih dihadapi sebagian pelaku usaha.
- Pemerintah Jawa Tengah memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengurangi kemiskinan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan perguruan tinggi mendorong kolaborasi agar ilmu pengetahuan, penelitian, serta pendampingan masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Pemerintah menetapkan 16.550 desa sebagai lokasi prioritas pengentasan kemiskinan pada 2026, sedangkan angka kemiskinan Jawa Tengah dilaporkan turun dari 9,58% menjadi 9,21%. Pemerintah provinsi juga telah bekerja sama dengan sekitar 133 perguruan tinggi melalui kegiatan kuliah kerja nyata tematik, penelitian, dan pendampingan desa untuk membantu mengenali kebutuhan masyarakat serta merancang program yang lebih tepat sasaran.
- Pengentasan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dalam kerja sama tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga membantu mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pengetahuan, inovasi, data, serta pendampingan langsung. Pemerintah juga menekankan pentingnya mengubah pendekatan dari pemberian bantuan semata menuju pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat membangun kemandirian secara berkelanjutan. Dengan menghubungkan kemampuan perguruan tinggi, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan desa, program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Implikasi

- Pertumbuhan ekonomi Malaysia sebesar 5,3 persen pada kuartal ketiga menunjukkan bahwa sektor elektronik, semikonduktor, dan kecerdasan buatan masih memberikan kontribusi penting terhadap kegiatan ekonomi. Namun, ketergantungan pada sektor teknologi juga dapat menimbulkan risiko apabila permintaan global melemah, sehingga Malaysia perlu memperkuat sektor ekonomi lainnya agar pertumbuhan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu sumber utama.
- Kenaikan harga produsen akibat meningkatnya biaya energi dapat mendorong biaya produksi dan distribusi menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan berpotensi menaikkan harga barang yang dijual kepada konsumen. Jika tekanan biaya ini berlangsung dalam waktu lama, inflasi dapat semakin sulit dikendalikan dan berdampak pada daya beli masyarakat serta kegiatan perdagangan dengan negara lain.
- Ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat dapat memengaruhi keputusan investor dalam menempatkan modalnya di berbagai negara. Perubahan arus modal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dan pasar keuangan, sehingga negara berkembang perlu menjaga kestabilan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor agar gejolak eksternal tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.
- Penggunaan kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, mempercepat pekerjaan, dan membantu mengurangi biaya operasional. Namun, perkembangan ini juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan tertentu, sehingga pemerintah dan dunia usaha perlu memperluas pelatihan serta meningkatkan keterampilan pekerja agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industri.
- Perlambatan industri manufaktur di tengah pesatnya perkembangan industri semikonduktor menunjukkan bahwa kemajuan pada sektor teknologi belum tentu diikuti oleh pertumbuhan yang sama pada seluruh sektor ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi perlu disertai upaya memperkuat industri manufaktur lainnya agar pertumbuhan ekonomi lebih seimbang, kesempatan kerja tetap terbuka, dan perekonomian tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.
- Nilai tukar rupiah yang berada di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, barang modal, dan berbagai kebutuhan yang dibayar menggunakan mata uang asing. Kondisi ini berpotensi menambah beban perusahaan dan mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri, sehingga upaya menjaga stabilitas nilai tukar perlu disertai penguatan kepercayaan pasar dan pengelolaan ekonomi yang hati-hati.
- Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dapat meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah, terutama untuk membiayai subsidi energi dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Jika beban tersebut terus meningkat, ruang anggaran untuk program pembangunan lainnya dapat menjadi lebih terbatas, sehingga pemerintah perlu mengendalikan pengeluaran, meningkatkan ketepatan sasaran subsidi, dan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Rekomendasi Dana Moneter Internasional agar defisit anggaran tetap terkendali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan pembangunan, sekaligus menjaga agar beban keuangan negara tidak meningkat secara berlebihan.
- Penggunaan pembayaran kode respons cepat lintas negara dan transaksi dengan mata uang lokal dapat mempermudah pembayaran dalam kegiatan perdagangan maupun transaksi masyarakat antarnegara. Apabila didukung oleh sistem pembayaran yang aman, aturan yang jelas, dan kerja sama antarnegara, langkah ini dapat membantu mengurangi hambatan transaksi serta memberikan pilihan pembayaran yang lebih efisien bagi pelaku usaha Indonesia.

- Kenaikan harga pangan dapat mengurangi daya beli masyarakat karena sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampaknya dapat lebih berat bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga pemerintah perlu menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antardaerah, dan mengawasi perkembangan harga agar kebutuhan pokok tetap terjangkau tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap konsumen maupun pedagang.
- Perkembangan teknologi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi peningkatan kegiatan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pertambahan kesempatan kerja dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kemampuan digital perlu diperkuat agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri, memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, dan tidak tertinggal akibat perubahan teknologi.
- Kendala modal yang dialami 57,72 persen industri mikro dan kecil menunjukkan bahwa akses pembiayaan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mengembangkan usaha. Keterbatasan tersebut dapat membuat pelaku usaha kesulitan membeli bahan baku, memperbarui peralatan, atau meningkatkan kapasitas produksi, sehingga kemudahan memperoleh pembiayaan dan pendampingan pengelolaan keuangan diperlukan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.
- Kendala pemasaran yang dialami 36,60 persen industri mikro dan kecil menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan produk perlu diimbangi dengan akses pasar yang memadai. Pelaku usaha dapat didukung melalui pelatihan pemasaran digital, keikutsertaan dalam pameran, serta kerja sama dengan toko dan pelaku usaha yang lebih besar agar produk lokal semakin dikenal, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan meningkatkan pendapatan usaha.
- Kendala bahan baku yang dialami 33,48 persen industri mikro dan kecil dapat menghambat kelancaran produksi, terutama ketika pasokan tidak tersedia sesuai kebutuhan atau harganya meningkat. Oleh karena itu, penguatan hubungan antara pelaku usaha dan pemasok, perbaikan distribusi, serta pengembangan sumber bahan baku lokal dapat membantu menjaga kelangsungan produksi dan mengurangi risiko keterlambatan pemenuhan pesanan.
- Keterlibatan sekitar 133 perguruan tinggi di Jawa Tengah dapat menjadi peluang untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dari 9,58 persen menjadi 9,21 persen serta membantu masyarakat memperoleh sumber penghasilan yang lebih stabil.
- Penanganan 16.550 desa prioritas perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain memberikan bantuan sesuai kebutuhan, program pemerintah dapat diarahkan pada pengembangan usaha lokal, peningkatan keterampilan kerja, dan pemanfaatan potensi desa sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.
- Penguatan industri mikro dan kecil, pengembangan ekonomi desa, serta program pengurangan kemiskinan perlu dijalankan secara saling mendukung agar hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu. Dengan memperluas kesempatan usaha, memperbaiki akses pembiayaan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkecil kesenjangan kesejahteraan antardaerah.

Berita Sabtu, 17 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah pada 17 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya utang negara maju, ketidakpastian global, hingga tekanan terhadap nilai tukar dan anggaran pemerintah. Di tingkat internasional, konflik dan kenaikan harga energi menambah risiko terhadap perdagangan serta pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara itu, Indonesia menghadapi pelemahan rupiah dan tekanan pasar keuangan yang dapat meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah perlu menjaga kestabilan ekonomi sekaligus memperbaiki iklim investasi dan mendorong pertumbuhan usaha. Di Jawa Tengah, rencana investasi pabrik biometana di Kabupaten Blora menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan energi bersih dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Di tingkat internasional, Tiongkok menyatakan dukungannya terhadap langkah Dana Moneter Internasional untuk memperketat pengawasan risiko fiskal di negara-negara maju. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah negara menghadapi defisit anggaran yang tinggi, biaya pinjaman yang meningkat, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Besarnya investasi pada teknologi kecerdasan buatan juga menambah ketidakpastian bagi investor dan pasar obligasi global. Oleh karena itu, Tiongkok mendorong Dana Moneter Internasional untuk lebih memperhatikan ketidakseimbangan ekonomi dunia, terutama pengaruh arus modal terhadap kondisi keuangan antarnegara. Tiongkok juga menegaskan dukungannya terhadap perdagangan antarnegara yang terbuka dan menolak kebijakan proteksionisme. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap utang dan pengelolaan keuangan negara perlu diperkuat agar masalah ekonomi di negara besar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi negara lain.

Selain memperkuat pengawasan fiskal, negara-negara anggota Dana Moneter Internasional juga menilai bahwa negara yang mengalami kesulitan pembiayaan akibat perang dan tingginya harga energi membutuhkan dukungan lebih besar. Konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu jalur perdagangan, meningkatkan harga bahan baku dan energi, serta mengancam ketersediaan pangan. Kondisi tersebut semakin sulit diatasi ketika biaya pinjaman meningkat dan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat menjadi terbatas. Karena itu, dukungan pembiayaan perlu diberikan terutama kepada negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah yang rentan, serta negara yang terdampak konflik dan memiliki kebutuhan dana jangka pendek. Dukungan ini diharapkan dapat membantu negara-negara tersebut menjaga kegiatan ekonomi dan melaksanakan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, kerja sama internasional menjadi penting untuk mengurangi dampak krisis dan mencegah masalah keuangan di suatu negara berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Tekanan ekonomi internasional juga terlihat dari meningkatnya defisit anggaran Amerika Serikat menjadi US\$1,99 triliun pada tahun fiskal 2026, dibandingkan US\$1,78 triliun pada tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan pemerintah meningkat menjadi US\$5,40 triliun, pengeluaran bertambah lebih besar hingga mencapai US\$7,40 triliun. Kenaikan belanja tersebut dipengaruhi oleh pengeluaran untuk jaminan sosial, layanan kesehatan, pertahanan, dan pembayaran bunga utang yang mencapai rekor US\$1,36 triliun. Selain itu, pengembalian tarif impor senilai US\$145 miliar setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat turut mengurangi penerimaan bersih pemerintah dari tarif tersebut. Total utang Amerika Serikat yang telah melampaui US\$40 triliun semakin memperberat kondisi anggaran. Keadaan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan negara belum cukup untuk menjaga anggaran tetap sehat apabila pengeluaran terus bertambah lebih cepat. Tingginya kebutuhan pembiayaan Amerika Serikat juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi imbal hasil obligasi dan biaya pinjaman di negara lain, termasuk Indonesia.

Dampak ketidakpastian global tersebut turut dirasakan Indonesia melalui pelemahan rupiah dan tekanan di pasar keuangan. Pada 16 Oktober 2026, rupiah melemah hingga Rp18.027 per dolar Amerika Serikat di pasar spot, sedangkan kurs acuan Bank Indonesia mencapai Rp18.052 per dolar Amerika Serikat. Tekanan ini terjadi setelah Morgan Stanley Capital International mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri. Pengumuman tersebut memengaruhi sentimen investor dan mendorong keluarnya modal dari pasar keuangan Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kondisi tersebut perlu dibedakan dari keadaan dasar perekonomian nasional yang dinilai masih kuat. Namun, pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan biaya impor, menambah beban pembayaran utang luar negeri, dan memengaruhi kebutuhan belanja pemerintah. Oleh sebab itu, menjaga kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam mempertahankan kestabilan ekonomi Indonesia.

Pelemahan rupiah tersebut juga menambah risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena nilai tukar, imbal hasil obligasi pemerintah, dan harga minyak dunia telah melampaui asumsi anggaran 2026. Nilai tukar rupiah yang berada di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat lebih lemah daripada asumsi anggaran sebesar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Menurut perhitungan ekonom yang dikutip dalam berita, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 berpotensi menambah defisit anggaran hampir Rp900 miliar. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah bertenor sepuluh tahun telah melampaui 7,3%, lebih tinggi daripada asumsi sekitar 6,9%. Harga minyak dunia yang mencapai sekitar US\$100 per barel juga berada di atas asumsi anggaran sebesar US\$70 per barel, sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi. Jika tekanan tersebut terus berlangsung tanpa diimbangi pengendalian pengeluaran, defisit anggaran berisiko melampaui 3% dari produk domestik bruto. Karena itu, pemerintah perlu mengatur prioritas belanja, mengurangi pengeluaran yang kurang mendesak, dan memastikan anggaran digunakan secara efektif agar kondisi keuangan negara tetap terkendali.

Untuk mengurangi tekanan pasar keuangan, pemerintah juga perlu memperbaiki kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan aturan yang jelas, keterbukaan informasi, penegakan hukum yang adil, dan penindakan terhadap praktik yang merugikan pasar. Pemerintah berencana berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia untuk mendorong pelaksanaan reformasi pasar modal dengan jadwal yang lebih jelas agar perkembangannya dapat dipantau oleh investor. Di sisi lain, Bank Indonesia perlu menjaga kestabilan rupiah melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi, termasuk mempertimbangkan suku bunga dan penggunaan cadangan devisa secara hati-hati. Kepercayaan investor tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh kepastian aturan dan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan secara terbuka. Oleh karena itu, perbaikan pasar keuangan perlu dilakukan secara nyata dan konsisten agar arus modal keluar dapat dikurangi dan investasi di Indonesia tetap menarik.

Dalam jangka panjang, Dewan Ekonomi Nasional menilai bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan peran sektor swasta yang lebih besar. Pemerintah perlu menyederhanakan perizinan, memberikan kepastian hukum, memperkuat industri, dan memperluas penggunaan teknologi digital. Langkah tersebut penting karena kontribusi sektor swasta terhadap produk domestik bruto dan investasi mencapai sekitar 88%. Indonesia dinilai perlu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6%–7% untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, meskipun perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan. Selain memperbaiki iklim usaha, pemerintah perlu mendorong hilirisasi agar sumber daya alam dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Peningkatan nilai ekspor nikel dan produk turunannya dari sekitar US\$1,5 miliar menjadi hampir US\$40 miliar pada 2025 menjadi salah satu contoh peluang tersebut. Pengembangan industri bauksit, aluminium, pusat data, dan infrastruktur digital juga dapat membuka kesempatan investasi baru. Namun, pengembangan tersebut harus

didukung oleh pasokan listrik yang memadai dan pengelolaan lingkungan yang baik agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya meningkatkan investasi, dunia usaha Indonesia juga perlu memperkuat daya saing dan mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian ekonomi pada 2027. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menekankan pentingnya ketahanan menghadapi krisis, peningkatan daya saing, serta kerja sama untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Perusahaan perlu menjaga kondisi keuangan, meningkatkan produktivitas, mengembangkan inovasi, dan menyesuaikan strategi dengan perubahan ekonomi serta perkembangan teknologi. Penggunaan kecerdasan buatan diharapkan dapat membantu pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang pekerjaan yang lebih berkualitas. Selain itu, kerja sama antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diperkuat agar usaha kecil memiliki akses pasar dan kesempatan berkembang yang lebih luas. Usaha mikro, kecil, dan menengah mencakup sekitar 98% dari seluruh unit usaha di Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja nasional, dan menyumbang 61,9% terhadap produk domestik bruto. Oleh karena itu, penguatan usaha kecil, kepastian kebijakan, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja perlu berjalan bersama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Di Jawa Tengah, peluang pengembangan ekonomi terlihat dari rencana investasi perusahaan energi asal Jepang, Toho Gas, untuk membangun pabrik biometana di Kabupaten Blora. Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa rencana tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, petani, peternak, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai penyedia bahan baku. Limbah pertanian dan kotoran ternak yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal direncanakan akan diolah menjadi biometana melalui teknologi pengolahan energi bersih. Apabila investasi ini dapat diwujudkan, proyek tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekonomi limbah, dan menambah pendapatan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan bahan baku. Pengembangan biometana juga dapat mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan memperkuat kegiatan ekonomi berbasis potensi daerah. Namun, rencana tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan pemetaan ketersediaan bahan baku, sehingga belum dapat dianggap sebagai investasi yang sudah terealisasi. Keberhasilannya akan bergantung pada kelanjutan proses investasi, kesiapan pasokan, dan kerja sama antara perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Secara keseluruhan, berita-berita tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah saling berkaitan melalui perdagangan, arus modal, harga energi, investasi, dan kegiatan usaha. Meningkatnya utang negara maju serta ketidakpastian global dapat memengaruhi pasar keuangan dan menambah tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan rupiah, mengendalikan defisit anggaran, memperbaiki pasar modal, dan meningkatkan kepastian hukum agar kepercayaan investor tetap terjaga. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi perlu diperkuat melalui penyederhanaan perizinan, pengembangan industri, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tingkat daerah, rencana investasi biometana di Blora memperlihatkan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggabungkan kestabilan ekonomi, kebijakan yang konsisten, investasi produktif, dan kerja sama antara pemerintah serta dunia usaha, Indonesia memiliki peluang untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata.

Ringkasan

- Gubernur Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan dukungan terhadap langkah Dana Moneter Internasional untuk memperketat pengawasan risiko fiskal di negara-negara maju dan dampaknya terhadap perekonomian global. Lonjakan biaya pinjaman, defisit anggaran yang tinggi, serta ketidakstabilan sentimen investor telah menimbulkan gejolak di pasar obligasi dunia. Tiongkok juga mendukung perdagangan multilateral dan menentang proteksionisme, sementara Dana Moneter Internasional menilai Tiongkok perlu memperkuat konsumsi domestik agar pertumbuhan ekonominya tidak terlalu bergantung pada ekspor.
- Negara-negara anggota Dana Moneter Internasional menyerukan dukungan lebih besar bagi negara yang menghadapi kesulitan pembiayaan jangka pendek akibat konflik dan kenaikan harga energi. Konflik serta ketegangan perdagangan dinilai dapat mengganggu jalur perdagangan, meningkatkan harga komoditas, dan memperburuk ketahanan energi serta pangan. Negara anggota juga sepakat mendukung negara yang melakukan reformasi dan mengatasi kerentanan utang, terutama negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah yang rentan, dan negara terdampak konflik, termasuk melalui dukungan bagi Poverty Reduction and Growth Trust untuk membantu negara miskin dan berkembang.
- Defisit tersebut naik US\$217 miliar dari US\$1,78 triliun pada tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Penerimaan pemerintah mencapai rekor US\$5,40 triliun, tetapi pengeluaran meningkat lebih cepat menjadi US\$7,40 triliun. Kenaikan belanja program jaminan sosial, pertahanan, serta pembayaran bunga utang yang mencapai US\$1,36 triliun menjadi faktor penting yang memperbesar defisit, sementara total utang nasional telah melampaui US\$40 triliun.
- Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sebagian besar tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump memicu pengembalian tarif senilai US\$145 miliar sepanjang tahun fiskal 2026. Akibatnya, penerimaan bersih dari tarif impor turun 11% menjadi sekitar US\$173 miliar. Di sisi lain, belanja pertahanan meningkat 6% menjadi US\$917 miliar, sedangkan rasio defisit terhadap produk domestik bruto diperkirakan mencapai 6,2%, lebih tinggi dibandingkan 5,8% pada tahun fiskal sebelumnya. Pada September 2026, pemerintah juga mencatat defisit US\$27 miliar, berbalik dari surplus US\$198 miliar pada September 2025.
- Pada 16 Oktober 2026, rupiah melemah ke Rp18.027 per dolar Amerika Serikat di pasar spot, sedangkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate berada di Rp18.052 per dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut lebih lemah dibandingkan asumsi anggaran negara sebesar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, imbal hasil Surat Berharga Negara tenor sepuluh tahun telah melampaui 7,3%, lebih tinggi daripada asumsi sekitar 6,9%, sementara harga minyak dunia mendekati US\$100 per barel, jauh di atas asumsi anggaran sebesar US\$70 per barel. Gabungan tekanan tersebut dapat meningkatkan beban pembayaran utang, subsidi, dan kompensasi energi, sehingga defisit anggaran berisiko melampaui 3% dari produk domestik bruto jika belanja tidak dikendalikan.
- Pengumuman konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri memengaruhi kepercayaan investor dan memicu tekanan pada pasar saham, nilai tukar, serta obligasi pemerintah. Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, memperkirakan bahwa apabila rupiah bertahan di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, selisihnya dari asumsi anggaran berpotensi menambah tekanan defisit sekitar Rp13,5 triliun. Ia juga memperkirakan setiap kenaikan imbal hasil obligasi sebesar 10 basis poin dapat menambah beban anggaran sekitar Rp1,8 triliun hingga Rp2 triliun, sedangkan kenaikan harga minyak US\$1 per barel berpotensi menambah tekanan defisit sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pelemahan rupiah dan penghentian sementara perdagangan saham pada 15 Oktober 2026 tidak terlepas

dari sentimen investor setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International. Pemerintah menilai gejolak tersebut perlu dibedakan dari kondisi fundamental perekonomian nasional. Meski demikian, pemerintah akan mencermati tuntutan terkait reformasi pasar modal, berkomunikasi dengan Bursa Efek Indonesia, dan mendorong langkah perbaikan yang lebih konkret dengan jadwal pelaksanaan yang jelas. Hal ini diperlukan agar kemajuan reformasi dapat dipantau oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.

- Ekonom Maybank Indonesia memperkirakan rupiah berpotensi bertahan di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar Amerika Serikat sampai akhir 2026, bergantung pada respons kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dinilai perlu mempertimbangkan berbagai instrumen moneter, termasuk suku bunga, untuk menjaga daya tarik investasi dan menahan arus modal keluar. Namun, intervensi pasar tidak dapat terus-menerus menjadi satu-satunya cara karena berpotensi menguras cadangan devisa. Pemerintah juga perlu melakukan efisiensi, mengevaluasi prioritas, dan meningkatkan efektivitas belanja agar target defisit sebesar 2,85% dari produk domestik bruto tetap dapat dipertahankan.
- Indonesia dinilai membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%–7% untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, sementara kontribusi sektor swasta terhadap produk domestik bruto dan investasi mencapai sekitar 88%. Untuk mempercepat pertumbuhan, pemerintah didorong menyederhanakan perizinan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong industrialisasi dan digitalisasi. Reformasi aturan diperlukan agar pelaku usaha lebih mudah merencanakan investasi, membangun fasilitas produksi, memperluas pasar, dan mengembangkan produk di tengah perlambatan ekonomi global serta ketidakpastian geopolitik dan harga energi.
- Dewan Ekonomi Nasional menyoroti keberhasilan peningkatan nilai ekspor nikel dan produk turunannya dari sekitar US\$1,5 miliar menjadi hampir US\$40 miliar pada 2025 sebagai contoh potensi hilirisasi. Pendekatan serupa dinilai dapat dikembangkan pada komoditas lain, seperti bauksit dan aluminium, untuk memperkuat industri dalam negeri. Selain itu, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pusat data, dan infrastruktur komputasi awan dapat membuka peluang investasi, tetapi tetap membutuhkan kepastian aturan, pasokan listrik yang memadai, dan pengelolaan dampak lingkungan.
- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menekankan tiga pilar, yaitu ketahanan menghadapi krisis, peningkatan daya saing, dan kepedulian untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Perusahaan perlu menjaga kondisi keuangan dan arus kas, meningkatkan produktivitas, inovasi, serta efisiensi, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan geopolitik, risiko iklim, dan perkembangan teknologi. Kepastian hukum serta konsistensi kebijakan juga diperlukan agar pelaku usaha dapat menyusun rencana investasi jangka panjang dengan lebih jelas.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi yang tetap mendukung kemampuan manusia serta memperkuat kerja sama perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sektor ini mencakup sekitar 63 juta unit usaha atau 98% dari seluruh unit usaha di Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja nasional, dan menyumbang 61,9% terhadap produk domestik bruto. Dengan memperkuat kapasitas usaha, akses pasar global, dan keterlibatan dalam rantai pasok, usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperluas kesempatan kerja.
- Perusahaan energi asal Jepang, Toho Gas, menunjukkan minat untuk membangun pabrik biometana di Blora dengan memanfaatkan limbah pertanian dan kotoran ternak. Bupati Blora, Arief Rohman, menilai rencana tersebut berpotensi menjadi salah satu proyek perintis biometana di Indonesia yang memanfaatkan sumber daya lokal. Namun, investasi ini masih berada pada tahap penjajakan dan pemetaan potensi bahan baku, sehingga pembangunan pabrik serta manfaat ekonominya belum dapat dipastikan.

- Pemerintah Kabupaten Blora menekankan perlunya kerja sama antara investor, pemerintah daerah, petani, peternak, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai penyedia bahan baku. Limbah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal direncanakan untuk diolah menggunakan teknologi menjadi biometana yang memiliki nilai ekonomi. Apabila rencana tersebut terealisasi, proyek ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, mendukung energi bersih, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Blora.
- Ketertarikan investor Jepang menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan. Jika proyek berjalan, rantai pasok bahan baku dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat setempat, sementara pengolahan limbah menjadi energi berpotensi meningkatkan nilai guna sumber daya daerah. Keberhasilan rencana tersebut tetap bergantung pada hasil penjajakan, ketersediaan bahan baku, kesiapan kerja sama masyarakat, dan kelanjutan keputusan investasi.

Implikasi

- Dukungan Tiongkok terhadap pemantauan risiko fiskal yang lebih ketat oleh Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa masalah keuangan negara maju dapat memengaruhi kestabilan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara perlu mengelola pengeluaran, utang, dan penerimaan secara lebih hati-hati agar tekanan fiskal tidak semakin besar dan berdampak pada negara lain.
- Imbauan Dana Moneter Internasional agar negara-negara yang terdampak perang dan kenaikan harga energi mendapatkan dukungan menunjukkan bahwa konflik internasional tidak hanya menimbulkan masalah keamanan, tetapi juga meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat, memperbesar beban perusahaan, serta mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kestabilan harga dan kegiatan ekonomi.
- Defisit sebesar 1,99 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun fiskal 2026, dengan pengeluaran 7,4 triliun dolar dan penerimaan 5,4 triliun dolar, menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Ditambah dengan beban pembayaran bunga sebesar 1,36 triliun dolar dan utang nasional yang telah melampaui 40 triliun dolar, kondisi ini dapat mempersempit ruang anggaran untuk kebutuhan lain dan meningkatkan risiko tekanan di pasar keuangan apabila beban utang terus bertambah.
- Besarnya pembayaran bunga di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sebagian anggaran harus digunakan untuk memenuhi kewajiban utang, sehingga ruang untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan program ekonomi dapat menjadi lebih terbatas. Keadaan tersebut juga menjadi pelajaran bagi negara lain agar kebijakan pembiayaan pemerintah mempertimbangkan kemampuan membayar utang dalam jangka panjang, bukan hanya memenuhi kebutuhan anggaran saat ini.
- Nilai rupiah yang berada di sekitar Rp18.027 per dolar Amerika Serikat di pasar spot dan Rp18.052 berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada 16 Oktober menunjukkan bahwa tekanan terhadap mata uang masih perlu diperhatikan. Apabila rupiah tetap lemah, biaya impor bahan baku, energi, dan barang modal berpotensi meningkat, sehingga dapat memengaruhi biaya produksi perusahaan dan harga barang yang dibayar masyarakat.
- Imbal hasil Surat Berharga Negara yang berada di atas 7,3 persen menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi biaya pembiayaan yang relatif tinggi di pasar keuangan. Jika kondisi tersebut berlanjut, penerbitan utang baru dapat membutuhkan biaya yang lebih besar dan menambah tekanan terhadap anggaran negara. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor melalui pengelolaan fiskal yang terukur dan kebijakan ekonomi yang konsisten.

- Harga minyak dunia yang mendekati 100 dolar Amerika Serikat per barel, lebih tinggi daripada asumsi anggaran sebesar 70 dolar per barel, dapat meningkatkan kebutuhan belanja energi dan subsidi apabila kebijakan pemerintah masih menahan kenaikan harga bagi masyarakat. Jika tekanan tersebut berlangsung lama, risiko defisit anggaran melampaui batas 3 persen dari produk domestik bruto dapat meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengendalikan belanja secara hati-hati sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kegiatan usaha.
- Rencana konsultasi mengenai klasifikasi pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi, kejelasan aturan, dan perlindungan investor dalam menjaga daya tarik pasar modal. Upaya pemerintah memperbaiki transparansi serta kepastian hukum perlu dilaksanakan secara konsisten agar investor dapat menilai kondisi pasar secara lebih jelas. Dengan demikian, perbaikan tersebut diharapkan membantu menjaga arus investasi dan mengurangi risiko penurunan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.
- Dorongan Dewan Energi Nasional terhadap peningkatan peran sektor swasta, penyederhanaan peraturan, kepastian usaha, hilirisasi, dan digitalisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, perusahaan dapat lebih mudah mengembangkan usaha, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan aturan yang jelas dan iklim usaha yang stabil agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas.
- Pandangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengenai ketahanan menghadapi krisis, daya saing, kepedulian, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah menegaskan bahwa dunia usaha perlu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, sedangkan pemerintah serta pelaku usaha yang lebih besar perlu memperluas dukungan kepada usaha kecil. Dengan begitu, kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja diharapkan tetap terjaga meskipun nilai tukar, harga energi, dan kondisi pasar keuangan mengalami tekanan.
- Penjajakan perusahaan Toho Gas dari Jepang untuk membangun pabrik biometana di Blora menunjukkan adanya peluang mengolah limbah pertanian dan kotoran ternak menjadi energi yang memiliki nilai ekonomi. Apabila rencana ini berlanjut hingga tahap pelaksanaan, bahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mendukung pengembangan energi alternatif. Meski demikian, karena proyek tersebut masih dalam tahap penjajakan, manfaat ekonominya belum dapat dianggap telah terwujud.
- Penjajakan investasi biometana di Blora dapat membuka peluang bagi keterlibatan petani, peternak, tenaga kerja lokal, dan pelaku usaha pendukung apabila proyek tersebut benar-benar direalisasikan. Agar peluang itu dapat berkembang, diperlukan kepastian mengenai pasokan bahan baku, kesiapan lokasi, kebutuhan infrastruktur, serta kelayakan ekonomi proyek. Langkah tersebut penting supaya kerja sama dengan investor asing tidak berhenti pada tahap pembicaraan, tetapi berpeluang menghasilkan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
- Jika pengolahan limbah menjadi biometana dapat dikembangkan secara berkelanjutan, daerah berpeluang memperoleh sumber energi tambahan sekaligus meningkatkan nilai guna hasil samping pertanian dan peternakan. Hal ini relevan ketika kenaikan harga energi dunia dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Namun, kontribusi terhadap pengurangan biaya energi maupun peningkatan pendapatan daerah akan bergantung pada keberhasilan pembangunan, kapasitas produksi, dan keberlanjutan operasional proyek tersebut.
- Rencana pengembangan biometana di Blora akan memberikan manfaat yang lebih luas apabila masyarakat sekitar tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga memperoleh kesempatan kerja dan peluang usaha pendukung. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara investor, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Dengan

pendekatan tersebut, investasi berpotensi mendorong kegiatan ekonomi baru sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lebih produktif.

- Tingginya utang Amerika Serikat, risiko fiskal negara maju, serta kenaikan harga energi dapat memengaruhi nilai tukar, biaya pembiayaan, dan kondisi usaha di Indonesia. Tekanan tersebut pada akhirnya dapat dirasakan oleh daerah melalui kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kebutuhan energi. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menjaga kestabilan ekonomi dan anggaran, sedangkan pemerintah daerah perlu memperkuat kegiatan usaha lokal serta memanfaatkan potensi yang tersedia agar perekonomian tetap mampu bertahan menghadapi perubahan global.
- Indonesia perlu menjaga kepercayaan investor serta mengendalikan risiko fiskal di tengah tekanan nilai tukar dan harga minyak, sementara dunia usaha perlu meningkatkan efisiensi dan daya saing. Di Jawa Tengah, peninjauan investasi biometana di Blora menunjukkan salah satu peluang untuk mengembangkan sumber energi alternatif dan meningkatkan nilai ekonomi limbah pertanian maupun peternakan. Apabila berbagai upaya tersebut dijalankan secara konsisten, perekonomian di tingkat nasional dan daerah akan memiliki peluang lebih baik untuk menjaga kestabilan serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Berita Minggu, 18 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional, nasional, dan daerah pada Minggu, 18 Oktober 2026, menunjukkan adanya berbagai tantangan sekaligus peluang yang saling berkaitan. Pada tingkat internasional, perubahan posisi negara-negara dengan perekonomian terbesar dunia mencerminkan perbedaan kemampuan pertumbuhan ekonomi antarnegara. Sementara itu, Indonesia menghadapi tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya harga pangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia berupaya menjaga kestabilan perekonomian melalui kebijakan moneter dan penguatan kerja sama internasional. Adapun di tingkat daerah, Jawa Tengah terus memperkuat daya tarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai perkembangan ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi perlu didukung oleh kebijakan yang tepat, kerja sama yang kuat, serta kemampuan memanfaatkan peluang pertumbuhan secara berkelanjutan.

Perubahan peta kekuatan ekonomi dunia menjadi salah satu perkembangan penting yang diperkirakan terjadi pada 2027. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Jepang turun dari peringkat keempat menjadi keenam dalam daftar negara dengan produk domestik bruto (PDB) nominal terbesar di dunia karena posisinya diperkirakan akan disalip India dan Inggris. PDB nominal Jepang diperkirakan mencapai US\$ 4,4676 triliun pada 2027, sedangkan India diproyeksikan mencapai US\$ 4,5211 triliun dan Inggris sebesar US\$ 4,4889 triliun. Perbedaan tersebut mencerminkan perkembangan ekonomi yang tidak sama di antara ketiga negara. Jepang diperkirakan hanya tumbuh 0,7% pada 2026 dan 2027, sementara India diproyeksikan tumbuh 7% pada kedua tahun tersebut berdasarkan tahun fiskalnya. Pertumbuhan India didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan aktivitas sektor jasa yang berkembang, sedangkan Inggris diperkirakan tumbuh 1,3% pada 2026 dan 1,2% pada 2027. Pelemahan yen terhadap dolar AS turut memengaruhi posisi Jepang dalam perhitungan PDB nominal. Dengan demikian, proyeksi IMF tersebut memperlihatkan semakin besarnya peran India dalam perekonomian global, sekaligus menunjukkan tantangan yang dihadapi Jepang dalam mempertahankan posisinya di tengah persaingan ekonomi dunia.

Perubahan kekuatan ekonomi internasional tersebut juga menjadi latar penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar global. Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah

kenaikan harga minyak mentah dunia bersamaan dengan pelemahan rupiah yang meningkatkan biaya impor energi. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup naik 3,51% menjadi US\$ 101,41 per barel, dengan kenaikan mingguan mencapai 10,41%. Pada periode yang sama, rupiah melemah menjadi Rp 18.027 per dolar AS. Kondisi ini membuat Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli minyak yang diperdagangkan menggunakan dolar AS, sekaligus meningkatkan kebutuhan valuta asing untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Tekanan tersebut semakin besar karena kebutuhan dolar juga digunakan untuk pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo dan pembagian dividen perusahaan. Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, termasuk situasi di sekitar Selat Hormuz dan serangan terhadap fasilitas minyak Rusia, berpotensi mengganggu pasokan minyak global. Apabila harga minyak tetap tinggi dan rupiah terus melemah, beban impor energi serta tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat meningkat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan energi dan pengelolaan anggaran yang hati-hati menjadi penting untuk mengurangi dampak gejolak internasional terhadap perekonomian nasional.

Tekanan terhadap rupiah juga menjadi salah satu alasan munculnya perkiraan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada Oktober 2026. Ekonom Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, memperkirakan BI-Rate berpotensi naik sebesar 25 basis poin menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, bahkan berpeluang mencapai 6,25% pada akhir tahun. Perkiraan tersebut didasarkan pada meningkatnya tekanan eksternal, tingginya imbal hasil aset global, risiko keluarnya modal asing, serta kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia yang masih besar. Kekhawatiran terhadap kemungkinan reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) juga dapat meningkatkan tekanan pasar. Jika reklasifikasi tersebut benar-benar terjadi, potensi penjualan saham oleh investor asing diperkirakan mencapai US\$ 2,9 miliar hingga US\$ 5,8 miliar. Meskipun demikian, angka tersebut masih berupa estimasi bersyarat dan bukan kepastian bahwa arus keluar modal akan terjadi dalam jumlah tersebut. Kenaikan suku bunga dipandang dapat membantu menjaga daya tarik aset keuangan domestik dan mendukung stabilitas rupiah, tetapi penerapannya perlu dilakukan secara terukur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45% pada semester I 2026. Dengan demikian, kebijakan moneter perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, kepercayaan investor, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain kebijakan suku bunga, penguatan kerja sama internasional melalui penggunaan mata uang lokal menjadi salah satu langkah yang didorong Bank Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global. Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand, pada 12–18 Oktober 2026, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Salah satu upayanya adalah memperluas penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi, sehingga transaksi tidak terlalu bergantung pada mata uang negara ketiga dan lebih terlindungi dari gejolak nilai tukar global. Bank Indonesia juga mendukung pengembangan sistem pembayaran digital, termasuk pembayaran QR lintas negara, agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Di dalam negeri, penggunaan QRIS oleh generasi muda dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memperkuat rekam jejak transaksi digital serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal. Pertemuan internasional tersebut juga menyoroti pentingnya stabilitas makroekonomi, pengelolaan utang, kelancaran perdagangan, modernisasi pasar tenaga kerja, dan pemanfaatan kecerdasan buatan serta digitalisasi yang didukung infrastruktur digital dan energi berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama internasional dan pengembangan sistem keuangan digital dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, terutama ketika tekanan nilai tukar dan arus modal menuntut adanya sumber stabilitas yang lebih beragam.

Meskipun kerja sama internasional dan kebijakan moneter terus diperkuat, pergerakan rupiah masih menghadapi risiko pelemahan akibat gabungan faktor global dan domestik. Pada 16 Oktober

2026, rupiah di pasar spot melemah menjadi Rp 18.027 per dolar AS, sedangkan kurs referensi Jisdor mencapai Rp 18.052 per dolar AS. Pelemahan tersebut mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap mata uang domestik, terutama akibat tingginya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, kebijakan moneter ketat Federal Reserve, risiko arus modal keluar, serta kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan disiplin fiskal Indonesia. Sentimen terkait kemungkinan reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI turut menambah ketidakpastian dan dapat memengaruhi kepercayaan investor. Ekonom Indef, M. Rizal Taufikurrahman, memperkirakan rupiah dapat bergerak pada kisaran Rp 17.950–Rp 18.150 per dolar AS pada Senin, 19 Oktober 2026, bahkan berisiko melemah hingga Rp 18.200 apabila tekanan jual meningkat. Namun, perkiraan tersebut merupakan proyeksi dan bukan kepastian pergerakan kurs. Bank Indonesia dinilai perlu melakukan intervensi untuk meredam gejolak, tetapi langkah tersebut tidak cukup apabila tidak disertai konsistensi kebijakan fiskal, penguatan pasokan devisa, dan pemulihan kepercayaan investor. Jika pelemahan rupiah berlangsung lama, biaya impor dan pembayaran utang dalam valuta asing dapat meningkat sehingga menambah beban dunia usaha maupun pemerintah. Dengan demikian, stabilisasi nilai tukar membutuhkan koordinasi kebijakan yang menyeluruh agar tidak hanya meredam tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Tantangan ekonomi nasional berikutnya berasal dari kenaikan harga pangan yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan perkembangan inflasi hingga 2027. Pada September 2026, inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,03% secara tahunan, lebih tinggi daripada inflasi umum sebesar 3,28%. Kenaikan tersebut terjadi pada kelompok kebutuhan pokok seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam yang harganya mudah berubah mengikuti kondisi cuaca, musim panen, dan biaya input. Para peritel memperkirakan harga masih dapat meningkat hingga Februari 2027, sementara fenomena El Niño diperkirakan berlangsung hingga akhir April 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menyebut El Niño berada pada tingkat sangat kuat dan memperkirakan 66,09% wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah pada dasarian II Oktober. Kondisi ini berpotensi mengganggu produksi serta pasokan pangan, meskipun kesamaan waktu antara El Niño dan perkiraan kenaikan harga belum membuktikan bahwa cuaca merupakan penyebab langsung seluruh kenaikan harga yang diperkirakan peritel. Di sisi lain, inflasi inti justru turun dari 2,92% pada Agustus menjadi 2,84% pada September, menunjukkan bahwa tekanan harga masih terkonsentrasi pada pangan dan belum meluas ke seluruh perekonomian. Inflasi umum juga masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 1,5%–3,5%. Namun, jika masyarakat dan pelaku usaha semakin memperkirakan harga akan terus naik, tekanan yang semula bersifat sementara dapat menjadi lebih menetap. Oleh sebab itu, perkembangan harga pangan, ekspektasi harga peritel, dan kondisi cuaca perlu terus dipantau agar kenaikan harga tidak semakin membebani rumah tangga, khususnya masyarakat berpendapatan rendah yang mengalokasikan porsi pengeluaran lebih besar untuk kebutuhan pokok.

Berbagai tekanan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan keberlanjutan kegiatan usaha. Kenaikan harga minyak serta pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor energi dan memperbesar risiko defisit APBN, sedangkan kenaikan harga pangan dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya operasional pelaku usaha. Dalam pemberitaan, analis memperkirakan defisit APBN berpotensi mendekati 3%, lebih tinggi daripada asumsi 2,85% yang disebutkan dalam artikel, apabila tekanan harga minyak dan nilai tukar terus berlanjut. Pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui program swasembada solar, tetapi upaya tersebut masih menghadapi tantangan dari tingginya harga minyak mentah dan kebutuhan energi domestik. Sementara itu, Bank Indonesia harus mempertimbangkan risiko pelemahan rupiah dan kenaikan inflasi ketika menentukan kebijakan suku bunga, tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Kebijakan yang terlalu longgar dapat meningkatkan kerentanan terhadap tekanan eksternal, sedangkan pengetatan yang berlebihan berpotensi menahan kegiatan ekonomi. Karena itu, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan energi, pengelolaan fiskal yang konsisten, serta dukungan pembiayaan bagi dunia usaha perlu

berjalan secara terkoordinasi. Langkah-langkah tersebut juga penting bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, agar kegiatan investasi dan industri tetap berkembang di tengah perubahan kondisi ekonomi nasional.

Dalam konteks pembangunan daerah, Jawa Tengah berupaya memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan investasi yang menjanjikan di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan detikJateng, realisasi investasi Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp 88,50 triliun atau tumbuh 28% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 326 ribu orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, sehingga daerah ini dapat menarik minat investor dan memperkuat perkembangan sektor industri. Upaya tersebut akan dibahas dalam Forum Investasi Jawa Tengah 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober 2026 di Nusantara Ballroom, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Forum tersebut mengangkat tema Jawa Tengah sebagai gerbang investasi Indonesia melalui sinergi pemerintah, investor, dan kawasan industri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah daerah, investor, dan pengelola kawasan industri untuk memperkuat kolaborasi serta mempercepat masuknya investasi. Dengan demikian, capaian investasi Jawa Tengah tidak hanya perlu dipertahankan dari sisi nilai penanaman modal, tetapi juga diarahkan agar memberikan manfaat nyata melalui penyerapan tenaga kerja, penguatan industri, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Keberlanjutan investasi Jawa Tengah pada akhirnya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pengelola kawasan industri dalam membangun kerja sama yang efektif. Forum Investasi Jawa Tengah 2026 di KEK Industropolis Batang diharapkan dapat mempertemukan berbagai pihak untuk membahas potensi daerah, memperkuat kepercayaan investor, serta mendorong percepatan realisasi investasi. Agenda tersebut juga disertai penyelenggaraan detikJateng-Jogja Awards 2026 yang memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah, tokoh, dan komunitas di Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya menampilkan keberhasilan kepemimpinan dan kolaborasi daerah yang diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Sejumlah tokoh yang direncanakan hadir sebagai pembicara antara lain Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan sebagai narasumber tamu. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya tarik kawasan industri. Namun, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang masuk, melainkan juga oleh kemampuan mengubah investasi menjadi kegiatan produksi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi pemerintah, investor, dan kawasan industri perlu diarahkan pada hasil pembangunan yang berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Secara keseluruhan, rangkaian berita ekonomi internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi dibangun melalui kemampuan menghadapi risiko sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia. Pada tingkat internasional, proyeksi naiknya India dan Inggris melewati Jepang menggambarkan perubahan persaingan ekonomi global yang dipengaruhi oleh perbedaan pertumbuhan dan nilai tukar. Di Indonesia, kenaikan harga minyak dunia, pelemahan rupiah, risiko arus modal keluar, dan meningkatnya harga pangan menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi, penguatan ketahanan energi, serta pengendalian inflasi. Pengembangan transaksi mata uang lokal dan pembayaran digital juga dapat membantu memperkuat kerja sama ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada mata uang negara ketiga. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki peluang untuk memperluas pertumbuhan melalui peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, dan penciptaan lapangan kerja. Berbagai upaya

tersebut perlu saling mendukung agar tekanan dari perekonomian global tidak menghambat pembangunan nasional maupun daerah. Dengan menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan investor, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan investasi menghasilkan manfaat nyata, Indonesia dan Jawa Tengah memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Ringkasan

- Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Jepang akan turun dari peringkat keempat menjadi keenam pada 2027 karena pertumbuhan ekonominya yang lambat dan pelemahan yen terhadap dolar AS. PDB nominal Jepang diproyeksikan mencapai US\$ 4,4676 triliun, sedangkan India diperkirakan mencapai US\$ 4,5211 triliun dan Inggris US\$ 4,4889 triliun. India diperkirakan tumbuh 7% pada 2026 dan 2027, didukung permintaan domestik serta sektor jasa yang kuat, sementara pertumbuhan Jepang diproyeksikan hanya 0,7% pada kedua tahun tersebut. Perubahan ini menunjukkan semakin besarnya peran India dalam perekonomian dunia serta tantangan Jepang dalam mempertahankan daya saing ekonominya.
- Harga minyak mentah WTI naik 3,51% menjadi US\$ 101,41 per barel pada 16 Oktober 2026, sedangkan rupiah melemah menjadi Rp 18.027 per dolar AS. Kombinasi tersebut meningkatkan biaya impor energi dan kebutuhan dolar AS untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pembayaran utang, serta pembagian dividen perusahaan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur juga berpotensi mengganggu pasokan minyak global. Jika tekanan tersebut berlanjut, defisit APBN berisiko mendekati 3%, lebih tinggi daripada asumsi 2,85% yang disebutkan dalam berita. Pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui program swasembada solar, tetapi tingginya harga minyak masih menjadi tantangan.
- Ekonom Bank Danamon Indonesia memperkirakan BI-Rate naik 25 basis poin menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, dengan kemungkinan mencapai 6,25% pada akhir tahun. Perkiraan ini didorong oleh tekanan eksternal, tingginya imbal hasil aset global, risiko keluarnya modal asing, dan kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia. Potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI juga menimbulkan kekhawatiran karena dapat memicu penjualan saham oleh investor asing, yang diperkirakan mencapai US\$ 2,9 miliar hingga US\$ 5,8 miliar jika reklasifikasi benar-benar terjadi. Meskipun kenaikan suku bunga dapat membantu menjaga daya tarik investasi dan stabilitas rupiah, kebijakannya perlu dilakukan secara terukur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45% pada semester I 2026.
- Dalam rangkaian pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bangkok pada 12–18 Oktober 2026, BI menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Perluasan transaksi menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang negara ketiga serta menekan dampak gejolak nilai tukar global. BI juga mendukung pembayaran QR lintas negara dan peta jalan G20 untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas transaksi. Di dalam negeri, penggunaan QRIS oleh generasi muda dan UMKM diharapkan memperkuat rekam jejak transaksi digital dan mempermudah akses pembiayaan formal. Upaya ini sejalan dengan agenda internasional untuk menjaga stabilitas keuangan, memperbaiki iklim usaha, mengembangkan infrastruktur digital, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Pada 16 Oktober 2026, rupiah di pasar spot melemah 0,50% menjadi Rp 18.027 per dolar AS, sedangkan kurs Jisdor mencapai Rp 18.052 per dolar AS. Tekanan berasal dari tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS, kebijakan moneter ketat Federal Reserve, risiko arus modal keluar, sentimen MSCI, dan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi domestik. Ekonom Indef memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp 17.950–Rp 18.150 per dolar AS pada 19 Oktober 2026, dengan risiko melemah hingga Rp 18.200 jika tekanan jual meningkat. Bank

Indonesia dinilai perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi langkah tersebut perlu disertai kebijakan fiskal yang konsisten, penguatan pasokan devisa, dan pemulihan kepercayaan investor agar hasilnya lebih berkelanjutan.

- Inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03% secara tahunan pada September 2026, lebih tinggi daripada inflasi umum sebesar 3,28%. Kenaikan harga terjadi pada komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam yang dipengaruhi kondisi cuaca serta biaya produksi. Peritel memperkirakan harga masih meningkat hingga Februari 2027, sementara fenomena El Niño diperkirakan berlangsung hingga akhir April 2027. BMKG menyebut El Niño berada pada tingkat sangat kuat dan memperkirakan 66,09% wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah pada dasarian II Oktober. Meskipun inflasi inti turun menjadi 2,84% dan inflasi umum masih berada dalam sasaran BI sebesar 1,5%–3,5%, kenaikan harga pangan tetap perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong ekspektasi kenaikan harga yang lebih luas. Oleh karena itu, perkembangan inflasi, harga eceran, dan kondisi cuaca perlu terus dipantau untuk mencegah tekanan harga berlangsung lebih lama.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif untuk menarik penanaman modal dan memperkuat pertumbuhan industri. Sepanjang 2025, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp 88,50 triliun, meningkat 28% dibandingkan tahun sebelumnya, serta menyerap sekitar 326 ribu tenaga kerja. Untuk memperkuat capaian tersebut, detikJateng akan menyelenggarakan Forum Investasi Jawa Tengah pada 23 Oktober 2026 di Nusantara Ballroom, KEK Industropolis Batang. Forum ini mengangkat tema Jawa Tengah sebagai gerbang investasi Indonesia melalui sinergi pemerintah, investor, dan kawasan industri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi, mempercepat masuknya investasi, meningkatkan daya saing industri, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
- Forum Investasi Jawa Tengah 2026 juga menjadi wadah untuk membahas potensi daerah dan memperkuat kerja sama dalam mendorong investasi. Sejumlah tokoh yang direncanakan hadir sebagai pembicara antara lain Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan sebagai narasumber tamu. Acara ini akan dipuncaki dengan detikJateng-Jogja Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pimpinan daerah, tokoh, dan komunitas di Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kegiatan tersebut, keberhasilan kepemimpinan dan kolaborasi daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kerja sama yang berkelanjutan, Jawa Tengah berpeluang memperkuat perannya sebagai pusat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Implikasi

- IMF memperkirakan India dan Inggris akan melampaui Jepang dalam peringkat ekonomi terbesar dunia pada 2027. India didukung oleh permintaan domestik dan sektor jasa yang kuat, sedangkan Jepang menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya meningkatkan produktivitas, investasi, dan daya saing industri agar suatu negara mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya.
- Harga minyak yang meningkat dan pelemahan rupiah membuat biaya impor energi Indonesia semakin mahal. Jika kondisi ini berlanjut, defisit APBN berisiko mendekati 3%, sesuai perkiraan dalam berita. Pemerintah perlu mengelola anggaran secara hati-hati dan melanjutkan upaya mengurangi ketergantungan pada impor energi melalui program swasembada solar.
- Bank Indonesia diperkirakan menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% pada Oktober 2026 untuk menghadapi tekanan nilai tukar dan risiko keluarnya modal asing. Namun, suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha. Karena

itu, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan stabilitas keuangan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

- Potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI dapat mendorong penjualan saham asing apabila perubahan tersebut benar-benar terjadi. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah dan pasar saham. Oleh sebab itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan investor agar pasar keuangan tetap stabil.
- Bank Indonesia mendorong perluasan transaksi mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi internasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak gejolak nilai tukar dan membuat transaksi antarnegara lebih efisien. Namun, pelaksanaannya memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, bank sentral, dan lembaga keuangan negara mitra.
- Pengembangan QRIS dan pembayaran QR lintas negara dapat mempermudah transaksi serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Bagi UMKM, transaksi digital juga dapat membangun rekam jejak keuangan yang membantu akses terhadap pembiayaan formal. Agar manfaatnya semakin luas, sistem pembayaran digital perlu didukung regulasi yang jelas dan perlindungan konsumen.
- Rupiah yang melemah membuat barang impor, bahan baku, dan energi dari luar negeri menjadi lebih mahal. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan dan mendorong kenaikan harga jual kepada konsumen. Oleh karena itu, intervensi Bank Indonesia perlu didukung penguatan pasokan devisa dan kebijakan fiskal yang konsisten agar tekanan terhadap rupiah dapat dikendalikan.
- Inflasi pangan mencapai 5,03% pada September 2026, lebih tinggi daripada inflasi umum sebesar 3,28%. Jika harga kebutuhan pokok terus meningkat, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampaknya lebih besar bagi kelompok berpendapatan rendah karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk pangan dan energi. Karena itu, kestabilan pasokan dan keterjangkauan harga pangan perlu dijaga.
- BMKG menyebut El Niño berada pada tingkat sangat kuat dan memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah pada periode tertentu di Oktober. Kondisi ini berpotensi mengganggu produksi dan pasokan pangan hingga 2027. Pemerintah perlu memantau kondisi cuaca, hasil panen, dan perkembangan harga agar gangguan pasokan tidak memperbesar tekanan inflasi. Meski demikian, perkiraan kenaikan harga belum berarti Indonesia sedang mengalami krisis biaya hidup.
- Pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, dan tekanan inflasi membuat pemerintah serta Bank Indonesia perlu menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal. Pengendalian inflasi perlu berjalan bersama upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pembiayaan sektor produktif. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dapat dipertahankan tanpa menghambat kegiatan usaha dan investasi.
- Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp 88,50 triliun, tumbuh 28% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyerap sekitar 326 ribu tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan bahwa investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan industri. Pemerintah daerah perlu menjaga iklim usaha yang kompetitif agar investasi terus meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Forum yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober 2026 di KEK Industropolis Batang akan membahas potensi Jawa Tengah sebagai gerbang investasi Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mempertemukan pemerintah, investor, dan pengelola kawasan industri untuk mempercepat masuknya investasi. Jika ditindaklanjuti dengan baik, kerja sama tersebut dapat meningkatkan daya saing industri dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
- KEK Industropolis Batang menjadi lokasi penyelenggaraan forum yang bertujuan memperkuat daya tarik investasi Jawa Tengah. Pengembangan kawasan industri dapat mendorong kegiatan

produksi dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Namun, keberhasilannya juga perlu dilihat dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari besarnya modal yang masuk.

- Forum Investasi Jawa Tengah juga akan dipuncaki dengan detikJateng-Jogja Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pimpinan daerah, tokoh, dan komunitas di Jawa Tengah serta DIY. Kegiatan ini diharapkan memperkuat semangat kerja sama dalam pembangunan daerah. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan berbagai pihak, pengembangan investasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tekanan global terhadap harga minyak, nilai tukar, dan arus modal dapat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas keuangan, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan energi. Sementara itu, Jawa Tengah perlu terus meningkatkan daya tarik investasi dan mengembangkan kawasan industri. Jika upaya tersebut berjalan secara beriringan, pertumbuhan ekonomi dapat lebih terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan kegiatan usaha serta penciptaan lapangan kerja.

Berita Senin, 19 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Senin, 19 Oktober 2026, menunjukkan kondisi perekonomian global yang mulai memperlihatkan perbaikan, tetapi masih dibayangi berbagai risiko perdagangan, ketidakpastian politik, dan perubahan kebijakan moneter. Salah satu perkembangan utama berasal dari China yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% secara tahunan pada kuartal III-2026, lebih tinggi daripada perkiraan pasar sebesar 4,4% dan meningkat dibandingkan pertumbuhan 4,3% pada kuartal sebelumnya. Secara kumulatif, ekonomi China tumbuh 4,6% selama Januari hingga September 2026 sehingga masih berada dalam kisaran target pertumbuhan tahunan pemerintah sebesar 4,5%–5%. Peningkatan ini didukung oleh kuatnya ekspor, membaiknya produksi industri, serta meningkatnya penjualan ritel pada September. Meskipun demikian, pemulihan tersebut belum sepenuhnya merata karena konsumsi masyarakat dan investasi swasta masih lemah, sedangkan sektor properti terus mengalami tekanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi China masih sangat bergantung pada aktivitas ekspor dan industri, sehingga pemerintahnya perlu memperkuat permintaan domestik agar perekonomian dapat tumbuh secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

Kuatnya ekspor China juga memberikan pengaruh terhadap hubungan perdagangan internasional karena surplus perdagangan negara tersebut terus meningkat dan berpotensi melampaui rekor US\$1,2 triliun yang dicapai pada 2025. Besarnya surplus tersebut menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara mitra dagang yang menilai ketidakseimbangan perdagangan perlu segera diatasi. Uni Eropa, misalnya, tengah mempertimbangkan langkah untuk membatasi akses produk China ke pasarnya, sementara kesepakatan mengenai pembatasan pengiriman kendaraan hibrida buatan China berpotensi menekan perdagangan otomotif. Di sisi lain, pemerintah China telah memberikan dukungan melalui pembiayaan berbiaya lebih rendah untuk infrastruktur dan teknologi, tambahan kuota utang pemerintah sebesar 550 miliar yuan, serta instrumen pembiayaan berbasis kebijakan senilai 800 miliar yuan. Namun, berbagai upaya tersebut belum mampu memulihkan investasi secara menyeluruh karena investasi aset tetap turun 7,2% dan investasi properti merosot 20,6% selama Januari–September 2026. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan China yang lebih baik dapat mengurangi kebutuhan stimulus tambahan dalam waktu dekat, ketergantungan terhadap ekspor, lemahnya sektor properti, dan meningkatnya ketegangan dagang tetap menjadi tantangan penting bagi perekonomian global.

Selain perkembangan ekonomi China, pasar keuangan internasional juga dipengaruhi oleh ketidakpastian politik di Eropa, prospek suku bunga Amerika Serikat, dan perubahan harga energi. Pada awal perdagangan Asia, dolar AS menguat, sedangkan euro melemah di tengah demonstrasi dan kerusuhan di Prancis yang berkaitan dengan tingginya biaya hidup. Ketidakpastian politik tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan investor, terutama melalui pasar obligasi pemerintah Prancis. Sementara itu, investor Amerika Serikat mencermati laporan keuangan perusahaan besar, khususnya perusahaan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk menilai apakah besarnya investasi pada teknologi tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. Harga minyak mentah Brent sempat turun pada awal perdagangan setelah muncul perkembangan mengenai pelonggaran sanksi dan tarif terhadap Rusia, tetapi secara umum harga energi masih berada pada tingkat tinggi dan berpotensi menambah tekanan inflasi. Pelaku pasar juga menantikan keputusan suku bunga Federal Reserve pada 28 Oktober dan Bank Sentral Eropa pada 29 Oktober 2026. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi global tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan produksi dan perdagangan, tetapi juga oleh stabilitas politik, harga energi, serta arah kebijakan moneter yang dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perkembangan ekonomi global tersebut berkaitan erat dengan kondisi perekonomian Indonesia, terutama melalui pergerakan nilai tukar rupiah dan perubahan kepercayaan investor. Pada Senin, 19 Oktober 2026, rupiah ditutup melemah 0,17% ke level Rp18.043 per dolar AS setelah sempat menyentuh Rp18.051 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah terjadi bersamaan dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), aksi jual surat utang domestik, dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang sempat mencapai 7,45%. Salah satu faktor utama yang memengaruhi sentimen pasar adalah peringatan MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market, menyusul kekhawatiran tentang transparansi, struktur perdagangan, dan kepemilikan saham di bursa. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa tekanan di pasar saham dapat meluas ke pasar valuta asing dan obligasi, sehingga memengaruhi arus modal asing serta biaya pembiayaan pemerintah dan dunia usaha. Untuk mengatasi keadaan ini, Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen intervensi, termasuk swap, DNDF, dan NDF, serta melanjutkan insentif biaya lindung nilai valuta asing. Dengan demikian, stabilitas rupiah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mengurangi risiko ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Di tengah tekanan pasar keuangan tersebut, Indonesia masih mencatatkan perkembangan positif dari sisi investasi yang menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal tetap berjalan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi kuartal III-2026 sebesar Rp528,7 triliun, meningkat 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, realisasi investasi Januari–September mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun, dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 2.194.496 orang. Penanaman modal asing menyumbang sekitar 50,5% dari total investasi kumulatif, sedangkan penanaman modal dalam negeri berkontribusi sebesar 49,5%. Investasi di luar Pulau Jawa mencapai 50,6%, sedikit lebih besar daripada kontribusi Pulau Jawa sebesar 49,4%, yang menunjukkan bahwa aktivitas penanaman modal mulai tersebar ke berbagai wilayah. Sektor hilirisasi juga menjadi salah satu penopang penting dengan nilai investasi sekitar Rp480 triliun atau 31,2% dari total investasi yang masuk. Sementara itu, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi mencatat nilai investasi gabungan terbesar berdasarkan sektor, yaitu Rp269,2 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan adanya peluang untuk memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperluas kesempatan kerja, meskipun keberhasilan investasi tetap perlu diukur dari dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun investasi menunjukkan peningkatan, kondisi dunia usaha Indonesia masih menghadapi persoalan karena perbaikan aktivitas perusahaan belum sepenuhnya diikuti penciptaan

lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha turun dari 12,97% pada kuartal II menjadi 11,46% pada kuartal III-2026. Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan sejumlah sektor lainnya masih mencatat aktivitas positif, sedangkan indikator manufaktur meningkat dan kondisi keuangan perusahaan membaik dari sisi likuiditas serta rentabilitas. Namun, SBT penggunaan tenaga kerja turun dari 0,14% menjadi 0,07%, sementara perkembangan upah juga menunjukkan perlambatan dan belum merata antarkelompok pekerja. Kondisi tersebut menandakan bahwa sebagian perusahaan masih mengoptimalkan kapasitas yang sudah tersedia tanpa menambah banyak tenaga kerja, sehingga manfaat pertumbuhan usaha belum sepenuhnya dirasakan oleh pencari kerja dan rumah tangga. Akibatnya, daya beli masyarakat berpotensi tetap terbatas meskipun produksi dan keuntungan perusahaan membaik. Bank Indonesia memperkirakan kegiatan usaha pada kuartal IV masih tumbuh positif, tetapi lebih lambat, dengan SBT sebesar 10,77%. Peningkatan aktivitas menjelang Natal dan libur akhir tahun diharapkan membantu sektor perdagangan, transportasi, serta jasa, sedangkan sektor pertanian diperkirakan masih menghadapi tekanan akibat musim tanam dan kondisi cuaca. Oleh sebab itu, tantangan perekonomian Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan usaha, melainkan juga memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan yang memadai.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah, terutama meningkatnya beban bunga utang dan kebutuhan menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dengan kemampuan penerimaan negara. Data dalam berita menyebutkan bahwa utang luar negeri Indonesia mencapai US\$459,3 miliar pada akhir Agustus 2026, sedangkan utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun pada akhir kuartal II-2026. Hingga September 2026, pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp444,5 triliun, sementara penerimaan pajak sebesar Rp1.607 triliun, sehingga sekitar 28% penerimaan pajak digunakan untuk membayar bunga utang. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal karena sebagian penerimaan negara harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan, bukan untuk program pembangunan baru. Para ekonom karena itu mendorong reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi, dan penutupan celah penghindaran pajak, bukan semata-mata menaikkan tarif bagi wajib pajak yang sudah patuh. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa utang digunakan untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan industri, yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, Menteri Keuangan menyatakan bahwa belanja APBN pada kuartal IV-2026 diproyeksikan melampaui Rp1.300 triliun, lebih tinggi daripada sekitar Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut tetap diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, dan perlindungan sosial, meskipun pelaksanaannya harus efisien. Dengan demikian, kebijakan fiskal perlu menjaga agar belanja pemerintah tetap menopang pertumbuhan tanpa memperbesar tekanan utang secara tidak terkendali.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi secara lebih merata, pemerintah Indonesia juga menyiapkan strategi pengembangan klaster ekonomi regional yang menghubungkan potensi berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam jangka menengah, sekaligus mengurangi ketergantungan pertumbuhan pada wilayah tertentu. Pemerintah berencana mengoordinasikan langkah tersebut bersama Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi ekonomi setiap wilayah. Selain itu, perluasan akses keuangan daerah, penguatan digitalisasi, dan pengendalian inflasi akan didorong melalui kerja sama antarlembaga. Dalam konteks ini, Jawa Tengah memiliki peluang untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menghubungkan kegiatan produksi dengan perdagangan dan pariwisata. Namun, pemerataan pembangunan juga membutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai 198 pemerintah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran, pengelolaan kas, dan

realisasi pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan ekonomi regional tidak cukup hanya dengan meningkatkan investasi, tetapi juga memerlukan koordinasi kebijakan dan pengelolaan anggaran yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan serta pelayanan publik di setiap daerah.

Di Jawa Tengah, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan perlindungan wilayah pesisir dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Salah satu berita dalam dokumen membahas rencana perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa yang mencakup Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Pelaksanaannya direncanakan menyesuaikan karakteristik setiap daerah melalui kombinasi pembangunan tanggul pantai atau tanggul laut dan pendekatan berbasis alam, termasuk penanaman mangrove. Kegiatan perlindungan pesisir di Timbulsloko menjadi salah satu contoh untuk mempelajari kondisi alam setempat dan mendukung penyusunan rencana pelaksanaan program. Selain melindungi kawasan pesisir, upaya tersebut perlu memperhatikan keberlangsungan kegiatan ekonomi nelayan dan petambak agar perlindungan lingkungan tidak menghambat mata pencaharian masyarakat. Pemanfaatan hexbricks yang diproduksi warga setempat juga diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dan menambah penghasilan masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan mengurangi risiko kerusakan wilayah. Bagi Jawa Tengah, perlindungan pesisir menjadi penting karena keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan lingkungan yang aman, infrastruktur yang memadai, serta kesempatan bagi penduduk setempat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan.

Selain melalui perlindungan pesisir, pengembangan pariwisata berbasis kegiatan olahraga juga menjadi salah satu peluang untuk menggerakkan perekonomian Jawa Tengah, sebagaimana terlihat dalam penyelenggaraan Susurun Boyolali 2026. Acara lari yang diselenggarakan di Alun-Alun Kidul Boyolali pada Minggu, 18 Oktober 2026, tersebut diikuti 2.500 peserta dari berbagai daerah, meningkat sekitar 56% dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti 1.600 pelari. Kegiatan dengan kategori 5K dan 10K ini tidak hanya mendorong aktivitas olahraga, tetapi juga memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan identitas lokal Boyolali sebagai Kota Susu. Keterlibatan masyarakat di sepanjang rute serta penyediaan susu lokal bagi peserta memperlihatkan bagaimana karakteristik daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik kegiatan wisata. Pemerintah daerah berharap acara tersebut dapat berkembang menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang lebih besar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh UMKM, penginapan, restoran, dan pelaku usaha lainnya. Potensi tersebut sejalan dengan pengalaman pengembangan ajang olahraga di Jawa Tengah, seperti Borobudur Marathon, yang telah berkembang menjadi kegiatan berskala internasional. Secara keseluruhan, rangkaian berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan produksi, investasi, dan belanja pemerintah. Stabilitas nilai tukar, kepercayaan investor, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan utang, pemerataan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan potensi lokal perlu berjalan secara seimbang. Dengan menghubungkan kebijakan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah, Jawa Tengah memiliki peluang untuk memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan pengembangan tersebut didukung pengelolaan yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi penduduk setempat.

Ringkasan

- Pertumbuhan ini meningkat dari 4,3% pada kuartal II dan melampaui perkiraan pasar sebesar 4,4%. Secara kumulatif, ekonomi China tumbuh 4,6% selama Januari–September 2026, masih berada dalam target tahunan pemerintah sebesar 4,5–5%. Namun, pemulihan tersebut masih ditopang oleh ekspor dan produksi industri, sementara konsumsi domestik, investasi swasta, dan sektor properti belum pulih secara kuat.
- China berpeluang melampaui rekor surplus perdagangan tahun sebelumnya sebesar US\$1,2 triliun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari mitra dagang, terutama Uni Eropa yang

berencana memperkuat kebijakan untuk menyeimbangkan perdagangan bilateral, termasuk pembatasan pengiriman kendaraan hibrida buatan China. Di sisi lain, investasi aset tetap China turun 7,2% selama Januari–September dan investasi properti merosot 20,6%, menunjukkan bahwa persoalan struktural ekonomi masih belum terselesaikan.

- Pemerintah memberikan dukungan bagi pembeli rumah, menyediakan pembiayaan berbiaya lebih rendah untuk infrastruktur dan teknologi, serta mengalokasikan kuota utang sebesar 550 miliar yuan untuk membantu keuangan pemerintah daerah dan memperluas investasi. Meskipun demikian, investasi infrastruktur masih mengalami kontraksi 4,2%. Dengan pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan, bank sentral China diperkirakan mempertahankan suku bunga pinjaman acuan pada 3,00% untuk tenor satu tahun dan 3,50% untuk tenor lima tahun.
- Dolar AS menguat pada awal perdagangan Asia, sedangkan euro tertekan oleh gejolak politik dan kerusakan di Prancis yang berkaitan dengan tingginya biaya hidup. Investor juga mencermati keputusan suku bunga Federal Reserve AS pada 28 Oktober dan Bank Sentral Eropa pada 29 Oktober. Di pasar komoditas, harga minyak masih berada pada tingkat tinggi meskipun sempat melemah, sementara ketidakpastian pasokan energi dan hubungan geopolitik menambah risiko terhadap inflasi serta pergerakan saham dan obligasi.
- Pada Senin, 19 Oktober 2026, rupiah ditutup pada Rp18.043 per dolar AS setelah sempat menyentuh Rp18.051. Tekanan ini terjadi bersamaan dengan pelemahan IHSG sebesar 5,05% ke posisi 4.923,26 dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun hingga 7,45%. Salah satu pemicunya adalah kekhawatiran investor setelah MSCI mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market, sehingga risiko keluarnya modal asing dan melemahnya kepercayaan pasar semakin diperhatikan.
- Sejumlah ekonom memperkirakan BI berpotensi menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan mengantisipasi arus keluar modal asing. Namun, sebagian ekonom masih memperkirakan suku bunga dipertahankan pada 5,75%, mengingat kenaikan sebelumnya masih dalam proses memengaruhi suku bunga perbankan. Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan stabilitas nilai tukar, inflasi, kondisi cadangan devisa, dan dampaknya terhadap kredit, investasi, serta konsumsi masyarakat.
- Realisasi investasi pada kuartal III-2026 mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6% secara tahunan. Sepanjang Januari–September, total investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.194.496 orang. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kepastian bagi investor melalui integrasi perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga, termasuk penerapan mekanisme fiktif positif ketika izin tidak diterbitkan dalam batas waktu pelayanan yang ditentukan.
- Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia menunjukkan SBT kegiatan usaha turun dari 12,97% pada kuartal II menjadi 11,46% pada kuartal III-2026. Industri pengolahan, konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta real estat masih menunjukkan perkembangan positif, sementara kapasitas produksi terpakai berada di angka 73,75%. Namun, indikator penggunaan tenaga kerja melemah dan perkembangan upah belum merata, sehingga peningkatan aktivitas perusahaan belum sepenuhnya diikuti perluasan kesempatan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.
- SBT investasi meningkat dari 5,46% pada kuartal II menjadi 6,23% pada kuartal III-2026, terutama didukung oleh sektor informasi dan komunikasi, konstruksi, serta pengadaan listrik dan gas. Untuk kuartal IV, investasi diperkirakan tetap kuat dengan SBT 5,64%, didukung pembangunan pabrik, gudang, fasilitas penyimpanan dingin, sarana pendidikan, dan infrastruktur. Meski demikian, penyelesaian sejumlah proyek jaringan seluler dan serat optik diperkirakan mengurangi laju investasi di sektor informasi dan komunikasi.
- Pembayaran bunga utang pemerintah hingga September 2026 mencapai Rp444,5 triliun, sementara penerimaan pajak tercatat Rp1.607 triliun. Kondisi tersebut membuat sekitar 28%

penerimaan pajak digunakan untuk membayar bunga utang, sehingga ruang anggaran untuk kebutuhan lain menjadi lebih terbatas. Ekonom mendorong reformasi pajak melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan perbaikan administrasi, serta meminta agar utang diarahkan pada belanja produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan penerimaan negara.

- Pemerintah memperkirakan belanja APBN pada tiga bulan terakhir 2026 akan melampaui Rp1.300 triliun, lebih tinggi daripada sekitar Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan sosial, termasuk bantuan pangan. Di sisi lain, ekonom memperingatkan bahwa defisit APBN dapat mendekati 5% PDB apabila kewajiban tertentu, seperti tagihan kepada Pertamina dan PLN serta restitusi pajak yang belum dibayar, ikut diperhitungkan; sementara defisit resmi hingga akhir September tercatat Rp319 triliun atau 1,24% PDB.
- Inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03% secara tahunan pada September 2026, lebih tinggi daripada kisaran sasaran BI sebesar 1,5–3,5%. Sementara itu, inflasi inti masih relatif terkendali pada 2,84%, dan inflasi umum mencapai 3,28% secara tahunan. Untuk menjaga stabilitas harga, BI akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian guna memastikan ketersediaan pasokan dan mengendalikan gejolak harga pangan.
- Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 tahun 2026 mencatat transaksi business matching pembiayaan dan perdagangan syariah sebesar Rp3,16 triliun, terdiri atas pembiayaan syariah Rp2,6 triliun dan perdagangan syariah Rp558,4 miliar. Penjualan produk makanan halal dan fesyen mencapai Rp13,85 miliar, sedangkan komitmen kerja sama pasar uang dan valuta asing syariah mencapai Rp6,05 triliun. BI menekankan pentingnya menghubungkan pembiayaan dengan kegiatan produktif, memperkuat rantai nilai halal, memperluas akses keuangan, dan mendorong transformasi digital agar manfaatnya menjangkau UMKM serta masyarakat luas.
- Rencana ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, BI, dan OJK, dengan mengacu pada potensi ekonomi masing-masing wilayah. Pemerintah juga ingin memperkuat kerja sama antardaerah dan memanfaatkan model kerja sama regional seperti IMT-GT dan BIMP-EAGA. Selain itu, perluasan akses keuangan daerah, digitalisasi, dan koordinasi pengendalian inflasi dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga lebih merata antardaerah dan kelompok masyarakat.
- BPK menemukan 198 pemerintah daerah atau 36,26% berpotensi mengalami kesulitan pembayaran karena SiLPA lebih kecil daripada total kewajiban jangka pendek. Hingga 18 Oktober 2026, utang jatuh tempo APBD tercatat Rp5,74 triliun, tetapi pembayaran yang terealisasi baru Rp3,4 triliun. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan pengelolaan kas, penetapan target pendapatan yang realistis, dan pengendalian belanja agar pembayaran kepada pihak ketiga tidak terlambat serta pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
- Jumlah tersebut setara dengan 93% dari target tahunan dalam RPJMD sebesar Rp264,55 miliar. Pemerintah Kota Magelang mendorong pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala melalui sistem OSS RBA agar perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja dapat dipantau. Pemerintah daerah juga menyatakan terbuka terhadap investor, dengan tetap memperhatikan peraturan, tata ruang, dan kualitas pelayanan publik; salah satu upaya penataan kawasan adalah mengubah lahan tidak produktif di Sidotopo, Magelang Utara, menjadi ruang terbuka publik.
- Program yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan pendekatan berbasis alam ini bertujuan melindungi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi mereka. Pantura memiliki peran strategis karena berkontribusi sekitar 28% terhadap PDB nasional dan menjadi lokasi kawasan industri, sentra pangan, kawasan ekonomi khusus, serta

koridor logistik. Pelaksanaannya dirancang mencakup Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, dengan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing wilayah.

- Selain pembangunan tanggul pantai atau laut, program ini menggunakan solusi berbasis alam, termasuk penanaman mangrove di Timbulsloko. Pemerintah menekankan bahwa upaya tersebut perlu memperhatikan keberlangsungan pekerjaan nelayan dan petambak agar perlindungan wilayah tidak mengganggu kegiatan ekonomi warga. Penggunaan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat juga diharapkan membuka peluang kerja dan menambah pendapatan warga pesisir.
- Acara lari yang diselenggarakan di Alun-Alun Kidul Boyolali pada Minggu, 18 Oktober 2026, diikuti 2.500 peserta dalam kategori 5K dan 10K, meningkat sekitar 56% dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti 1.600 pelari. Selain menjadi kegiatan olahraga, acara ini memperkenalkan alam dan budaya Boyolali, termasuk identitas daerah sebagai Kota Susu melalui penyediaan susu lokal bagi peserta. Sambutan warga dan pertunjukan seni di sepanjang rute turut memperkuat daya tarik acara tersebut.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong setiap kabupaten mengembangkan acara olahraga sesuai karakteristik wilayahnya, sebagaimana ajang Borobudur Marathon yang telah berkembang menjadi kegiatan berskala internasional. Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap jumlah peserta Susurun terus meningkat sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara dan peserta, tetapi juga oleh UMKM, penginapan, restoran, dan usaha lain yang melayani pengunjung.

Implikasi

- Pertumbuhan ekonomi China yang mencapai 4,5% pada kuartal III-2026 memberikan peluang bagi perdagangan global, tetapi ketergantungan pada ekspor tetap menjadi tantangan. Apabila permintaan domestik dan investasi swasta China belum pulih dengan kuat, pertumbuhan ekonominya akan lebih rentan terhadap perubahan permintaan dari negara lain. Bagi negara mitra dagang, termasuk Indonesia, kondisi ini dapat memengaruhi peluang ekspor sekaligus meningkatkan persaingan dengan produk China di pasar internasional.
- Surplus perdagangan China yang semakin besar berpotensi meningkatkan ketegangan dagang dengan negara mitra, terutama Uni Eropa. Jika pembatasan perdagangan terhadap produk China semakin luas, arus barang dan strategi perusahaan dalam menentukan pasar tujuan dapat berubah. Keadaan ini membuat pelaku usaha perlu mencermati perubahan kebijakan perdagangan internasional agar dapat mengantisipasi gangguan rantai pasok, perubahan harga barang, dan persaingan yang semakin ketat.
- Lemahnya sektor properti dan investasi China menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang membaik belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan yang merata. Dukungan pemerintah melalui pembiayaan infrastruktur, teknologi, dan pemerintah daerah dapat membantu mempertahankan aktivitas ekonomi, tetapi hasilnya bergantung pada kemampuan kebijakan tersebut mendorong permintaan dan investasi produktif. Bagi perekonomian global, perkembangan ini penting karena perlambatan ekonomi China dapat memengaruhi permintaan komoditas, perdagangan, dan kegiatan industri di negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengannya.
- Ketidakpastian politik, harga energi, dan arah suku bunga bank sentral negara maju dapat meningkatkan gejolak pasar keuangan global. Perubahan nilai tukar dolar AS, euro, serta imbal hasil obligasi dapat memengaruhi keputusan investor dalam menempatkan modalnya di berbagai negara. Bagi Indonesia, kondisi ini berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah dan meningkatkan risiko arus keluar modal, sehingga perkembangan ekonomi internasional perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

- Pelemahan rupiah dan gejolak pasar saham dapat meningkatkan risiko terhadap stabilitas perekonomian nasional. Tekanan akibat kekhawatiran perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI dapat mendorong investor asing mengurangi kepemilikan aset keuangan Indonesia. Jika kondisi ini berlanjut, biaya pendanaan pemerintah dan perusahaan berpotensi meningkat, sedangkan pelemahan rupiah dapat membuat barang impor lebih mahal. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan investor perlu didukung perbaikan transparansi pasar modal, konsistensi kebijakan, dan penguatan kondisi ekonomi nasional.
- Keputusan suku bunga Bank Indonesia akan berpengaruh terhadap keseimbangan antara stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI-Rate dapat membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan nilai tukar, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan dan rumah tangga. Sebaliknya, mempertahankan suku bunga dapat memberi ruang bagi aktivitas ekonomi selama tekanan pasar masih terkendali. Karena itu, BI perlu mempertimbangkan pergerakan rupiah, arus modal asing, inflasi, cadangan devisa, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat sebelum menentukan langkah berikutnya.
- Peningkatan realisasi investasi nasional membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kegiatan ekonomi. Investasi kuartal III-2026 yang mencapai Rp528,7 triliun menunjukkan bahwa minat penanaman modal masih terjaga, sementara realisasi Januari–September telah mencapai 75,4% dari target tahunan. Namun, manfaat tersebut akan lebih besar apabila investasi diarahkan pada kegiatan produktif, melibatkan tenaga kerja lokal, dan menciptakan hubungan usaha dengan UMKM. Penyederhanaan perizinan dan kepastian waktu pelayanan juga perlu terus diperkuat agar investor dapat menjalankan proyek tanpa hambatan administratif yang berlarut-larut.
- Perlambatan aktivitas dunia usaha menunjukkan perlunya menjaga daya beli dan memastikan investasi menghasilkan kegiatan ekonomi yang lebih luas. Walaupun kinerja usaha pada kuartal III masih positif, nilai SBT turun dari 12,97% menjadi 11,46%, sedangkan penggunaan kapasitas produksi relatif stabil. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kegiatan ekonomi tetap berjalan, tetapi momentum pertumbuhannya perlu diperkuat. Pemerintah dan dunia usaha perlu mendorong permintaan domestik, meningkatkan produktivitas, serta menjaga agar perlambatan kegiatan usaha tidak berlanjut menjadi pengurangan tenaga kerja atau penundaan ekspansi perusahaan.
- Investasi yang diperkirakan tetap tumbuh pada kuartal IV dapat mendukung penguatan infrastruktur dan kapasitas produksi nasional. Pembangunan pabrik, gudang, fasilitas penyimpanan dingin, sarana pendidikan, jaringan listrik, dan infrastruktur digital berpotensi meningkatkan efisiensi usaha serta memperluas kegiatan ekonomi. Namun, penurunan investasi pada sektor informasi dan komunikasi setelah selesainya sejumlah proyek jaringan menunjukkan bahwa kesinambungan investasi perlu dijaga melalui proyek baru yang produktif. Dengan demikian, investasi tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga memperkuat konektivitas dan kemampuan produksi dalam jangka panjang.
- Meningkatnya beban bunga utang dapat mempersempit ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan. Ketika sebagian besar penerimaan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga, anggaran bagi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program produktif lainnya berpotensi menghadapi keterbatasan. Oleh sebab itu, reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengelolaan utang yang hati-hati menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Penggunaan utang juga perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi nyata, sehingga dapat memperkuat produktivitas dan kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan pada masa mendatang.
- Percepatan belanja APBN pada akhir tahun dapat menggerakkan perekonomian, tetapi harus disertai pengawasan anggaran yang baik. Belanja pemerintah berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa, mendukung aktivitas pelaku usaha, serta menjaga pelayanan publik dan perlindungan sosial. Namun, percepatan pengeluaran tanpa perencanaan yang matang dapat

meningkatkan risiko pemborosan dan memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran tersalurkan tepat sasaran, kewajiban yang jatuh tempo diselesaikan, dan belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Tingginya inflasi pangan berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Inflasi pangan bergejolak yang mencapai 5,03% pada September 2026 melampaui batas atas sasaran BI, sehingga kenaikan harga bahan makanan dapat mengurangi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan lainnya. Koordinasi BI dengan Kementerian Pertanian perlu diarahkan pada pemeliharaan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengendalian gejolak harga. Jika tekanan harga pangan dapat dikendalikan, daya beli masyarakat lebih terlindungi dan upaya menjaga inflasi secara keseluruhan akan menjadi lebih efektif.
- Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berpotensi memperluas akses pembiayaan dan memperkuat UMKM. Transaksi dan komitmen usaha yang terbentuk melalui ISEF dapat menjadi peluang bagi pelaku industri halal untuk memperoleh pembiayaan, memperluas pasar, dan membangun kerja sama dengan mitra usaha. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai transaksi atau jumlah kegiatan yang diselenggarakan. Diperlukan tindak lanjut berupa realisasi pembiayaan, perluasan rantai nilai halal, peningkatan literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh usaha kecil dan masyarakat.
- Pengembangan klaster ekonomi regional dapat membantu mengurangi kesenjangan antardaerah apabila disesuaikan dengan potensi setempat. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dapat memperkuat sektor unggulan, meningkatkan konektivitas, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar. Namun, pelaksanaan kebijakan ini perlu disertai koordinasi lintas wilayah dan perencanaan yang jelas agar investasi tidak hanya terkonsentrasi di daerah yang sudah maju. Dengan demikian, pengembangan klaster dapat menjadi sarana untuk memperluas sumber pertumbuhan sekaligus meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi.
- Risiko kesulitan pembayaran utang pada pemerintah daerah dapat mengganggu pembangunan dan pelayanan publik jika tidak segera diatasi. Temuan bahwa 198 pemerintah daerah berpotensi kesulitan membayar kewajiban jangka pendek menunjukkan pentingnya menyesuaikan belanja dengan kemampuan kas yang benar-benar tersedia. Keterlambatan pembayaran kepada kontraktor dan pemasok dapat mengganggu kelanjutan proyek serta arus kas pelaku usaha yang bekerja sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki perencanaan pendapatan, memprioritaskan pembayaran kewajiban jatuh tempo, dan memperkuat manajemen kas agar masalah serupa tidak berulang pada tahun anggaran berikutnya.
- Tingginya realisasi investasi Kota Magelang menunjukkan peluang untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja di daerah. Capaian Rp246,23 miliar hingga kuartal III-2026 yang telah mencapai 93% dari target tahunan memperlihatkan bahwa penanaman modal berpotensi menjadi salah satu penopang perekonomian kota. Agar tren tersebut berlanjut, pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan perizinan dan pelaporan kepada pelaku usaha, sekaligus memastikan bahwa investasi berjalan sesuai dengan tata ruang dan peraturan. Dengan pengelolaan yang tepat, peningkatan investasi dapat mendorong kegiatan usaha tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan pelayanan publik.
- Penataan lahan tidak produktif menjadi ruang terbuka publik di Kota Magelang menunjukkan bahwa pembangunan perlu menyeimbangkan kepentingan investasi dan kebutuhan masyarakat. Pengubahan kawasan Sidotopo menjadi ruang terbuka publik dapat meningkatkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif serta mendukung kebutuhan ruang bersama. Pada saat yang sama, pemerintah tetap memiliki peluang untuk membuka kawasan lain bagi investasi yang sesuai dengan visi tata kota. Pendekatan ini penting agar pembangunan ekonomi tidak

hanya berorientasi pada masuknya modal, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan, kenyamanan warga, dan keberlanjutan tata ruang.

- Program perlindungan Pantura Jawa memiliki implikasi penting bagi keberlanjutan ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir di Jawa Tengah. Ancaman abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan permukaan tanah dapat mengganggu permukiman, kegiatan perikanan, pertambakan, industri, serta jalur logistik. Karena Pantura memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, perlindungan wilayah pesisir juga berarti menjaga kelancaran kegiatan ekonomi yang lebih luas. Pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan agar infrastruktur perlindungan dapat mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga fungsi ekonomi wilayah.
- Penggunaan solusi berbasis alam dalam perlindungan pesisir dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang pendapatan masyarakat. Penanaman mangrove di Timbulloko, Demak, dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan pesisir, sementara pemanfaatan hexbricks produksi warga membuka kesempatan untuk melibatkan masyarakat dalam pekerjaan terkait program tersebut. Agar manfaatnya berkelanjutan, pembangunan perlu memperhatikan mata pencaharian nelayan dan petambak serta melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dengan begitu, perlindungan pesisir tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung ketahanan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
- Peningkatan jumlah peserta Susurun Boyolali 2026 menunjukkan bahwa acara olahraga dapat dikembangkan sebagai penggerak wisata dan kegiatan usaha lokal. Kehadiran 2.500 pelari, meningkat sekitar 56% dari tahun sebelumnya, membuka peluang bagi UMKM, restoran, penginapan, dan penyedia jasa lainnya untuk memperoleh tambahan pelanggan. Acara ini juga memperkenalkan potensi alam, budaya, dan identitas Boyolali sebagai Kota Susu kepada pengunjung dari berbagai daerah. Jika kegiatan tersebut terus dikembangkan secara terencana, manfaat ekonomi dapat meluas dari lokasi acara ke berbagai sektor usaha yang melayani kebutuhan peserta dan wisatawan.
- Pengembangan sport tourism di Jawa Tengah membutuhkan kesinambungan penyelenggaraan dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Harapan agar Susurun menjadi agenda tahunan dapat membantu membangun daya tarik Boyolali sebagai tujuan wisata, tetapi dampaknya akan lebih besar apabila promosi, akses transportasi, fasilitas pengunjung, dan kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Pemerintah daerah juga perlu mendorong UMKM menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung serta menjaga mutu dan harga yang wajar. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah peserta tidak hanya menjadi keberhasilan penyelenggaraan acara, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih luas.

Berita Selasa, 20 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Selasa, 20 Oktober 2026, menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, perubahan nilai tukar, dan perlambatan di sejumlah sektor usaha. Salah satu persoalan utama adalah pelemahan mata uang rupiah terhadap berbagai mata uang dunia dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Bloomberg, sejak 21 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026, krone Norwegia menguat 35,41% terhadap rupiah, diikuti krona Swedia sebesar 23,92%, dolar Australia 21,96%, franc Swiss 21,84%, dan euro 20,55%. Sementara itu, dolar Amerika Serikat menguat 16,08% terhadap rupiah. Di kawasan Asia, yuan offshore menguat 24,05%, yuan China 23,76%, dan ringgit Malaysia 22,46%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak hanya berkaitan dengan

dolar AS, tetapi juga meluas terhadap mata uang negara-negara mitra dagang Indonesia. Akibatnya, biaya perjalanan ke luar negeri meningkat karena masyarakat harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk memperoleh mata uang negara tujuan. Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya perdagangan dan pembelian barang dari luar negeri, sehingga dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat, biaya produksi perusahaan, dan kestabilan harga di dalam negeri.

Tekanan ekonomi global tersebut semakin kompleks karena inflasi dunia diperkirakan kembali meningkat akibat konflik Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi. Bloomberg Economics memperkirakan inflasi global dapat mencapai 4,4% secara tahunan pada kuartal IV-2026 apabila konflik berlanjut dengan intensitas rendah dan harga minyak bertahan di sekitar US\$100 per barel. Apabila konflik berkembang menjadi perang regional yang lebih luas dan harga minyak meningkat hingga US\$130 per barel, inflasi global bahkan berpotensi mencapai 5% pada periode yang sama. Sebaliknya, apabila konflik mereda dan harga minyak turun menjadi US\$70 per barel, inflasi global diperkirakan dapat melandai menjadi 4,2% pada 2026 dan 3% pada 2027. Perubahan harga minyak tersebut sangat penting karena memengaruhi biaya bahan bakar, transportasi, logistik, dan produksi berbagai barang. Apabila kenaikan biaya berlangsung lama, perusahaan berpotensi menaikkan harga jual, sedangkan pekerja dapat menuntut kenaikan upah untuk mempertahankan daya beli. Keadaan ini membuat bank sentral di berbagai negara menghadapi dilema antara mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak melambat. Dengan demikian, arah perekonomian dunia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh perkembangan konflik geopolitik dan kestabilan pasokan energi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, perkembangan ekonomi sejumlah negara menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Di Inggris, pertumbuhan upah pekerja mulai meningkat secara bertahap, dengan rata-rata pendapatan mingguan tanpa bonus naik 3,7% secara tahunan dalam tiga bulan hingga Agustus 2026, lebih tinggi daripada perkiraan analis sebesar 3,6%. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,7%, meskipun jumlah lowongan pekerjaan berkurang dari 704.000 menjadi 691.000. Kondisi ini menunjukkan adanya tanda pemulihan pasar tenaga kerja, tetapi belum cukup kuat untuk menghilangkan kekhawatiran mengenai lemahnya permintaan tenaga kerja dan dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan terhadap kebutuhan pekerja. Sementara itu, National Australia Bank berencana memangkas hingga 2.500 pekerjaan pada 2027 untuk menyederhanakan operasional dan menekan biaya di tengah prospek pertumbuhan kredit yang lebih menantang. Di China, bank sentral mempertahankan suku bunga kredit tenor satu tahun pada 3% dan tenor lima tahun pada 3,5% selama 17 bulan berturut-turut karena pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 mencapai 4,5%, lebih tinggi daripada perkiraan pasar. China juga kembali mengimpor 360.878 ton kedelai dari Amerika Serikat pada September 2026 sebagai bagian dari pembelian dalam kesepakatan untuk meredakan perang dagang. Namun, impor kedelai AS sepanjang Januari–September masih turun 34% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan impor dari Brasil meningkat 3,4%. Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan ekonomi, kebijakan perdagangan, dan perubahan kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara berlangsung tidak merata, sehingga tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi perdagangan dan pasar keuangan global.

Berbagai perkembangan internasional tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, terutama melalui pergerakan nilai tukar rupiah, arus modal asing, dan kenaikan harga energi. Dalam berita mengenai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nilai tukar rupiah tercatat melemah dari Rp15.495 per dolar AS pada 21 Oktober 2024 menjadi Rp17.987 per dolar AS pada 20 Oktober 2026, atau terdepresiasi sebesar 13,85%. Sepanjang 2026, rupiah juga mengalami pelemahan sekitar 7,28% hingga 7,39%, bergantung pada tanggal dan data penutupan yang digunakan dalam masing-masing pemberitaan. Tekanan tersebut antara lain dikaitkan dengan menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia, arus keluar modal asing, serta ketidakpastian global. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor minyak, bahan baku industri, pangan, obat-obatan, mesin, dan komponen produksi yang berasal dari

luar negeri. Jika biaya impor meningkat dan diteruskan kepada konsumen, tekanan inflasi dapat semakin besar dan daya beli masyarakat berpotensi menurun. Perusahaan yang memiliki kewajiban dalam valuta asing juga menghadapi beban pembayaran lebih tinggi, sehingga keuntungan dan kemampuan melakukan investasi dapat tertekan. Meskipun rupiah sempat menguat 0,32% ke Rp17.986 per dolar AS pada perdagangan 20 Oktober 2026 menjelang pengumuman suku bunga Bank Indonesia, penguatan tersebut belum menunjukkan bahwa tren pelemahan telah berbalik. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan harga, keberlanjutan kegiatan usaha, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan yang dapat menjaga stabilitas rupiah tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Menjelang Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, mayoritas ekonom dan analis memperkirakan BI mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75%, meskipun sebagian pihak menilai kenaikan menjadi 6% atau bahkan 6,25% dapat dipertimbangkan apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan inflasi September 2026 yang mencapai 3,28% secara tahunan, mendekati batas atas sasaran Bank Indonesia sebesar 3,5%, serta harga minyak Brent yang berada di sekitar US\$110 per barel. Namun, kenaikan suku bunga tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan karena pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh kepercayaan investor, transparansi pasar saham, dan persepsi terhadap penegakan hukum. Suku bunga yang terlalu tinggi bahkan berisiko meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan dunia usaha, memperlambat pertumbuhan kredit, serta menekan konsumsi dan investasi. Dalam upaya menjaga stabilitas, Bank Indonesia telah melakukan intervensi melalui berbagai instrumen, termasuk swap, DNDF, dan NDF, serta memberikan insentif biaya lindung nilai atau hedging. Kebijakan tersebut dilaporkan telah mendatangkan arus masuk dana sekitar US\$8 miliar hingga US\$9 miliar melalui instrumen swap dan DNDF. Dengan demikian, upaya menjaga rupiah membutuhkan perpaduan kebijakan moneter, intervensi pasar valuta asing, pengelolaan likuiditas, serta koordinasi dengan pemerintah dan regulator untuk memperkuat kepercayaan investor.

Di sisi lain, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga, tetapi manfaatnya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03% pada 2024, meningkat menjadi 5,11% pada 2025, dan mencapai sekitar 5,29% pada kuartal II-2026. Pemerintah menilai kondisi makroekonomi dan aktivitas transaksi masyarakat masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Namun, ekonom menyoroti bahwa sekitar 59,42% pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, sehingga banyak di antaranya belum memperoleh perlindungan seperti jaminan pensiun dan jaminan kesehatan sebagaimana pekerja formal. Selain itu, pertumbuhan investasi dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi persoalan pemutusan hubungan kerja dan penutupan industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendapatan, dan menjaga daya beli masyarakat. Persoalan penerimaan negara juga menjadi perhatian karena pajak menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan negara dan mendukung sebagian besar belanja pemerintah. Hingga September 2026, penerimaan pajak dilaporkan mencapai sekitar Rp1.607,8 triliun, tumbuh 24,1% secara tahunan, tetapi baru mencapai 68,2% dari target APBN. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kepatuhan pajak, memperluas kegiatan ekonomi formal, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan pekerjaan produktif sekaligus memperkuat penerimaan negara.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional juga terlihat dari perkembangan investasi yang menunjukkan peningkatan selama 2026. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal III-2026 mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, investasi selama Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun. Penanaman modal asing menyumbang Rp270,2 triliun atau 51,1% dari investasi kuartal III, sedangkan penanaman modal dalam

negeri mencapai Rp258,5 triliun atau 48,9%. Investasi tersebut juga menyerap 745.634 tenaga kerja pada kuartal III-2026, meningkat 5,1% secara tahunan. Pemerintah berupaya meningkatkan kepastian usaha melalui integrasi sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga serta penerapan mekanisme fiktif positif, yang memungkinkan penerbitan izin apabila instansi terkait tidak memberikan keputusan dalam batas waktu pelayanan. Selain investasi secara keseluruhan, sektor hilirisasi menjadi salah satu penggerak utama perekonomian dengan nilai investasi Rp1.199 triliun sejak kuartal IV-2024 hingga September 2026. Khusus Januari–September 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun atau tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor mineral mendominasi investasi tersebut, terutama melalui komoditas nikel, bauksit, besi baja, tembaga, dan pasir silika. Perkembangan ini menunjukkan upaya Indonesia meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperluas kegiatan industri, dan menarik investasi. Namun, peningkatan investasi tetap perlu diikuti penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan industri pendukung, dan pemerataan manfaat pembangunan agar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat semakin nyata.

Selain mendorong investasi, pemerintah berencana meningkatkan belanja negara pada kuartal IV-2026 menjadi sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi daripada realisasi kuartal IV-2025 yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Peningkatan belanja tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas ekonomi hingga akhir tahun, mendukung pelayanan publik, memperkuat perlindungan sosial, dan menjalankan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti menghentikan program, melainkan memastikan setiap pengeluaran menghasilkan manfaat sesuai tujuan. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa peningkatan belanja perlu disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan agar tidak memperlebar defisit APBN secara berlebihan. Apabila penerimaan tidak mencapai target, pemerintah dapat menghadapi kebutuhan tambahan pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara yang berpotensi meningkatkan beban bunga utang, terutama ketika imbal hasil obligasi sedang tinggi. Selain itu, percepatan belanja pada akhir tahun berisiko mengurangi kualitas pelaksanaan program apabila waktu pengawasan dan penyelesaian kegiatan menjadi terlalu terbatas. Karena itu, tambahan anggaran perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan dampak ekonomi luas, seperti bantuan sosial tepat sasaran, program padat karya, dan kegiatan yang mendorong konsumsi serta investasi. Pemerintah juga perlu menjaga transparansi dalam menyampaikan proyeksi pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Dengan pengelolaan yang cermat, peningkatan belanja dapat menjadi pendorong ekonomi tanpa mengorbankan disiplin fiskal dan kepercayaan investor. Sebaliknya, apabila pengeluaran meningkat tanpa dukungan penerimaan yang memadai, tekanan terhadap keuangan negara dapat bertambah dan mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan pada periode berikutnya.

Perkembangan ekonomi nasional tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam peninjauan di KDMP Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, dan KDMP Banyudono, Kabupaten Boyolali, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa koperasi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui penyediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan pemasaran produk lokal. Koperasi juga diharapkan menjadi penguat swasembada pangan serta berperan sebagai pembeli atau off-taker bagi hasil produksi desa dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah per 19 Oktober 2026, sebanyak 8.523 koperasi telah terbentuk, dengan 5.427 unit atau 63% sudah beroperasi, sedangkan 3.096 unit atau 37% masih berada dalam tahap persiapan. Jumlah gedung koperasi yang telah terbangun mencapai 5.895 unit. Meskipun perkembangan tersebut menunjukkan perluasan kelembagaan ekonomi desa, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur, sarana transportasi, pasokan barang, dan kelengkapan fasilitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong pengelola koperasi yang belum beroperasi untuk belajar dari koperasi yang sudah berjalan, khususnya dalam hal tata kelola, sistem kerja, dan kerja sama dengan UMKM melalui mekanisme konsinyasi. Manfaat koperasi juga telah dirasakan oleh sebagian masyarakat, seperti warga Banyudono yang

menyebut harga minyak goreng di KDMP sekitar Rp16.000, lebih murah daripada harga pasar yang mencapai sekitar Rp22.000. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berpotensi membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Apabila pengelolaannya berjalan baik dan pasokan barang terjaga, KDMP dapat memperkuat perputaran ekonomi desa, memperluas pasar produk lokal, serta mendukung ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah.

Selain memperkuat ekonomi desa melalui koperasi, Jawa Tengah juga mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan UMKM halal, pesantren, keuangan sosial syariah, dan digitalisasi transaksi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Salah satu langkahnya adalah memfasilitasi sembilan UMKM binaan untuk mengikuti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta. Para pelaku usaha memperkenalkan produk unggulan berupa kuliner halal dan batik daerah untuk memperluas akses pasar, membangun kemitraan, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam kegiatan tersebut, Thulada Lumbung Rempah dari Kabupaten Banjarnegara meraih juara kedua Indonesia International Halal Chef Competition 2026 kategori Produk UMKM IKRA, sehingga membuka peluang lebih luas bagi pengembangan produk UMKM menuju pasar internasional. Bank Indonesia Purwokerto juga mendorong kemandirian pesantren melalui pelatihan kewirausahaan, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelaku Usaha Syariah Bank Indonesia, praktik budi daya cabai dengan metode pertanian yang baik, serta peningkatan keterampilan digital para santri. Penguatan keuangan sosial syariah dilakukan melalui edukasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk pemanfaatan QRIS bagi pengurus masjid. Selain itu, promosi Desa Wisata Lembah Asri Serang di Kabupaten Purbalingga sebagai destinasi ramah Muslim menjadi bagian dari upaya menghubungkan ekonomi syariah dengan pariwisata daerah. Secara keseluruhan, rangkaian berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa tantangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan stabilitas keuangan, tetapi juga dengan pemerataan manfaat pembangunan. Tekanan nilai tukar dan inflasi menuntut kebijakan ekonomi yang hati-hati, sedangkan peningkatan investasi, belanja produktif, penguatan koperasi, dan pemberdayaan UMKM menjadi peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi. Dengan koordinasi kebijakan yang baik, pengelolaan anggaran yang disiplin, serta dukungan terhadap usaha lokal dan ekonomi syariah, pembangunan di Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ringkasan

- Dalam dua tahun terakhir, rupiah tercatat melemah terhadap sejumlah mata uang utama, bukan hanya dolar Amerika Serikat (AS). Krone Norwegia menguat paling besar terhadap rupiah sebesar 35,41%, disusul yuan offshore sebesar 24,05%, krona Swedia 23,92%, yuan China 23,76%, dan ringgit Malaysia 22,46%. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya transaksi dengan negara mitra dagang serta membuat masyarakat Indonesia membutuhkan lebih banyak rupiah untuk berwisata atau berbelanja di luar negeri.
- Rata-rata pendapatan mingguan pekerja Inggris, tidak termasuk bonus, meningkat 3,7% secara tahunan dalam tiga bulan hingga Agustus 2026, sedikit lebih tinggi daripada perkiraan analis sebesar 3,6%. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,7%, sementara jumlah pekerja dalam sistem penggajian bertambah pada September. Namun, pasar tenaga kerja masih menghadapi tantangan karena jumlah lowongan pekerjaan turun menjadi 691.000, sehingga pemulihan ekonomi dan keputusan Bank of England mengenai suku bunga masih bergantung pada perkembangan upah, inflasi, dan kebijakan anggaran pemerintah.
- Pada September 2026, China mengimpor 360.878 ton kedelai AS sebagai bagian dari perkembangan kesepakatan dagang kedua negara. Meski demikian, impor kedelai AS

sepanjang Januari–September 2026 masih turun 34% menjadi 11,06 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, impor dari Brasil meningkat 3,4% menjadi 65,84 juta ton, menunjukkan bahwa Brasil tetap menjadi pemasok utama bagi China di tengah dinamika hubungan perdagangan Beijing dan Washington.

- Pada perdagangan Selasa, 20 Oktober 2026, dolar Taiwan mengalami pelemahan terdalam di Asia terhadap dolar AS, yakni 0,47%, sedangkan rupiah justru menguat 0,17% ke Rp18.000 per dolar AS. Namun, penguatan harian tersebut belum menghapus pelemahan rupiah sebesar 7,39% sejak akhir 2025. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pergerakan mata uang dalam satu hari tidak selalu menggambarkan kinerja jangka panjang, yang juga dipengaruhi kondisi ekonomi dan sentimen pasar global.
- Bank sentral China mempertahankan suku bunga acuan kredit tenor satu tahun pada 3% dan tenor lima tahun pada 3,5% pada Oktober 2026. Keputusan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi China sebesar 4,5% pada kuartal III-2026, yang lebih tinggi daripada perkiraan pasar sehingga belum mendorong kebutuhan mendesak untuk memberikan stimulus moneter tambahan. China juga berupaya memperbaiki mekanisme penetapan suku bunga agar kebijakan moneter dapat tersalurkan secara lebih efektif kepada dunia usaha dan pasar keuangan.
- Pergerakan mata uang global cenderung terbatas karena selera risiko investor membaik, tetapi ketidakpastian politik di Prancis masih membayangi pasar. Demonstrasi antipemerintah dan tekanan terhadap pembahasan anggaran Prancis meningkatkan perhatian investor terhadap risiko utang negara tersebut, tercermin dari melebar-nya selisih imbal hasil obligasi pemerintah Prancis dan Jerman. Sementara itu, indeks dolar AS naik 0,2% menjadi 101,98, sedangkan euro relatif stabil, sehingga perkembangan politik dan fiskal Eropa masih menjadi faktor penting bagi pergerakan mata uang global.
- Bank tersebut memperkirakan pengurangan tenaga kerja sekitar 6% dari total pekerjaannya untuk menyederhanakan operasional di tengah prospek pertumbuhan kredit yang lebih menantang. Rencana ini menunjukkan bahwa perusahaan keuangan juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan struktur operasional dan biaya, sehingga perkembangan ekonomi global tidak hanya memengaruhi nilai tukar dan perdagangan, tetapi juga keputusan perusahaan mengenai kebutuhan tenaga kerja.
- Pemerintah menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi dan aktivitas transaksi masyarakat masih cukup tangguh menghadapi ketidakpastian global. Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan ekspor nasional, termasuk melalui sektor manufaktur, serta mengevaluasi hambatan yang mengganggu kinerja ekspor. Pemerintah juga menekankan bahwa efisiensi anggaran diarahkan untuk memastikan program berjalan lebih efektif, bukan menghentikan pelaksanaan program prioritas.
- Ekonom menilai kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% dapat dipertimbangkan jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut. Pada 19 Oktober 2026, rupiah tercatat sekitar Rp18.043 per dolar AS, sementara imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun mencapai sekitar 7,43%. Meski kenaikan suku bunga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar, langkah tersebut tidak menjamin rupiah langsung menguat karena tekanan juga berkaitan dengan kepercayaan investor, transparansi pasar modal, dan penegakan hukum. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan risiko meningkatnya biaya pembiayaan, perlambatan kredit, serta tekanan terhadap konsumsi dan investasi.
- Inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan, mendekati batas atas sasaran inflasi sebesar 3,5%, sedangkan inflasi inti berada di 2,84%. Pada saat yang sama, harga minyak Brent berada di sekitar US\$110 per barel. Kombinasi rupiah yang lemah dan kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya impor, bahan baku, dan transportasi, sehingga Bank Indonesia perlu mempertimbangkan pengelolaan likuiditas, intervensi valuta asing, serta koordinasi dengan pemerintah dan regulator untuk menjaga stabilitas ekonomi.

- Investasi pada kuartal III mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, investasi Januari–September mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja pada kuartal III sebanyak 745.634 orang. Penanaman modal asing menyumbang Rp270,2 triliun atau 51,1%, sedangkan penanaman modal dalam negeri mencapai Rp258,5 triliun atau 48,9%. Untuk mempertahankan perkembangan ini, pemerintah mempercepat proses perizinan melalui integrasi sistem antarkementerian dan lembaga agar investor memperoleh kepastian waktu serta prosedur.
- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran hingga September 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp1.199 triliun. Khusus Januari–September 2026, nilainya sebesar Rp480 triliun, tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyumbang 31,2% dari total investasi nasional. Sektor mineral mendominasi dengan nilai Rp335,1 triliun, termasuk investasi nikel, bauksit, besi baja, tembaga, dan pasir silika. Sebanyak 78% investasi hilirisasi berada di luar Jawa, menunjukkan upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam sekaligus pemerataan investasi antardaerah.
- Belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal IV-2025 yang mencapai Rp1.200 triliun dan diharapkan mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta perlindungan sosial. Namun, ekonom mengingatkan bahwa peningkatan belanja dapat memperlebar defisit APBN apabila pendapatan negara tidak mencapai target. Karena itu, pemerintah perlu memastikan anggaran diarahkan pada kegiatan produktif dengan dampak berganda yang besar, memperkuat pengawasan, dan menentukan prioritas belanja agar tambahan pengeluaran benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Ekonom mengingatkan bahwa besarnya belanja perlu disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan agar defisit tetap terkendali. Apabila penerimaan tidak mencukupi, pemerintah berisiko membutuhkan pembiayaan tambahan ketika imbal hasil surat utang meningkat, sehingga beban bunga semakin berat. Percepatan belanja pada November dan Desember juga perlu diawasi agar anggaran tidak sekadar terserap secara administratif, melainkan menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Oleh sebab itu, transparansi proyeksi pendapatan, belanja, defisit, serta pembiayaan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor.
- Ahmad Luthfi meninjau koperasi di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, dan Banyudono, Kabupaten Boyolali, serta meminta agar masyarakat mengetahui keberadaan koperasi yang telah beroperasi. Koperasi diharapkan menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, memperkuat swasembada pangan, dan menjadi pembeli bagi hasil produksi desa maupun UMKM lokal. Koperasi yang sudah berjalan juga didorong menjadi tempat belajar bagi pengelola koperasi lain, terutama dalam tata kelola, sistem kerja, dan kerja sama pemasaran produk lokal.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat masih ada koperasi yang belum beroperasi karena fasilitas belum lengkap, seperti keterbatasan listrik, kendaraan, dan barang dagangan. Karena itu, peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan setiap koperasi agar kekurangan dapat ditangani secara bertahap. Manfaat koperasi juga mulai dirasakan masyarakat, salah satunya melalui harga minyak goreng yang disebut sekitar Rp16.000 di koperasi, lebih murah dibandingkan harga pasar sekitar Rp22.000, sehingga membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih terjangkau.
- Upaya ini dilakukan melalui pengembangan UMKM halal, pemberdayaan pesantren, digitalisasi keuangan sosial syariah, dan peningkatan literasi masyarakat. Sebanyak sembilan UMKM binaan BI Purwokerto difasilitasi mengikuti Indonesia Sharia Economic Festival ke-13 di Jakarta untuk memperluas akses pasar dan membangun kemitraan. Produk yang ditampilkan meliputi kuliner halal dan batik daerah dari Banyumas, Cilacap, Purbalingga, serta Banjarnegara. Salah satu pelaku usaha, Thulada Lumbung Rempah dari Banjarnegara, meraih

juara kedua dalam kompetisi produk UMKM pada Indonesia International Halal Chef Competition 2026, sehingga membuka peluang bagi produk lokal untuk semakin dikenal.

- BI Purwokerto mendorong kemandirian pesantren melalui pelatihan kewirausahaan, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelaku Usaha Syariah Bank Indonesia (SIPUSBI) untuk pelaporan keuangan, praktik budi daya cabai dengan metode pertanian yang baik, serta peningkatan keterampilan digital bagi santri dari lima pesantren. Selain itu, edukasi mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf turut diperkuat, termasuk pemanfaatan QRIS bagi pengurus masjid. Langkah ini diharapkan meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan keuangan syariah sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Implikasi

- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan biaya impor karena perusahaan membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat memengaruhi harga barang yang bergantung pada bahan baku impor, sehingga perlu diperhatikan agar kenaikan biaya tidak semakin membebani pelaku usaha dan masyarakat.
- Perubahan upah dan kondisi pasar tenaga kerja di Inggris dapat memengaruhi pertimbangan bank sentral dalam menentukan kebijakan suku bunga. Jika tekanan upah masih tinggi, kebijakan moneter dapat tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi, sedangkan perubahan kebutuhan tenaga kerja juga dapat mendorong perusahaan menyesuaikan jumlah pekerja dan biaya operasionalnya.
- Perkembangan impor kedelai Tiongkok dapat memengaruhi permintaan dan persaingan di pasar komoditas dunia. Perubahan jumlah impor serta pilihan negara pemasok dapat memengaruhi perdagangan kedelai internasional, sehingga perkembangan tersebut perlu diperhatikan oleh negara dan pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan komoditas pertanian.
- Pergerakan nilai tukar mata uang di kawasan Asia menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan keuangan setiap negara masih menghadapi tantangan yang berbeda. Penguatan rupiah dalam jangka pendek dapat memberikan sedikit ruang bagi kegiatan ekonomi, tetapi belum tentu menghilangkan tekanan yang berasal dari kondisi pasar global dan perubahan kepercayaan investor.
- Keputusan Tiongkok mempertahankan suku bunga pinjaman menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan masih menjadi bagian penting dalam menjaga kegiatan ekonominya. Keputusan tersebut dapat memengaruhi biaya pinjaman bagi masyarakat dan perusahaan, sekaligus berdampak pada aktivitas konsumsi, investasi, serta permintaan terhadap berbagai komoditas dalam perdagangan internasional.
- Ketidakpastian politik dan kondisi anggaran di Prancis dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam menentukan arah investasinya. Jika ketidakpastian tersebut terus berlangsung, kepercayaan pasar dapat terganggu dan keputusan investasi mungkin tertunda, sehingga perkembangan politik dan kebijakan fiskal menjadi faktor penting yang diperhatikan pelaku pasar.
- Rencana National Australia Bank untuk mengurangi jumlah pekerja menunjukkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan perusahaan perbankan. Langkah tersebut dapat berkaitan dengan upaya menekan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperlihatkan bahwa perubahan strategi perusahaan dapat berdampak pada kebutuhan tenaga kerja di sektor keuangan.
- Stabilitas ekonomi nasional perlu didukung oleh kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, peningkatan

kegiatan produksi, ekspor, dan investasi perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

- Pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat dipertimbangkan untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan moneter perlu mempertimbangkan kondisi rupiah sekaligus menjaga agar kegiatan konsumsi, investasi, dan usaha tetap berjalan.
- Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah dapat meningkatkan tekanan inflasi di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menaikkan biaya impor, transportasi, dan produksi yang kemudian dapat memengaruhi harga barang di dalam negeri. Pemerintah perlu menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan biaya distribusi agar kenaikan harga tidak terlalu membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
- Peningkatan realisasi investasi menunjukkan adanya peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Nilai investasi Indonesia pada Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan. Capaian ini perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi agar manfaatnya dapat dirasakan melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, dan keterlibatan usaha lokal.
- Investasi hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Investasi hilirisasi yang mencapai Rp480 triliun pada Januari–September dapat mendukung pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi. Namun, pengembangannya perlu disertai peningkatan keterampilan tenaga kerja, penggunaan pemasok lokal, dan pengelolaan kegiatan produksi yang baik agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas.
- Rencana belanja pemerintah sebesar Rp1.300 triliun pada kuartal IV dapat mendorong kegiatan ekonomi nasional. Belanja tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa serta mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Agar hasilnya optimal, anggaran perlu digunakan secara tepat sasaran, mengutamakan kebutuhan penting, dan memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Risiko peningkatan defisit anggaran perlu diantisipasi melalui pengelolaan keuangan negara yang hati-hati. Jika penerimaan negara tidak mencukupi kebutuhan belanja, pemerintah perlu mengevaluasi prioritas pengeluaran dan mengoptimalkan penerimaan yang tersedia. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan anggaran serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kondisi keuangan negara.
- Kepercayaan investor perlu dijaga melalui transparansi dan tata kelola yang baik. Ketidakpastian mengenai aturan pasar, keterbukaan informasi, dan pengawasan transaksi dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Karena itu, kepastian hukum dan penegakan aturan perlu diperkuat agar pasar keuangan tetap dipercaya dan investasi dapat berkembang secara sehat.
- Koperasi Desa Merah Putih berpotensi membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kehadiran koperasi dapat memberikan pilihan tempat berbelanja yang lebih dekat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Namun, manfaat tersebut bergantung pada ketersediaan barang, kestabilan pasokan, dan kemampuan pengelola dalam menjaga harga serta pelayanan kepada masyarakat.
- Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi sarana pemasaran bagi produk pertanian dan UMKM setempat. Dengan membeli dan menjual kembali hasil produksi masyarakat, koperasi berpotensi membantu pelaku usaha memperoleh pasar yang lebih luas. Agar kegiatan tersebut berjalan baik, pengelola perlu memperhatikan kualitas produk, kebutuhan konsumen, dan pengaturan persediaan supaya hasil produksi lokal dapat terserap secara berkelanjutan.
- Kendala operasional koperasi menunjukkan bahwa pembentukan kelembagaan saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan program. Masalah seperti ketersediaan listrik, kendaraan

pengangkut, dan persediaan barang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan pengelola perlu memastikan fasilitas pendukung tersedia serta melakukan pendampingan agar koperasi dapat beroperasi secara teratur dan mandiri.

- Dukungan Bank Indonesia Purwokerto dapat membantu memperluas peluang pemasaran UMKM syariah di Jawa Tengah. Keikutsertaan sembilan UMKM dalam kegiatan ISEF menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk makanan halal dan batik kepada pasar yang lebih luas. Prestasi Thulada Lumbung Rempah yang meraih juara kedua dalam kompetisi halal juga menunjukkan potensi produk lokal yang perlu didukung melalui peningkatan kualitas, kemasan, dan strategi pemasaran.
- Pendampingan kewirausahaan bagi pesantren dapat memperkuat kemampuan pengelolaan usaha secara mandiri. Pelatihan kewirausahaan dan pencatatan keuangan melalui SIPUSBI dapat membantu pesantren mengatur kegiatan usaha dengan lebih tertib. Selain itu, penerapan praktik pertanian cabai yang baik dan peningkatan keterampilan digital dapat membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas pemasaran produk.
- Pemanfaatan QRIS dapat mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha maupun pengurus masjid. Penggunaan pembayaran digital memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih praktis dan dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih teratur. Namun, penerapannya perlu disertai pemahaman mengenai penggunaan teknologi, keamanan transaksi, dan pencatatan keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
- Peningkatan literasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat mendukung pengelolaan dana sosial keagamaan yang lebih baik. Pemahaman yang memadai dapat membantu masyarakat dan pengelola lembaga keagamaan mengatur penyaluran dana secara lebih tertib dan tepat sasaran. Jika didukung keterbukaan pengelolaan dan pemanfaatan yang sesuai kebutuhan, dana tersebut juga dapat membantu mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Pengembangan koperasi, UMKM syariah, dan usaha berbasis pesantren dapat saling mendukung dalam memperkuat ekonomi daerah. Koperasi dapat menjadi saluran pemasaran produk lokal, sedangkan pendampingan UMKM dan pesantren membantu meningkatkan kualitas serta kemampuan pengelolaan usaha. Kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha diperlukan agar program tersebut dapat berkembang sesuai dengan potensi setiap daerah.

Berita Rabu, 21 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Rabu, 21 Oktober 2026, menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi tantangan berupa kenaikan inflasi, ketidakpastian geopolitik, perubahan nilai tukar, serta ketegangan perdagangan antarnegara. Di Inggris, inflasi konsumen tahunan meningkat menjadi 3,5% pada September 2026, dari 3,1% pada Agustus, sehingga melampaui perkiraan para ekonom sebesar 3,4%. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh lonjakan harga energi akibat perang Iran, yang semakin menambah beban biaya hidup masyarakat. Tingginya ketergantungan Inggris terhadap impor gas alam membuat negara tersebut cukup rentan terhadap perubahan harga energi global. Kondisi ini mendorong pasar memperkirakan Bank of England akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 4% pada November 2026, yang berpotensi menjadi kenaikan pertama dalam tiga tahun terakhir. Namun, kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Pemerintah Inggris diperkirakan akan memberikan dukungan tambahan kepada rumah tangga yang paling terdampak kenaikan harga energi. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa upaya mengendalikan inflasi perlu dilakukan bersamaan dengan perlindungan terhadap daya beli

masyarakat, terutama ketika tekanan harga berasal dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan secara langsung.

Tantangan inflasi juga terlihat di Jepang, tetapi terdapat perkembangan penting berupa peralihan tekanan harga dari kenaikan biaya impor menuju inflasi yang semakin berkelanjutan karena didorong oleh kenaikan upah. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menyampaikan bahwa pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat melalui rencana pemangkasan pajak konsumsi sebesar 8% untuk produk makanan selama dua tahun mulai April 2027, serta pemberian bantuan kepada rumah tangga. Di sisi lain, Bank of Japan telah menaikkan suku bunga menjadi 1,25% pada September 2026, tingkat tertinggi dalam 31 tahun, untuk menghadapi risiko inflasi inti yang berpotensi melampaui target 2%. Tekanan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga energi akibat perang Iran, meningkatnya permintaan global terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI, serta biaya impor yang semakin mahal akibat pelemahan yen. Meskipun pemangkasan pajak diharapkan membantu masyarakat, kebijakan tersebut juga berisiko meningkatkan permintaan dan memperkuat tekanan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah Jepang perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli tetap sejalan dengan kebijakan moneter untuk mengendalikan kenaikan harga. Situasi Jepang ini memperlihatkan bahwa tantangan ekonomi global tidak hanya berkaitan dengan mahalnnya energi, tetapi juga dengan upaya menjaga keseimbangan antara konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas harga.

Di tengah tekanan inflasi yang dialami sejumlah negara, China menunjukkan perkembangan positif melalui penguatan nilai tukar yuan dan peningkatan kinerja ekspor. Pada perdagangan 21 Oktober 2026, yuan di pasar domestik sempat mencapai 6,6765 per dolar Amerika Serikat, menjadi posisi terkuat sejak Juni 2022. Penguatan tersebut didukung oleh kinerja ekspor yang solid, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang melampaui ekspektasi, arus masuk modal asing, serta pelemahan dolar AS. Goldman Sachs memperkirakan China mencatat arus masuk bersih valuta asing sebesar US\$50 miliar pada September 2026, sementara rasio konversi valuta asing menjadi yuan meningkat dari 63% pada Agustus menjadi 66% pada September. Meskipun demikian, penguatan mata uang China belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya konsumsi domestik karena belanja konsumen masih terbatas. Pasar tenaga kerja juga menghadapi tantangan, terutama bagi kelompok usia muda. Tingkat pengangguran penduduk perkotaan berusia 16–24 tahun, tidak termasuk pelajar, turun menjadi 18% pada September dari 18,9% pada Agustus, sedangkan tingkat pengangguran kelompok usia 25–29 tahun turun tipis menjadi 7,4%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi tingginya pengangguran kaum muda menandakan bahwa pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata. Dengan demikian, China perlu mempertahankan kekuatan ekspor sekaligus memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja dan mendorong konsumsi dalam negeri agar pertumbuhan ekonominya lebih seimbang.

Perkembangan ekonomi Asia lainnya terlihat dari peningkatan ekspor Jepang yang mencapai 16,7% pada September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menjadi pertumbuhan selama 13 bulan berturut-turut dan terutama ditopang oleh kuatnya permintaan semikonduktor serta produk yang berkaitan dengan teknologi AI. Ekspor otomotif Jepang ke Eropa juga tetap kuat, sementara pengiriman ke Amerika Serikat meningkat 22,9% dan ke China naik 8,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan teknologi dan pemulihan permintaan di sejumlah pasar masih menjadi penopang perdagangan Jepang. Namun, impor Jepang juga meningkat 18,9% secara tahunan, meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan Agustus akibat penurunan pasokan minyak mentah. Gangguan pelayaran di kawasan Timur Tengah menyebabkan kapal tanker mengalihkan rute dan menunda pengiriman minyak ke Jepang. Akibatnya, defisit perdagangan Jepang pada September tercatat sebesar 536,6 miliar yen, lebih kecil daripada 1,1 triliun yen pada Agustus, tetapi masih lebih besar daripada perkiraan pasar sebesar 181 miliar yen. Pemerintah memperkirakan pasokan minyak mentah akan pulih pada Oktober seiring kedatangan kapal tanker melalui Terusan Suez. Dengan demikian, keberhasilan ekspor Jepang masih dibayangi risiko kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta kemungkinan perlambatan investasi AI di Amerika Serikat yang dapat mengurangi permintaan produk semikonduktor.

Selain persoalan energi dan perdagangan, ketidakpastian ekonomi internasional juga terlihat dari sengketa tarif antara Amerika Serikat dan Kanada. Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi gugatan hukum atas pemberlakuan tarif impor sebesar 50% terhadap berbagai produk Kanada dengan nilai awal sekitar US\$20 miliar. Perusahaan importir pangan yang mengajukan gugatan menilai bahwa pemerintah menggunakan ketentuan Pasal 338 Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley 1930 tanpa dasar kewenangan yang memadai. Menurut penggugat, ketentuan tersebut telah lama tidak digunakan dan besaran tarif yang diterapkan tidak sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Persoalan ini muncul setelah perundingan perdagangan antara kedua negara gagal mencapai kesepakatan, kemudian diikuti oleh penerapan tarif balasan Kanada dan perluasan pembatasan impor oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menyatakan akan mempertahankan kebijakannya di pengadilan dengan alasan Kanada masih melakukan diskriminasi terhadap sejumlah industri Amerika Serikat. Sengketa ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis dapat memperbesar ketidakpastian bagi perusahaan, terutama importir dan eksportir yang bergantung pada kelancaran perdagangan lintas negara. Jika ketegangan tersebut berlanjut, kegiatan perdagangan internasional dapat menghadapi hambatan tambahan dan biaya usaha yang lebih tinggi. Situasi ini menjadi semakin penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, karena perubahan kebijakan perdagangan, harga energi, dan arah suku bunga negara maju dapat memengaruhi arus modal serta stabilitas perekonomian domestik.

Dampak ketidakpastian global tersebut turut menjadi perhatian Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakan moneter dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 masih lemah, sekitar 3%, sementara tekanan inflasi global diperkirakan berada di kisaran 4,6%. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyebabkan harga minyak dan berbagai komoditas dunia tetap tinggi, sedangkan kebijakan moneter negara maju diperkirakan bertahan ketat lebih lama. Peluang kenaikan kembali suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate juga menjadi perhatian karena dapat mempertahankan tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan memperkuat daya tarik dolar. Dalam kondisi tersebut, investor cenderung lebih berhati-hati menempatkan dana di negara berkembang, sehingga pasar keuangan Indonesia menghadapi risiko arus modal keluar dan tekanan terhadap rupiah. Pada Rapat Dewan Gubernur 20–21 Oktober 2026, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI Rate di level 5,75% dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%, tetapi menaikkan suku bunga deposit facility dari 4,75% menjadi 5%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar, inflasi yang masih berada dalam sasaran, dan kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan BI mencerminkan upaya menyeimbangkan pengendalian tekanan eksternal dengan dukungan terhadap kegiatan ekonomi domestik, tanpa terburu-buru menaikkan suku bunga acuan kembali.

Meskipun BI mempertahankan suku bunga acuan, kondisi nilai tukar rupiah menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih cukup kuat. Pada perdagangan 21 Oktober 2026, rupiah ditutup melemah 0,1% ke level Rp18.005 per dolar AS, sementara pergerakan intrahari sebelumnya sempat menunjukkan penguatan terbatas. Secara tahunan, rupiah juga telah melemah 7,27% dibandingkan posisi akhir 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS, berdasarkan data perdagangan yang tercantum dalam berita. Tekanan ini berkaitan dengan penguatan dolar AS, ketegangan geopolitik, serta kekhawatiran investor terhadap kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dari emerging market menjadi standalone market. Bank Indonesia mencatat arus keluar bersih investasi portofolio asing sebesar US\$80 juta pada kuartal III-2026, terutama akibat keluarnya dana dari pasar saham. Namun, hingga 19 Oktober 2026, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat arus masuk sehingga investasi portofolio pada kuartal IV sementara membukukan arus masuk bersih sebesar US\$660 juta. Untuk menjaga stabilitas, BI memperbesar insentif lindung nilai melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan swap, yang sejak Juni hingga 20 Oktober 2026 telah membantu menarik aliran modal masuk sebesar US\$9,9 miliar. BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum

perbankan secara bertahap untuk menambah likuiditas dan mendorong penyaluran kredit. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga daya tarik aset rupiah, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada perkembangan pasar global, kepercayaan investor, dan kondisi pasar keuangan domestik.

Dari sisi ketahanan eksternal, perekonomian Indonesia masih memiliki sejumlah penopang, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan transaksi luar negeri dan pengelolaan anggaran negara. Bank Indonesia memperkirakan transaksi berjalan Indonesia pada 2026 mengalami defisit sebesar 1,6%–2,4% dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun demikian, neraca perdagangan pada Agustus 2026 mencatat surplus US\$3,55 miliar dan cadangan devisa pada akhir September mencapai US\$146,3 miliar, setara dengan pembiayaan sekitar 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional, sehingga menjadi salah satu penyangga ketika terjadi tekanan terhadap nilai tukar. Di sisi fiskal, pemerintah berencana mempercepat belanja negara hingga Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026 untuk mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, rencana tersebut perlu memperhatikan sisa anggaran yang tersedia, karena sekitar 70% dari pagu belanja negara sebesar Rp3.842 triliun telah terserap dan sisa anggaran diperkirakan sekitar Rp1.180 triliun. Belanja yang terlalu besar tanpa dukungan penerimaan memadai berisiko memperlebar defisit APBN, meningkatkan biaya utang, dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan akan melanjutkan efisiensi anggaran agar belanja diprioritaskan pada kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan fiskal yang terukur perlu berjalan seiring dengan kebijakan moneter BI agar dukungan terhadap pertumbuhan tidak mengorbankan stabilitas keuangan nasional.

Upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional juga dilakukan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfungsi menarik investasi, memperluas kegiatan usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Hingga saat ini, realisasi investasi kumulatif di seluruh KEK Indonesia mencapai Rp382,1 triliun dengan penyerapan sekitar 302.000 tenaga kerja. Khusus periode Januari–September 2026, investasi yang terealisasi mencapai Rp46 triliun dan menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.000 orang. Indonesia memiliki 25 KEK yang bergerak di bidang industri, pariwisata, kesehatan, digital, teknologi, dan jasa lainnya. Pemerintah menilai pengembangan kawasan tersebut masih perlu dipercepat agar kontribusinya terhadap perekonomian semakin besar, termasuk melalui perbaikan perizinan, perluasan kawasan industri, dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu kawasan yang mendapat perhatian adalah KEK Kendal, Jawa Tengah, yang memiliki potensi investasi Rp370 triliun dan potensi penyerapan hingga 250.000 tenaga kerja. Potensi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah mempunyai peran penting dalam mendukung strategi investasi nasional, terutama melalui pengembangan industri dan kegiatan ekonomi yang mampu menyerap banyak pekerja. Namun, manfaat investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, melainkan juga dari kemampuan investasi tersebut menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, pengembangan KEK perlu disertai kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi pemerintah dan pelaku usaha agar peluang investasi dapat direalisasikan secara optimal.

Sejalan dengan upaya nasional tersebut, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif melalui peningkatan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan, dan perencanaan pendapatan daerah. Hingga triwulan III-2026, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp72,54 triliun melalui 82.420 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 340.334 orang. Nilai tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp31,77 triliun dan Penanaman Modal Asing sebesar Rp40,77 triliun. Kabupaten Kendal mencatat investasi tertinggi sebesar Rp13,61 triliun, diikuti Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Temanggung Rp5,05 triliun, dan Demak Rp4,29 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan investasi melalui kerja sama perdagangan, pariwisata, dan industri antardaerah, dengan menempatkan Kota Semarang sebagai pusat penggerak ekonomi kawasan yang terhubung dengan daerah sekitarnya. Potensi industri padat karya juga menjadi perhatian, termasuk rencana masuknya 57

perusahaan asal Vietnam yang diharapkan dapat membuka kesempatan kerja baru. Di sisi lain, pemerintah daerah bersama 35 kabupaten/kota telah menyelenggarakan 1.724 kali Gerakan Pangan Murah sepanjang 2026 dengan omzet sekitar Rp31,03 miliar untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi. Inflasi Jawa Tengah tercatat 3,18%, lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 3,28%, meskipun stabilitas harga masih menghadapi tantangan El Niño, serangan hama tikus, biaya distribusi, dan peningkatan permintaan pada waktu tertentu. Sementara itu, Kabupaten Blora diproyeksikan menerima Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebesar Rp71,4 miliar pada 2027, meningkat dari Rp63,4 miliar pada 2026, tetapi masih jauh di bawah penerimaan 2025 sebesar Rp130,06 miliar. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan pendapatan daerah secara cermat agar pembiayaan pembangunan tetap sesuai dengan kemampuan anggaran. Secara keseluruhan, rangkaian berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi perlu dibangun melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta peningkatan investasi dan kesempatan kerja. Bagi Jawa Tengah, keberhasilan menjaga harga kebutuhan pokok sekaligus menarik investasi menjadi dua unsur penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Dengan demikian, tantangan ekonomi global perlu dihadapi melalui koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penguatan kerja sama dengan dunia usaha, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal agar pertumbuhan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Ringkasan

- Inflasi tahunan Inggris naik menjadi 3,5% pada September 2026, dari 3,1% pada Agustus, terutama akibat kenaikan harga energi yang dipicu perang Iran. Angka ini lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya sehingga pasar memperkirakan Bank of England akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 4% pada November. Kondisi tersebut dapat membantu menekan inflasi, tetapi juga berisiko meningkatkan biaya pinjaman rumah tangga dan pelaku usaha. Pemerintah Inggris pun diperkirakan menyiapkan bantuan tambahan bagi rumah tangga yang paling terdampak kenaikan biaya energi.
- Pemerintah Jepang menilai perekonomian sedang bergerak menuju periode inflasi yang lebih berkelanjutan, didorong oleh biaya impor yang tinggi dan kenaikan upah. Bank of Japan telah menaikkan suku bunga menjadi 1,25% pada September, level tertinggi dalam 31 tahun, untuk menghadapi risiko inflasi yang melampaui target 2%. Di sisi lain, pemerintah berencana memangkas pajak konsumsi sebesar 8% untuk produk makanan selama dua tahun mulai April 2027 guna meringankan beban masyarakat. Namun, kebijakan tersebut perlu diperhitungkan secara hati-hati karena peningkatan daya beli dapat mendorong permintaan dan berpotensi menambah tekanan inflasi.
- Nilai tukar yuan sempat mencapai 6,6765 per dolar AS, level terkuat sejak Juni 2022, didukung kinerja ekspor yang solid, ketahanan ekonomi China, dan pelemahan dolar AS. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2026 juga melampaui ekspektasi, meskipun belanja konsumen domestik masih terbatas. Goldman Sachs memperkirakan arus masuk bersih valuta asing ke China mencapai US\$50 miliar pada September, sementara rasio konversi valuta asing menjadi yuan meningkat menjadi 66%. Meski demikian, ketegangan geopolitik masih berpotensi memperlambat penguatan yuan apabila mendorong investor kembali mencari dolar AS sebagai aset yang lebih aman.
- Tingkat pengangguran penduduk perkotaan berusia 16–24 tahun, tidak termasuk pelajar, turun dari 18,9% pada Agustus menjadi 18% pada September 2026. Pengangguran kelompok usia 25–29 tahun juga sedikit menurun menjadi 7,4%, sedangkan kelompok usia 30–59 tahun tetap berada di 3,9%. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan, tetapi tingkat pengangguran anak muda masih jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih matang. Karena itu, kondisi pasar kerja tetap menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian China meskipun ekspor dan nilai tukarnya menunjukkan kinerja yang kuat.

- Ekspor Jepang tumbuh 16,7% secara tahunan pada September 2026, melanjutkan kenaikan selama 13 bulan berturut-turut. Permintaan semikonduktor dan produk terkait kecerdasan buatan menjadi pendorong utama, disertai ekspor otomotif yang tetap kuat, terutama ke Eropa. Ekspor ke Amerika Serikat naik 22,9%, sementara pengiriman ke China meningkat 8,6%. Namun, impor Jepang juga tumbuh 18,9%, sedangkan gangguan pengiriman minyak akibat ketegangan di sekitar Laut Merah menyebabkan pasokan minyak mentah tertunda. Defisit perdagangan Jepang akhirnya mencapai 536,6 miliar yen pada September, lebih kecil daripada bulan sebelumnya, tetapi masih lebih tinggi daripada perkiraan pasar.
- Pemerintahan Presiden Donald Trump digugat terkait penerapan tarif sebesar 50% terhadap berbagai produk asal Kanada senilai sekitar US\$20 miliar. Pihak penggugat menilai penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley 1930 sebagai dasar tarif tersebut tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Kebijakan ini merupakan bagian dari ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada, yang sebelumnya juga diikuti penerapan tarif balasan oleh pemerintah Kanada. Perkembangan tersebut menambah ketidakpastian perdagangan internasional karena kebijakan tarif dapat memengaruhi biaya impor, hubungan dagang, dan keputusan usaha lintas negara.
- Pada perdagangan 21 Oktober, peso Filipina mencatat pelemahan paling dalam di antara mata uang yang diberitakan, sedangkan rupiah Indonesia menguat tipis 0,02% menjadi Rp17.977 per dolar AS. Sejumlah mata uang lain, termasuk won Korea Selatan, dolar Taiwan, yen Jepang, dolar Singapura, dan baht Thailand, juga mengalami pelemahan pada perdagangan tersebut. Meskipun rupiah menguat secara harian, nilainya masih melemah 7,27% dibandingkan akhir 2025. Perbedaan kinerja ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar dipengaruhi oleh kondisi masing-masing negara sekaligus perkembangan dolar AS dan sentimen pasar global.
- Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 berada di sekitar 3%, sedangkan inflasi global diperkirakan mencapai 4,6%. Ketegangan di Timur Tengah dan tingginya harga minyak turut meningkatkan ketidakpastian, sementara suku bunga Amerika Serikat berpotensi kembali naik dan bertahan tinggi lebih lama. Situasi tersebut dapat mendorong investor memilih aset yang dianggap lebih aman, sehingga Indonesia perlu memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar, ketahanan eksternal, dan pertumbuhan ekonomi.
- Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, BI mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75% dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%, tetapi menaikkan suku bunga deposit facility dari 4,75% menjadi 5%. BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum bank umum konvensional secara bertahap dari 9% menjadi 7% serta GWM bank umum syariah dan unit usaha syariah dari 7,5% menjadi 5,5%. Kebijakan tersebut diharapkan menambah likuiditas perbankan, mendukung penyaluran kredit ke sektor riil, dan menjaga stabilitas rupiah tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
- Pada perdagangan 21 Oktober, rupiah ditutup melemah 0,1% ke Rp18.005 per dolar AS, meskipun sebelumnya sempat menguat tipis dalam perdagangan harian. BI juga mencatat rupiah berada di Rp17.985 per dolar AS pada 20 Oktober, melemah 0,61% dibandingkan akhir September. Tekanan tersebut dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter Amerika Serikat, serta kekhawatiran investor setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Untuk mengatasi kondisi ini, BI memperkuat insentif lindung nilai melalui instrumen DNDF dan swap serta mempertahankan insentif transaksi mata uang lokal dengan negara mitra.
- Investasi portofolio asing pada kuartal III-2026 mencatat arus keluar bersih sebesar US\$80 juta, terutama akibat keluarnya dana dari pasar saham di tengah tingginya ketidakpastian global. Namun, hingga 19 Oktober 2026, investasi portofolio asing pada kuartal IV mencatat arus masuk bersih sebesar US\$660 juta, dengan instrumen SRBI dan Surat Berharga Negara masih

menarik dana masuk. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September mencapai US\$146,3 miliar, setara dengan pembiayaan sekitar 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, surplus perdagangan Agustus mencapai US\$3,55 miliar, sedangkan transaksi berjalan sepanjang 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar 1,6–2,4% dari PDB.

- Sejak Juni hingga 20 Oktober 2026, kebijakan insentif lindung nilai melalui instrumen swap dan DNDF dilaporkan telah menarik arus masuk modal asing sebesar US\$9,9 miliar. BI kemudian memperbesar pengurangan premi DNDF untuk tenor enam bulan dari 25% menjadi 40% dan tenor 12 bulan dari 30% menjadi 45%, sekaligus mempertahankan insentif swap dan transaksi mata uang lokal. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya tarik aset berdenominasi rupiah, memperkuat pasar valuta asing, dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar. Keberhasilannya tetap bergantung pada perkembangan pasar global, kepercayaan investor, serta konsistensi kebijakan ekonomi dalam negeri.
- Realisasi investasi kumulatif di 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia telah mencapai Rp382,1 triliun dan menyerap sekitar 302.000 tenaga kerja. Khusus periode Januari–September 2026, investasi yang terealisasi mencapai Rp46 triliun dengan tambahan penyerapan 53.000 tenaga kerja. Pemerintah mendorong pengembangan KEK pada sektor industri, pariwisata, kesehatan, digital, dan teknologi, termasuk untuk mengurangi pengeluaran masyarakat yang berobat ke luar negeri serta meningkatkan kunjungan wisatawan. KEK Kendal, misalnya, memiliki potensi investasi Rp370 triliun dan potensi penyerapan 250.000 tenaga kerja, sehingga pengembangan kawasan ini juga berpeluang memberikan manfaat bagi perekonomian Jawa Tengah.
- Belanja negara pada kuartal IV-2026 direncanakan mencapai Rp1.300 triliun untuk mendorong konsumsi dan menjaga pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun. Namun, dengan sekitar 70% dari pagu belanja negara Rp3.842 triliun telah terserap, sisa anggaran yang tersedia diperkirakan sekitar Rp1.180 triliun, lebih rendah daripada target belanja kuartal IV tersebut. Para ekonom mengingatkan bahwa peningkatan belanja tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan lebih tinggi apabila tidak diarahkan pada sektor yang berdampak besar. Apabila belanja dipaksakan hingga memperlebar defisit mendekati atau melampaui 3% dari PDB, kredibilitas fiskal, kepercayaan investor, nilai tukar rupiah, dan biaya penerbitan surat utang negara dapat ikut tertekan. Karena itu, pemerintah menegaskan efisiensi dan penghematan anggaran tetap dilakukan agar belanja berfokus pada kebutuhan masyarakat.
- Hingga triwulan III-2026, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp72,54 triliun melalui 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja. Nilai tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp31,77 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp40,77 triliun. Kabupaten Kendal mencatat investasi tertinggi sebesar Rp13,61 triliun, disusul Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Temanggung Rp5,05 triliun, dan Demak Rp4,29 triliun. Capaian ini menunjukkan pentingnya investasi swasta bagi pertumbuhan daerah, terutama untuk memperluas kegiatan usaha dan membuka kesempatan kerja di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kota Semarang menjadi pusat penggerak ekonomi yang menghubungkan potensi daerah sekitarnya, seperti Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga. Kerja sama tersebut diperlukan karena Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk kawasan industri berskala besar, sehingga pengembangan perdagangan dan jasa perlu didukung oleh daerah penyangga yang memiliki potensi industri. Dalam forum tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga menyampaikan rencana masuknya 57 perusahaan padat karya asal Vietnam ke Jawa Tengah. Selain itu, pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo di Semarang diharapkan dapat membuka peluang bagi UMKM dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 35 kabupaten/kota telah menyelenggarakan 1.724 kegiatan Gerakan Pangan Murah sepanjang 2026, dengan total omzet sekitar Rp31,03 miliar. Kegiatan tersebut melibatkan Bulog, BUMN, BUMD, koperasi, kelompok tani, BUMDes, dan mitra swasta agar kebutuhan pangan dapat dijual dengan harga terjangkau sekaligus mendukung keberlangsungan usaha petani dan peternak. Dalam kegiatan di Kabupaten Semarang, misalnya, tersedia 7,5 ton beras dengan harga mulai Rp57.000 per lima kilogram dan 2.000 liter minyak goreng seharga Rp15.500 per liter, disertai berbagai kebutuhan pangan lainnya. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah agar bantuan harga tepat sasaran dan pasokan komoditas lebih mudah dijangkau masyarakat.
- Inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,18%, lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 3,28%. Meski demikian, stabilitas harga masih menghadapi risiko El Niño, serangan hama tikus, biaya distribusi, dan peningkatan permintaan pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, Gerakan Pangan Murah perlu disertai pemantauan pasokan dan survei kebutuhan masyarakat agar komoditas yang disediakan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga terkait menjadi penting untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus mempertahankan kestabilan inflasi.
- Kabupaten Blora diproyeksikan menerima DBH Migas sebesar Rp71,4 miliar pada 2027, naik Rp8 miliar dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp63,4 miliar. Namun, nilai tersebut masih jauh di bawah penerimaan yang ditargetkan pada 2025, yakni Rp130,06 miliar. Secara keseluruhan, alokasi Dana Bagi Hasil untuk Blora pada 2027 diperkirakan mencapai Rp104,23 miliar, terdiri atas DBH sumber daya alam Rp76,92 miliar dan DBH pajak Rp27,31 miliar. Besaran transfer tersebut akan menjadi salah satu dasar penyusunan APBD 2027, sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan pendapatan dan kebutuhan pembangunan.

Implikasi

- Kenaikan inflasi di Inggris yang mencapai 3,5% pada September menunjukkan bahwa kenaikan harga energi masih memberikan tekanan terhadap perekonomian. Konflik Iran turut memengaruhi kondisi pasar energi dan meningkatkan kekhawatiran terhadap biaya hidup masyarakat. Jika tekanan inflasi terus berlanjut, Bank of England berpotensi menaikkan suku bunga, yang dapat membuat biaya pinjaman semakin tinggi dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Kondisi ini juga dapat memengaruhi kegiatan usaha karena perusahaan harus menghadapi biaya pembiayaan yang lebih besar.
- Rencana Jepang untuk menurunkan pajak konsumsi pangan sebesar 8% selama dua tahun mulai April 2027 berpotensi membantu masyarakat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Kebijakan tersebut dapat meringankan beban rumah tangga, terutama ketika harga barang kebutuhan pokok masih menjadi perhatian. Namun, peningkatan daya beli juga perlu diimbangi dengan ketersediaan barang dan pengendalian harga agar permintaan yang meningkat tidak menimbulkan tekanan inflasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan daya beli dan stabilitas ekonomi.
- Perekonomian China masih memperoleh dukungan dari kinerja ekspor dan nilai tukar yuan yang berada di sekitar 6,6765 per dolar AS. Kinerja perdagangan yang kuat dapat membantu mempertahankan aktivitas industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun demikian, tingginya pengangguran di kalangan anak muda masih menjadi tantangan yang perlu ditangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perdagangan perlu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
- Kenaikan ekspor Jepang sebesar 16,7% secara tahunan pada September menunjukkan kuatnya permintaan terhadap produk Jepang, khususnya semikonduktor dan barang yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan. Peningkatan ini memberikan dukungan terhadap

kegiatan industri dan perdagangan Jepang. Namun, impor yang juga meningkat sebesar 18,9%, disertai gangguan pengiriman minyak, turut menekan neraca perdagangan hingga mencatat defisit sebesar 536,6 miliar yen. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekspor belum tentu langsung memperbaiki neraca perdagangan apabila kebutuhan impor dan biaya energi meningkat lebih cepat.

- Gugatan terhadap kebijakan tarif sebesar 50% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Kanada memperlihatkan bahwa kebijakan perdagangan internasional masih menghadapi ketidakpastian. Tarif yang tinggi dapat meningkatkan biaya barang lintas negara dan memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan pasar maupun lokasi produksi. Jika ketegangan perdagangan terus berlanjut, kegiatan ekspor-impor berpotensi menghadapi hambatan yang lebih besar. Situasi ini juga perlu diperhatikan oleh negara lain karena perubahan kebijakan perdagangan negara besar dapat memengaruhi rantai pasok dan kondisi pasar internasional.
- Perubahan suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan di berbagai negara menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika suku bunga di negara maju meningkat, arus modal internasional dapat berubah dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar negara lain. Pada saat yang sama, kenaikan harga energi dan gangguan perdagangan dapat meningkatkan biaya produksi serta impor. Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi global perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional agar stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian.
- Ketidakpastian ekonomi global menuntut Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang terkoordinasi. Pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan sekitar 3% dan inflasi global di kisaran 4,6% menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih perlu diwaspadai. Ketegangan geopolitik, perubahan harga minyak, dan kebijakan suku bunga negara maju dapat memengaruhi perdagangan, investasi, serta nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pelaku pasar.
- Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75% menunjukkan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar di tengah ketidakpastian global. Suku bunga fasilitas simpanan yang ditetapkan sebesar 5% dan fasilitas pinjaman sebesar 6,5%, disertai pelonggaran giro wajib minimum, diharapkan dapat membantu menjaga likuiditas perbankan. Langkah tersebut penting agar bank tetap memiliki ruang untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, stabilitas moneter diharapkan tetap terjaga tanpa menghambat kegiatan ekonomi secara berlebihan.
- Pelemahan rupiah hingga Rp18.005 per dolar AS pada 21 Oktober dapat meningkatkan biaya impor, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku, mesin, dan energi dari luar negeri. Kenaikan biaya tersebut berpotensi memengaruhi biaya produksi dan harga jual barang di dalam negeri. Apabila berlangsung dalam waktu lama, tekanan ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan beban pelaku usaha. Karena itu, pengendalian inflasi dan upaya menjaga kestabilan nilai tukar menjadi penting agar dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian dapat dibatasi.
- Rencana MSCI untuk mengevaluasi status pasar modal Indonesia menunjukkan pentingnya menjaga transparansi dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan nasional. Ketidakpastian mengenai penilaian tersebut dapat mendorong investor meninjau kembali keputusan investasinya dan meningkatkan tekanan terhadap pasar saham. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan keterbukaan informasi, pengawasan yang kuat, serta peningkatan integritas dalam perdagangan saham. Perbaikan tersebut dapat membantu menciptakan pasar modal yang lebih kredibel dan mendukung masuknya investasi dalam jangka panjang.
- Penguatan instrumen lindung nilai oleh Bank Indonesia dapat membantu perusahaan mengelola risiko akibat perubahan nilai tukar. Pemanfaatan instrumen seperti DNDF, swap, dan transaksi

mata uang lokal memberikan pilihan bagi pelaku usaha untuk mengurangi ketidakpastian biaya transaksi internasional. Langkah ini menjadi penting ketika nilai rupiah mengalami tekanan dan kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing tetap tinggi. Dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, kegiatan perdagangan dan investasi diharapkan dapat berlangsung lebih stabil.

- Surplus perdagangan Indonesia sebesar US\$3,55 miliar pada Agustus serta cadangan devisa sebesar US\$146,3 miliar pada akhir September menunjukkan adanya dukungan terhadap ketahanan eksternal perekonomian. Surplus perdagangan dapat membantu menyediakan pasokan valuta asing, sedangkan cadangan devisa berperan sebagai penyangga dalam menghadapi tekanan dari luar negeri. Meskipun demikian, perkiraan defisit transaksi berjalan sebesar 1,6–2,4% dari produk domestik bruto tetap perlu diperhatikan. Pemerintah perlu menjaga daya saing ekspor dan mengelola kebutuhan impor agar ketahanan ekonomi nasional dapat dipertahankan.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berpotensi memperluas investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. Akumulasi investasi KEK yang mencapai Rp382,1 triliun dan penyerapan sekitar 302.000 tenaga kerja menunjukkan kontribusi kawasan tersebut terhadap kegiatan ekonomi. Selain itu, investasi KEK selama Januari–September 2026 mencapai Rp46 triliun dengan penyerapan sekitar 53.000 tenaga kerja. Potensi investasi di KEK Kendal yang diperkirakan mencapai Rp370 triliun juga dapat memberikan peluang bagi pengembangan industri dan penyerapan tenaga kerja apabila realisasinya berjalan sesuai rencana.
- Efisiensi belanja negara perlu dilakukan dengan tetap mengutamakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana belanja pada kuartal IV perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan prioritas pembangunan. Penggunaan anggaran yang tepat dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran negara dilakukan secara efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan, terutama ketika perekonomian masih menghadapi ketidakpastian dari luar negeri.
- Realisasi investasi Jawa Tengah yang mencapai Rp72,54 triliun hingga triwulan III menunjukkan perkembangan kegiatan usaha yang cukup kuat. Investasi tersebut tersebar dalam 82.420 proyek dan menyerap sekitar 340.334 tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp31,77 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp40,77 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa investor dalam negeri maupun luar negeri memiliki peran penting dalam memperluas kegiatan produksi dan menciptakan kesempatan kerja di Jawa Tengah.
- Besarnya investasi di Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Batang menunjukkan bahwa beberapa wilayah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Realisasi investasi Kendal mencapai Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, dan Batang Rp8,54 triliun, disusul Temanggung sebesar Rp5,05 triliun serta Demak sebesar Rp4,29 triliun. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan industri dan membuka peluang kerja baru di wilayah tersebut. Namun, pemerintah daerah juga perlu memperluas promosi investasi ke wilayah lain agar kegiatan ekonomi dan manfaat pembangunan dapat tersebar lebih merata.
- Rencana kedatangan 57 perusahaan Vietnam membuka peluang untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan menarik investasi baru ke Jawa Tengah. Kehadiran calon investor dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi industri, memperluas jaringan bisnis, serta mendorong kerja sama antara perusahaan lokal dan mitra asing. Selain itu, Semarang Business Forum berpotensi menjadi sarana untuk mempertemukan pelaku usaha dan memperkenalkan peluang investasi daerah. Pengembangan pariwisata, termasuk kawasan Tinjomoyo, juga dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan aktivitas usaha dan kunjungan wisatawan.

- Pelaksanaan 1.724 kegiatan Gerakan Pangan Murah sepanjang 2026 dengan nilai transaksi Rp31,03 miliar menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Program ini dapat memberikan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama ketika harga pasar mengalami kenaikan. Selain membantu menjaga daya beli, kegiatan tersebut juga dapat mendukung kelancaran distribusi pangan dari pemasok kepada masyarakat. Agar manfaatnya berkelanjutan, pelaksanaan program perlu memperhatikan ketersediaan stok, jangkauan penerima manfaat, dan kestabilan pasokan di berbagai wilayah.
- Inflasi Jawa Tengah sebesar 3,18%, yang lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 3,28%, menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga di daerah masih perlu dipantau secara terukur. Meskipun tingkat inflasinya lebih rendah, ancaman El Niño, serangan hama tikus, kenaikan biaya distribusi, dan peningkatan permintaan pada periode tertentu dapat memengaruhi harga pangan. Jika gangguan produksi dan distribusi terjadi secara bersamaan, pasokan barang kebutuhan pokok dapat berkurang dan harga berpotensi meningkat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, petani, pedagang, dan pihak distribusi diperlukan untuk menjaga ketersediaan pangan serta melindungi daya beli masyarakat.
- Perkiraan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kabupaten Blora untuk 2027 sebesar Rp71,4 miliar perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran daerah. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan atau realisasi yang disebutkan untuk 2026 sebesar Rp63,4 miliar, tetapi masih lebih rendah daripada Rp130,06 miliar pada 2025. Perubahan penerimaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menentukan belanja dan tidak bergantung pada asumsi pendapatan yang belum pasti. Dengan perencanaan yang terukur, program prioritas dapat tetap dijalankan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keuangan daerah.

Berita Kamis, 22 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Kamis, 22 Oktober 2026, menunjukkan bahwa berbagai negara masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama akibat meningkatnya utang pemerintah, tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan kebijakan suku bunga. Salah satu persoalan utama terlihat di kawasan Eropa, ketika rasio utang pemerintah di 21 negara zona euro mencapai 88,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2026, meningkat dari 87,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan total utang mencapai €14,4 triliun. Rasio utang seluruh Uni Eropa juga naik menjadi 82,9%, jauh melampaui batas yang ditetapkan sebesar 60% terhadap PDB. Yunani mencatat rasio utang tertinggi sebesar 140,8%, disusul Italia sebesar 139,9% dan Prancis sebesar 119,1%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sejumlah negara Eropa memiliki ruang fiskal yang semakin terbatas untuk membiayai pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tekanan semakin terasa di Prancis karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menembus 5% untuk pertama kalinya sejak 2002, sedangkan defisit anggarannya mencapai 5,1% terhadap PDB pada 2025. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan utang dan biaya pinjaman dapat memperberat beban keuangan pemerintah, terutama ketika upaya pengurangan defisit menghadapi hambatan politik dan kepercayaan investor mulai melemah.

Tekanan ekonomi Eropa tersebut turut memengaruhi pergerakan mata uang dan pasar keuangan internasional, sebagaimana terlihat dari penguatan pound sterling terhadap euro. Pada perdagangan 22 Oktober 2026, pound menguat 0,1% menjadi US\$1,34 karena investor melihat peluang kenaikan suku bunga Bank of England pada bulan berikutnya setelah inflasi Inggris tercatat lebih tinggi daripada perkiraan. Pasar memperkirakan suku bunga Inggris berpotensi naik beberapa kali hingga April 2027,

sementara kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa diperkirakan lebih terbatas. Perbedaan prospek tersebut membuat aset berdenominasi pound relatif lebih menarik bagi investor dibandingkan sejumlah aset zona euro. Di sisi lain, kekhawatiran mengenai tingginya harga minyak, biaya pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan, dan kemampuan pemerintah mengendalikan utang turut menekan pasar saham serta obligasi Eropa. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan moneter dan kondisi fiskal suatu negara dapat memengaruhi aliran investasi lintas negara, sehingga tekanan di satu kawasan dapat mendorong perpindahan modal ke kawasan lain. Sementara itu, Bank Sentral Korea Selatan mempertahankan suku bunga acuannya pada 3%, setelah menaikkannya dua kali pada Juli dan Agustus. Keputusan tersebut diambil untuk mengevaluasi dampak kenaikan sebelumnya, meskipun inflasi Korea Selatan sebesar 2,9% pada September masih di atas target 2% dan ekspor tetap kuat berkat permintaan teknologi kecerdasan buatan. Dengan demikian, kebijakan suku bunga di berbagai negara menunjukkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar masing-masing.

Perbedaan kondisi ekonomi internasional juga terlihat pada Amerika Serikat, Timur Tengah, Afrika Utara, Pakistan, dan Filipina, yang menghadapi tantangan dengan karakteristik berbeda. Di Amerika Serikat, klaim awal tunjangan pengangguran turun sebanyak 6.000 menjadi 194.000 pada pekan yang berakhir 17 Oktober 2026, mendekati level terendah dalam hampir 57 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja masih relatif rendah dan pasar tenaga kerja tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, jumlah klaim pengangguran berkelanjutan meningkat menjadi 1,728 juta, sementara durasi median pengangguran mencapai 11,5 minggu pada September. Hal ini menandakan bahwa meskipun perusahaan belum banyak melakukan PHK, proses penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya kuat. Pada saat yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Timur Tengah, Afrika Utara, dan Pakistan akan mengalami kontraksi 1,3% pada 2026 akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sebelum diproyeksikan tumbuh kembali sebesar 6,6% pada 2027. Konflik tersebut mengganggu produksi energi, pelayaran, perdagangan, pariwisata, dan kepercayaan pelaku ekonomi. Sementara itu, Filipina menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,5% untuk menekan inflasi dan menopang peso yang melemah hingga mencapai rekor terendah. Kenaikan harga minyak, risiko kekeringan akibat El Niño, serta ketergantungan pada impor pangan dan bahan bakar memperbesar tekanan harga di negara tersebut. Rangkaian perkembangan ini menegaskan bahwa konflik geopolitik dan kenaikan harga energi dapat memengaruhi inflasi, perdagangan, nilai tukar, serta keputusan bank sentral di berbagai negara.

Berbagai tekanan ekonomi global tersebut memiliki kaitan erat dengan kondisi perekonomian Indonesia, terutama melalui pergerakan nilai tukar rupiah, arus modal asing, dan perubahan sentimen investor. Pada perdagangan Kamis, 22 Oktober 2026, rupiah melemah hingga Rp18.050 per dolar AS di pasar spot, seiring kenaikan harga minyak Brent sebesar 2,98% menjadi US\$112,25 per barel. Pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter Amerika Serikat, serta kekhawatiran investor terhadap perkembangan pasar modal Indonesia setelah munculnya penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI). Selain itu, peningkatan premi risiko investasi atau credit default swap (CDS) Indonesia menambah tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar surat berharga negara. Pada 22 Oktober 2026, CDS Indonesia bertenor lima tahun tercatat sebesar 100,26 basis poin, sedangkan tenor 10 tahun mencapai 150,14 basis poin. Kondisi ini perlu diperhatikan karena pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah dan memperberat pembiayaan negara, terutama untuk kebutuhan yang berkaitan dengan impor. Oleh karena itu, pengelolaan penerbitan surat berharga negara dalam rupiah maupun valuta asing perlu dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, likuiditas domestik, dan perkembangan suku bunga global. Meskipun demikian, kondisi likuiditas dalam negeri yang mulai membaik berpotensi membantu menjaga stabilitas pasar obligasi dan membatasi kenaikan imbal hasil.

Menghadapi tekanan tersebut, Bank Indonesia (BI) berupaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan moneter, insentif investasi, dan penguatan pasar keuangan. BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 5,75%, tetapi menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5% untuk menjaga daya tarik aset rupiah. Langkah ini menunjukkan bahwa BI berusaha menyeimbangkan kebutuhan menjaga nilai tukar dengan upaya mendukung kegiatan ekonomi domestik agar tidak mengalami perlambatan. Di sisi lain, BI menyatakan bahwa berbagai insentif instrumen moneter telah menarik aliran modal asing sebesar US\$9,9 miliar sejak Juni hingga 20 Oktober 2026. Insentif tersebut mencakup instrumen swap, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra. BI juga meningkatkan pengurangan premi lindung nilai DNDF menjadi 40% untuk tenor enam bulan dan 45% untuk tenor 12 bulan guna membantu pelaku pasar mengelola risiko perubahan nilai tukar. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, khususnya ketika investor membutuhkan perlindungan terhadap ketidakpastian kurs. Namun, keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada perkembangan kondisi global, kepercayaan investor, dan kemampuan pemerintah serta otoritas keuangan menjaga stabilitas pasar. Dengan demikian, kebijakan BI tidak hanya diarahkan untuk meredam pelemahan rupiah dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat aliran modal dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah dan BI juga berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas perbankan dan perluasan akses pembiayaan. BI berencana melonggarkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026, yang diperkirakan dapat membebaskan likuiditas sekitar Rp190 triliun. Untuk bank konvensional, GWM akan diturunkan dari 9% menjadi 8% pada November, kemudian menjadi 7% pada Desember. Sementara itu, GWM bank syariah akan turun dari 7,5% menjadi 6,5% pada November dan kembali menjadi 5,5% pada Desember. Tambahan likuiditas tersebut diharapkan memperbesar kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan masyarakat. BI juga memperpanjang insentif bagi sektor properti dan otomotif hingga Desember 2027 untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit pada September 2026 tercatat sebesar 13,3% secara tahunan, melampaui kisaran target BI sebesar 8%–12% untuk sepanjang tahun. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027 untuk sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku usaha pedesaan, masyarakat di daerah terpencil, dan kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Penyaluran pembiayaan yang telah berjalan mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta orang. Perluasan kredit ini diharapkan mendorong masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperluas kesempatan ekonomi. Dengan begitu, pertumbuhan nasional diharapkan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan oleh UMKM dan masyarakat di berbagai daerah.

Upaya memperkuat perekonomian nasional juga dilakukan melalui pembenahan badan usaha milik negara agar pengelolaan aset pemerintah menjadi lebih efisien dan produktif. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sebanyak 364 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau dirampingkan hingga 21 Oktober 2026, dari jumlah awal sekitar 1.074 perusahaan. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan yang ditata mencapai 700 hingga akhir Desember 2026, terutama perusahaan yang tidak efisien, terus merugi, atau memiliki persoalan dalam pelaporan keuangan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan dan mengarahkan sumber daya negara kepada perusahaan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, penataan BUMN perlu berjalan seiring dengan kebijakan stabilisasi keuangan agar tidak menghambat kegiatan usaha yang produktif. Bank DBS memperkirakan BI masih berpeluang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada kuartal IV-2026 apabila risiko terhadap rupiah dan stabilitas keuangan meningkat. Namun, perkiraan tersebut belum merupakan keputusan resmi BI, karena arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan perkembangan data ekonomi. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari DBS berada pada kisaran 4,9%–5,7%, dengan perkiraan utama sebesar 5,3% untuk 2026.

Angka tersebut menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan masih terbuka, tetapi perlu didukung pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, ketersediaan pembiayaan, dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi nasional bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, stabilitas keuangan, dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat.

Perkembangan ekonomi nasional tersebut memiliki keterkaitan dengan kondisi perekonomian Jawa Tengah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat investasi, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di Kabupaten Batang, pemerintah daerah melanjutkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilkan harga kebutuhan pokok. Program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut penugasan Badan Pangan Nasional tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia. Komoditas yang disediakan meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Dalam pelaksanaannya, beras SPHP dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp15.500 per kilogram, dan telur ayam Rp22.000 per kilogram. Sebagian besar komoditas, termasuk minyak goreng, telur, dan gula, dilaporkan telah terserap habis, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Program ini menjadi penting karena kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Melalui penyediaan pangan yang lebih murah, pemerintah daerah berupaya membantu masyarakat mempertahankan daya beli sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, stabilitas harga pangan menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dan mendukung kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

Selain menjaga keterjangkauan pangan, penguatan investasi menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan. Komitmen tersebut terlihat melalui penyelenggaraan Semarang Business Forum (SEMBIZ) 2026 yang mempertemukan pemerintah daerah, regulator, investor, dan pelaku usaha untuk membahas peluang investasi, logistik, pariwisata, serta pengembangan produk unggulan daerah agar mampu menjangkau pasar global. Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kota Semarang juga dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat investasi dan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah, terutama melalui pengembangan infrastruktur, pariwisata, logistik, dan produk lokal. Bank Jateng menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis bagi investor dengan menyediakan layanan pengelolaan dana perusahaan, pembayaran gaji karyawan, manajemen kas, transaksi valuta asing, serta pembiayaan investasi dan modal kerja sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha. Dalam kegiatan tersebut, Bank Jateng juga menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan PT Wadou Creative Art Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas peluang kerja sama bisnis. Selanjutnya, Bank Jateng berencana memetakan kebutuhan perbankan investor, memperkuat komunikasi dengan perusahaan potensial, dan memanfaatkan jaringan kantor cabang untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi, memperkuat daya saing pelaku usaha, membuka lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Tengah.

Perkembangan positif di sektor investasi dan pengendalian harga tersebut juga perlu diikuti dengan upaya pemerataan hasil pembangunan agar peningkatan aktivitas ekonomi benar-benar mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat di Kabupaten Kendal, yang mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,07% pada 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3.450 orang, dari 83.730 orang pada 2025 menjadi 80.280 orang. Persentase kemiskinan tersebut turun 0,33 poin dibandingkan tahun sebelumnya, setara dengan rata-rata nasional sebesar 8,07% dan lebih rendah

daripada tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 9,21%. Pencapaian ini menjadi perkembangan positif, terlebih karena pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 7,99% pada 2025, tertinggi di Jawa Tengah, sementara nilai investasi meningkat dari Rp14,21 triliun menjadi Rp15,86 triliun. Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi belum cukup apabila manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kendal menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program pembangunan dan bantuan sosial menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pertumbuhan ekonomi juga perlu diikuti penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta keterlibatan UMKM agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari perkembangan usaha dan investasi. Secara keseluruhan, rangkaian berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah pada 22 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa perekonomian menghadapi tantangan berupa ketidakpastian global, tekanan nilai tukar, inflasi, dan risiko pembiayaan, tetapi tetap memiliki peluang untuk tumbuh melalui kebijakan yang tepat. Pada tingkat nasional, stabilitas keuangan, perluasan kredit, dan pembenahan BUMN menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian, sedangkan di Jawa Tengah pengendalian harga pangan, pengembangan investasi, dan pengurangan kemiskinan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan dan besarnya investasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, merata, dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Ringkasan

- Berdasarkan laporan Eurostat, rasio utang pemerintah negara-negara zona euro mencapai 88,8% terhadap PDB pada kuartal II-2026, dengan total utang sebesar €14,4 triliun. Yunani mencatat rasio utang tertinggi sebesar 140,8%, disusul Italia sebesar 139,9% dan Prancis sebesar 119,1%. Tekanan terhadap Prancis semakin besar karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menembus 5%, sementara defisit anggarannya mencapai 5,1% terhadap PDB pada 2025. Kondisi ini memperlihatkan semakin terbatasnya ruang fiskal negara-negara Eropa untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Pada kuartal III-2026, perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan organik sebesar 1%, sesuai dengan perkiraan pasar. Namun, penjualan ritel merek Miu Miu turun 3%, berbeda dari perannya sebagai pendorong utama pertumbuhan grup pada 2025. Dari sisi wilayah, pasar Amerika masih mendukung pendapatan meskipun pertumbuhannya melambat, sedangkan penjualan Asia Pasifik relatif stabil karena kondisi positif di sejumlah pasar mengimbangi lemahnya kunjungan konsumen di China daratan. Pendapatan di Eropa masih lemah, sementara integrasi Versace yang diakuisisi pada Desember 2025 berjalan sesuai rencana menjelang peluncuran koleksi pertamanya di bawah direktur kreatif baru pada 2027.
- Pound naik 0,1% menjadi US\$1,34 setelah inflasi Inggris yang dirilis lebih tinggi dari perkiraan memperkuat dugaan bahwa Bank of England akan menaikkan suku bunga pada November. Pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga Inggris dapat berlangsung beberapa kali hingga April 2027, sementara kenaikan oleh Bank Sentral Eropa diperkirakan lebih terbatas. Perbedaan prospek tersebut meningkatkan daya tarik pound bagi investor, terutama ketika obligasi Prancis mengalami kenaikan imbal hasil dan saham zona euro melemah. Sebaliknya, euro terus tertekan oleh kekhawatiran terhadap kondisi fiskal negara-negara Eropa, sehingga pergerakan mata uang ini menunjukkan perbedaan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Inggris dan zona euro.
- Bank of Korea menahan suku bunga pada 3% setelah menaikkannya masing-masing 25 basis poin pada Juli dan Agustus 2026. Keputusan tersebut memberikan waktu bagi bank sentral untuk mengevaluasi dampak kenaikan sebelumnya dan mencermati volatilitas pasar keuangan. Meskipun inflasi tahunan turun dari 3,1% pada Agustus menjadi 2,9% pada September, angka tersebut masih lebih tinggi daripada target 2%. Di sisi lain, ekspor Korea Selatan tetap kuat

seiring meningkatnya permintaan teknologi kecerdasan buatan, bahkan nilai pengiriman ekspor Januari–September untuk pertama kalinya melampaui US\$800 miliar. Kombinasi pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang belum mencapai target membuat peluang kenaikan suku bunga menjadi 3,25% pada November tetap terbuka.

- Klaim awal tunjangan pengangguran turun 6.000 menjadi 194.000 pada pekan yang berakhir 17 Oktober 2026, mendekati level terendah dalam hampir 57 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja masih relatif rendah, didukung permintaan domestik dan keuntungan perusahaan. Namun, penambahan pekerjaan nonpertanian hanya mencapai 29.000 pada September, sementara klaim berkelanjutan meningkat menjadi 1,728 juta dan durasi median pengangguran mencapai 11,5 minggu. Situasi tersebut menggambarkan pasar tenaga kerja yang cenderung membatasi perekrutan sekaligus tidak banyak melakukan PHK. Perkembangan ini menjadi pertimbangan penting bagi Federal Reserve dalam menentukan suku bunga di tengah risiko inflasi, perang di Timur Tengah, dan ketidakpastian kebijakan tarif impor.
- Ekonomi Timur Tengah, Afrika Utara, dan Pakistan diproyeksikan menyusut 1,3% pada 2026 sebelum tumbuh kembali sebesar 6,6% pada 2027. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menekan produksi energi, pelayaran, pariwisata, perdagangan, serta kepercayaan pelaku ekonomi. Negara-negara pengekspor minyak menghadapi tekanan lebih besar akibat gangguan produksi dan pengiriman, sedangkan negara pengimpor minyak relatif lebih mampu bertahan berkat dukungan permintaan domestik, remitansi, pariwisata, dan kebijakan perlindungan konsumen. Proyeksi pemulihan 2027 bergantung pada asumsi bahwa konflik mereda dan perdagangan berangsur normal. Karena itu, gangguan energi dan jalur perdagangan yang berlanjut berisiko memperburuk inflasi serta memperketat kondisi keuangan global.
- Bank sentral Filipina menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,5%, yang merupakan kenaikan keempat secara berturut-turut. Keputusan tersebut diambil ketika peso melemah hingga mencapai rekor terendah dan inflasi tahunan melonjak menjadi 7,2% pada September 2026, sehingga rata-rata inflasi sejak awal tahun mencapai 5,4%, jauh di atas target 3%. Kenaikan harga minyak global, tarif transportasi, dan risiko kekeringan akibat El Niño turut memperbesar tekanan harga, terutama karena Filipina bergantung pada impor bahan bakar dan pangan. Meskipun kebijakan suku bunga yang lebih tinggi diharapkan dapat membatasi inflasi dan menopang peso, kenaikan biaya pinjaman juga menjadi tantangan bagi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan.
- Pada perdagangan 22 Oktober 2026, rupiah ditutup melemah ke kisaran Rp18.050–Rp18.060 per dolar AS, dipengaruhi kenaikan harga minyak Brent, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta kekhawatiran investor terhadap perkembangan penilaian MSCI atas pasar modal Indonesia. Arus keluar modal asing turut membebani nilai tukar dan meningkatkan perhatian investor terhadap risiko investasi di Indonesia. Pada saat yang sama, kenaikan premi credit default swap (CDS) mencerminkan meningkatnya persepsi risiko terhadap kemampuan pembiayaan pemerintah. Kondisi ini dapat menambah beban subsidi dan memengaruhi ketahanan fiskal, sehingga pemerintah perlu mengelola penerbitan surat berharga negara secara terukur dengan memperhatikan likuiditas domestik dan arah kebijakan suku bunga global.
- BI memutuskan menahan BI Rate pada 5,75%, tetapi menaikkan suku bunga deposit facility dari 4,75% menjadi 5% untuk menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah. Kebijakan suku bunga selanjutnya akan bergantung pada perkembangan data ekonomi, terutama pergerakan nilai tukar, inflasi, dan arus modal asing. BI juga mengoptimalkan insentif bagi investor yang menempatkan dana pada instrumen domestik, termasuk surat berharga negara dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa bank sentral berupaya menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar dengan mempertahankan

momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa langsung menaikkan suku bunga acuan di tengah tekanan pasar.

- Bank Indonesia meningkatkan pengurangan premi instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dari 25% menjadi 40% untuk tenor enam bulan dan dari 30% menjadi 45% untuk tenor 12 bulan. Instrumen ini membantu pelaku usaha dan investor melindungi nilai transaksi dari perubahan kurs tanpa harus menyerahkan dolar AS secara fisik saat penyelesaian kontrak. BI juga melaporkan bahwa berbagai insentif moneter, termasuk transaksi swap, DNDF, dan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra, telah menarik aliran modal asing sebesar US\$9,9 miliar sejak Juni hingga 20 Oktober 2026. Meskipun demikian, rupiah masih menghadapi tekanan akibat kondisi geopolitik dan sentimen investor, sehingga efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga kepercayaan pasar.
- BI merencanakan penurunan giro wajib minimum secara bertahap mulai November 2026, yang diperkirakan dapat membebaskan likuiditas perbankan sekitar Rp190 triliun. Untuk bank konvensional, GWM diturunkan dari 9% menjadi 8% pada November dan 7% pada Desember, sedangkan GWM bank syariah turun dari 7,5% menjadi 6,5% pada November dan 5,5% pada Desember. Selain itu, insentif sektor properti dan otomotif diperpanjang hingga Desember 2027 untuk mendukung aktivitas ekonomi. Pertumbuhan kredit pada September mencapai 13,3% secara tahunan, melampaui kisaran target BI sebesar 8%–12% untuk 2026. Bank DBS memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di kisaran 4,9%–5,7%, dengan proyeksi utama sebesar 5,3%, meskipun risiko nilai tukar dan kemungkinan kenaikan suku bunga global masih perlu diperhatikan.
- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembiayaan tersebut ditujukan kepada sekitar 28 juta keluarga, termasuk petani, nelayan, pelaku usaha di pedesaan dan daerah terpencil, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Program yang telah berjalan disebut mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta orang. Pemerintah ingin memperluas pembiayaan agar lebih banyak masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kebijakan ini juga dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi turut dirasakan pedagang dan pelaku UMKM. Keberhasilan program tersebut akan bergantung pada penyaluran kredit yang tepat sasaran dan kemampuan penerima memanfaatkan pembiayaan untuk kegiatan produktif.
- Hingga 21 Oktober 2026, sebanyak 364 BUMN dilaporkan telah ditutup, dikonsolidasikan, atau dirampingkan dari jumlah awal 1.074 perusahaan. Pemerintah menargetkan penataan mencapai 700 perusahaan hingga Desember 2026, terutama dengan menyasar perusahaan yang tidak efisien, terus merugi, atau memiliki persoalan dalam pelaporan keuangan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pembenahan sejumlah perusahaan telah meningkatkan keuntungan, termasuk pada perusahaan yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan laba. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi beban pengelolaan aset negara dan memusatkan sumber daya pada perusahaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, tujuan efisiensi tersebut perlu tercermin pada tata kelola yang lebih baik serta kontribusi nyata BUMN terhadap perekonomian nasional.
- Program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penugasan Badan Pangan Nasional sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia. Komoditas yang disediakan antara lain beras bersubsidi, minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp15.500 per kilogram, dan telur ayam Rp22.000 per kilogram. Sebagian besar komoditas, termasuk minyak goreng, telur, dan gula, dilaporkan terserap habis. Tingginya penyerapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan bahan pangan dengan harga terjangkau, sehingga program serupa perlu dipersiapkan dengan memperhatikan ketersediaan pasokan dan kebutuhan warga untuk membantu menjaga daya beli di tengah kenaikan harga pangan.

- Dalam Semarang Business Forum yang digelar di Semarang pada 21 Oktober 2026, pemerintah daerah, investor, regulator, dan pelaku usaha membahas peluang investasi berkelanjutan, pengembangan logistik dan pariwisata, serta penguatan produk unggulan daerah agar mampu menjangkau pasar global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menekankan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan membuka lapangan kerja. Bank Jateng menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis melalui layanan pengelolaan dana, pembayaran gaji, manajemen kas, transaksi valuta asing, serta pembiayaan investasi dan modal kerja. Bank Jateng juga menandatangani Letter of Intent dengan PT Wadou Creative Art Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi bisnis. Forum ini diharapkan dapat mendorong realisasi investasi dan memperkuat daya saing pelaku usaha di daerah.
- Pada 2026, tingkat kemiskinan Kendal tercatat sebesar 8,07%, turun 0,33 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3.450 orang, dari 83.730 orang pada 2025 menjadi 80.280 orang pada 2026. Angka tersebut setara dengan rata-rata nasional sebesar 8,07% dan lebih rendah daripada tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 9,21%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 7,99% pada 2025, tertinggi di Jawa Tengah, sedangkan investasi meningkat dari Rp14,21 triliun menjadi Rp15,86 triliun. Pemerintah daerah menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan dan program pembangunan tepat sasaran. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta memperluas keterlibatan UMKM sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.

Implikasi

- Meningkatnya utang negara-negara Eropa menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan menentukan prioritas belanja negara. Tingginya rasio utang serta kenaikan biaya pinjaman dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membiayai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya pengendalian defisit anggaran agar beban utang tidak terus meningkat dan kepercayaan investor terhadap kondisi keuangan negara tetap terjaga.
- Perlambatan industri barang mewah global turut memengaruhi kinerja Prada yang mencatat pertumbuhan pendapatan organik sebesar 1% pada kuartal III 2026, sementara penjualan ritel Miu Miu mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan permintaan pasar dan menjaga daya tarik produknya. Pertumbuhan yang masih bertahan juga memperlihatkan bahwa kekuatan merek dan strategi penjualan tetap berperan penting dalam menghadapi persaingan serta menjaga pendapatan ketika industri barang mewah mengalami tekanan.
- Penguatan pound sterling terhadap euro menunjukkan bahwa perbedaan perkiraan kebijakan suku bunga dapat memengaruhi pilihan investasi dan pergerakan mata uang. Ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of England membuat aset Inggris lebih menarik bagi investor, sedangkan tingginya utang dan tekanan fiskal sejumlah negara Eropa turut membebani euro. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah dan arah kebijakan bank sentral dapat memengaruhi arus modal, sehingga perubahan nilai tukar perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada perdagangan dan investasi internasional.
- Keputusan Bank Sentral Korea Selatan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3% menunjukkan bahwa bank sentral berusaha menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan kebutuhan menjaga kestabilan pasar keuangan. Meskipun inflasi turun menjadi 2,9% pada September 2026, angkanya masih berada di atas target sebesar 2%. Sementara itu, pertumbuhan ekspor yang kuat, terutama karena meningkatnya permintaan teknologi kecerdasan buatan,

dapat mendukung aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, peluang kenaikan suku bunga tetap terbuka apabila tekanan inflasi belum kembali terkendali.

- Ketahanan pasar tenaga kerja Amerika Serikat terlihat dari penurunan klaim awal tunjangan pengangguran menjadi 194.000 pada pekan yang berakhir 17 Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja masih relatif rendah, meskipun pertumbuhan lapangan kerja dan perekrutan belum sepenuhnya kuat. Peningkatan jumlah penerima tunjangan pengangguran berkelanjutan juga menjadi tanda bahwa sebagian pencari kerja masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan. Kondisi ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Federal Reserve dalam menentukan suku bunga, terutama ketika tekanan inflasi dan ketidakpastian geopolitik masih berlangsung.
- Perkiraan kontraksi ekonomi Timur Tengah, Afrika Utara, dan Pakistan sebesar 1,3% pada 2026 menunjukkan besarnya dampak konflik terhadap kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Gangguan produksi energi, pelayaran, perdagangan, dan pariwisata dapat menurunkan pendapatan serta menghambat kegiatan usaha, terutama di negara-negara yang bergantung pada ekspor minyak. Meskipun IMF memperkirakan ekonomi kawasan akan kembali tumbuh pada 2027, proses pemulihan masih menghadapi risiko apabila konflik dan gangguan jalur perdagangan terus berlanjut. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa stabilitas keamanan memiliki peran penting dalam menjaga kegiatan ekonomi dan kepercayaan pelaku usaha.
- Kenaikan suku bunga Filipina menjadi 5,5% menunjukkan langkah bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi tekanan terhadap peso. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang domestik. Namun, suku bunga yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi masyarakat dan perusahaan, sehingga berpotensi menahan konsumsi maupun investasi. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral perlu memperhatikan perkembangan harga energi serta risiko kekeringan yang dapat memengaruhi pasokan pangan dan menambah tekanan inflasi.
- Tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan Indonesia menunjukkan bahwa ketidakpastian global masih dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Pelemahan rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan serta memengaruhi keputusan investor dalam menempatkan dananya. Oleh sebab itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang terukur, memperkuat stabilitas nilai tukar, dan memastikan kondisi keuangan tetap mendukung kegiatan ekonomi. Upaya tersebut penting agar tekanan dari luar negeri tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
- Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75% menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini memberi ruang bagi kegiatan usaha untuk tetap berkembang, tetapi tekanan terhadap rupiah masih membuka kemungkinan penyesuaian suku bunga pada kuartal IV-2026. Jika tekanan eksternal semakin kuat, kenaikan suku bunga dapat dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas keuangan, meskipun langkah tersebut juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap biaya pinjaman. Dengan demikian, arah kebijakan moneter akan bergantung pada perkembangan inflasi, nilai tukar, arus modal, dan kondisi ekonomi nasional.
- Penguatan insentif lindung nilai dan pelonggaran giro wajib minimum perbankan diharapkan membantu menjaga stabilitas rupiah sekaligus meningkatkan ketersediaan dana di sektor keuangan. Penurunan GWM secara bertahap diperkirakan dapat membebaskan likuiditas sekitar Rp190 triliun, sehingga perbankan memiliki ruang lebih besar untuk mendukung penyaluran kredit. Apabila dana tersebut dimanfaatkan secara produktif, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan bisnis dan mempertahankan aktivitas produksinya. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko agar tambahan likuiditas benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027 menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, pelaku

UMKM, dan keluarga berpenghasilan rendah. Perluasan kredit diharapkan membantu masyarakat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, serta menambah pendapatan keluarga. Program ini juga dapat mendorong aktivitas ekonomi di daerah agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada perusahaan besar. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, penyaluran pembiayaan perlu menjangkau kelompok yang membutuhkan dan disertai pengelolaan kredit yang baik.

- Rencana pemerintah menutup atau merampingkan hingga 700 BUMN pada akhir 2026 menunjukkan fokus pada efisiensi dan perbaikan tata kelola perusahaan negara. Perusahaan yang tidak produktif, terus merugi, atau memiliki persoalan dalam pelaporan keuangan perlu dievaluasi agar tidak terus membebani pengelolaan aset negara. Jika dilaksanakan dengan tepat, langkah ini dapat membantu mengarahkan sumber daya kepada perusahaan yang lebih produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, proses penataan juga perlu memperhatikan keberlanjutan layanan, kepastian bagi pekerja, dan kepentingan publik agar efisiensi tidak menimbulkan masalah baru.
- Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% menurut DBS Bank menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki peluang untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global. Dukungan likuiditas perbankan, pertumbuhan kredit, dan perpanjangan insentif bagi sektor properti serta otomotif diharapkan membantu mempertahankan aktivitas usaha. Meski demikian, tekanan terhadap rupiah dan kemungkinan perubahan suku bunga global masih dapat memengaruhi biaya pembiayaan serta keputusan investasi. Karena itu, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kegiatan usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Batang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga pangan. Penyediaan beras SPHP seharga Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp15.500 per kilogram, dan telur ayam Rp22.000 per kilogram memberi pilihan belanja yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Tingginya penyerapan sejumlah komoditas menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pangan dengan harga lebih rendah masih besar. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dipersiapkan dengan baik agar pasokan tersedia sesuai kebutuhan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Penyelenggaraan Semarang Business Forum (SEMBIZ) 2026 membuka peluang kerja sama antara pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk mengembangkan ekonomi Jawa Tengah. Keterlibatan Bank Jateng sebagai mitra strategis diharapkan membantu investor memenuhi kebutuhan transaksi, pengelolaan dana, serta pembiayaan usaha. Kerja sama ini juga dapat mendukung pengembangan sektor logistik, pariwisata, dan produk unggulan daerah agar memiliki peluang pasar yang lebih luas. Jika peluang investasi dapat diwujudkan menjadi kegiatan usaha nyata, dampaknya diharapkan terlihat melalui pertumbuhan ekonomi daerah dan terbukanya lapangan kerja.
- Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kendal menjadi 8,07% pada 2026 menunjukkan perkembangan positif karena jumlah penduduk miskin berkurang 3.450 orang, dari 83.730 orang pada 2025 menjadi 80.280 orang. Capaian ini memperlihatkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan Kendal berada di bawah angka Jawa Tengah sebesar 9,21%. Namun, penurunan tersebut perlu terus dijaga melalui program bantuan dan pembangunan yang tepat sasaran. Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional juga penting untuk membantu pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat dan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
- Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di Kabupaten Kendal memberikan peluang untuk memperluas kegiatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 7,99% pada 2025, sedangkan nilai investasinya meningkat dari Rp14,21 triliun menjadi Rp15,86 triliun. Perkembangan ini dapat menjadi modal untuk

menciptakan lebih banyak pekerjaan dan memperkuat kegiatan ekonomi daerah. Namun, peningkatan investasi perlu diikuti dengan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan masyarakat, dan keterlibatan UMKM agar manfaat pertumbuhan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat secara lebih luas.